

**STRATEGI ANALISIS SITUASI DAN MANAJEMEN PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KABUPATEN
DELI SERDANG TAHUN 2024**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Manajemen
Dalam Bidang Sumber Daya Manusia*

OLEH :

RIZAL EFFENDI

NPM : 2320030031



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Rizal Effendi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320030031
Prodi / Konsentrasi : Magister Manajemen / Sumber Daya Manusia
Judul Tesis : Strategi Analisis Situasi dan Manajemen Perencanaan
Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

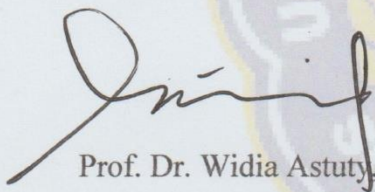
Pengesahan Tesis :

Medan, Agustus 2025

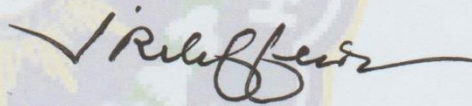
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Widia Astuty,
S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA



Assoc. Prof. Dr. Drs. Sjahril Effendy P,
M.Si., M.A., M.Psi., M.H., MRE., CNLP

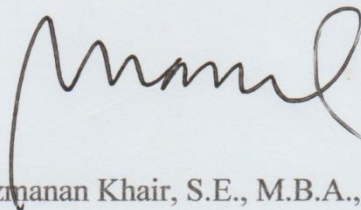
Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum



Hazmanan Khair, S.E., M.B.A., Ph.D

PENGESAHAN

**STRATEGI ANALISIS SITUASI DAN MANAJEMEN PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KABUPATEN
DELI SERDANG TAHUN 2024**

“Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh
Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis serta berhak menyandang gelar

Magister Manajemen (M.M.)

Pada Hari Kamis, Tanggal 24 Juli 2025

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Irfan, S.E., M.M

2. Prof. Dr. Ir. Hj. Sabrina, M.Si

3. Dr. Wiedyana Verawaty, S.T., M.M

PERNYATAAN

STRATEGI ANALISIS SITUASI DAN MANAJEMEN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukkan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Juli 2025

Penulis,



Rizal Effendi

NPM : 2320030031

**STRATEGI ANALISIS SITUASI DAN MANAJEMEN PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021
DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024**

**RIZAL EFFENDI
NPM : 2320030031**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk analisis strategi percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, dengan fokus penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis manajemen analisis situasi dan perencanaan program kegiatan *stunting*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif dan induktif. Sumber data penelitian menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dan jenis data penelitian berasal dari data primer yaitu hasil wawancara dengan informan dan data skunder berasal dari dokumentasi, data, laporan dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, sudah dilaksanakan dalam menetapkan lokus *stunting* dan program kegiatan prioritas *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025 tetapi hasil yang sudah ditetapkan masih belum terfokus sesuai prioritas lokasi dan kegiatan yang dibutuhkan kelompok sasaran *stunting*, maka perlu adanya komitmen dan kerjasama lintas sektor dalam melaksanakan perencanaan program kegiatan *stunting*. Instrumen analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan ini akan menetapkan rencana program kegiatan *stunting* sehingga mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sesuai target Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian terdapat berapa kendala dan hambatan dalam manajemen perencanaan program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, antara lain : dukungan alokasi anggaran yang terbatas, luasnya lokasi dan banyaknya jumlah masyarakat penerima manfaat sehingga program kegiatan *stunting* tidak mencukupi, belum mendalamnya identifikasi kendala/masalah yang dihadapi dalam intervensi kegiatan *stunting* dan penandaan program kegiatan *stunting* yang menyasar intervensi langsung, tidak langsung dan pendukung.

Kata kunci : *Stunting*, analisis situasi, perencanaan program kegiatan, percepatan penurunan *stunting*, peraturan presiden nomor 72 tahun 2021

**STRATEGY SITUATION ANALYSIS AND PROGRAM PLANNING
MANAGEMENT ACTIVITIES IN ACCELERATION OF STUNTING
REDUCTION BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER
72 OF 2021 IN DELI SERDANG REGENCY IN 2024**

**RIZAL EFFENDI
NPM : 2320030031**

ABSTRACT

This research aims to analysis the strategy for accelerating stunting reduction based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 in Deli Serdang Regency in 2024, with the focus of the research being to describe and analyze the management of situation analysis and planning of stunting activity programs. The research method used is qualitative, namely descriptive and inductive research. The source of research data uses observation, documentation and interview methods and the type of research data comes from primary data, namely the results of interviews with informants and secondary data comes from documentation, data, reports and observations. The results of this study indicate that the strategy of situation analysis and management of program planning activities in accelerating stunting reduction based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 in Deli Serdang Regency in 2024, has been implemented in determining the stunting locus and priority stunting activity programs in 2024 and 2025 but the results that have been determined are still not focused according to the priority locations and activities needed by the stunting target group, so there needs to be commitment and cross-sector cooperation in implementing stunting program planning. This situation analysis and program planning management instrument will determine the stunting program activity plan so as to accelerate the reduction of stunting in Deli Serdang Regency in 2024 according to the target of Presidential Regulation Number 72 of 2021. Based on the results of the study, there are several obstacles and barriers in the management of stunting program planning activities in Deli Serdang Regency in 2024, including: limited budget allocation support, the vast location and the large number of beneficiary communities so that the stunting program activities are insufficient, the identification of obstacles/problems faced in stunting activity interventions and the marking of stunting program activities that target direct, indirect and supporting interventions.

Keyword: Stunting, situation analysis, program planning activities, presidential regulation number 72 in 2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya dengan judul “Strategi Analisis Situasi dan Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penyusunan tesis ini penulis tidak lepas dari kendala, namun kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian tesis ini, dan juga penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., Sebagai Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program magister pascasarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Hazmanan Khair, S.E., M.B.A., Ph.D., sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Fajar Pasaribu, S.E., M.Si., sebagai Sekretaris Program Studi Magister Manajemen di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulis melaksanakan perkuliahan.
5. Ibu Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA., sebagai dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Drs. Sjahril Effendy P, M.Si., M.A., M.Psi., M.H., MRE., CNLP., sebagai dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Irfan, S.E., M.M sebagai dosen Penguji I yang telah membimbing dan menguji tesis ini.
8. Ibu Dr. Wiedyana Verawaty, S.T., M.M., sebagai dosen Penguji II yang telah membimbing dan menguji tesis ini.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan (PPM) serta jajaran fungsional dan analisis data Bidang PPM Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, atas diberikan izin melaksanakan penelitian tesis ini.

10. Seluruh dosen yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada orang tua, istri, anak, saudara/i dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan dorongan selama ini kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini mungkin terdapat kesalahan, baik segi penyusunan, sistematika maupun tata bahasa penulisan, oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran yang membangun guna melengkapi dan penyempurnaan tesis ini.

Atas semua perhatian dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'R' and 'E' followed by a horizontal line and a small dot.

Rizal Effendi

NPM 2320030031

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Manajemen.....	10
2.1.1 Pengertian Manajemen	10
2.1.2 Tingkatan Dalam Manajemen	11
2.2 Strategi	12
2.2.1 Pengertian Strategi.....	12
2.2.2 Tahapan-Tahapan Strategi.....	15
2.3 Dasar-Dasar Perencanaan	16
2.3.1 Pengertian Perencanaan.....	16
2.3.2 Manfaat Perencanaan.....	16
2.3.3 Jenis Perencanaan	17
2.3.4 Proses Penyusunan Perencanaan	19
2.3.5 Pendekatan dalam Perencanaan.....	21
2.4 Analisis Situasi	22
2.4.1 Pengertian Analisis Situasi	22

2.4.2	Tujuan Analisis Situasi.....	23
2.4.3	Hasil Analisis Situasi.....	24
2.4.4	Ruang Lingkup Kegiatan.....	24
2.4.5	Penanggung Jawab	25
2.4.6	Jadwal Kegiatan.....	25
2.4.7	Tahapan Kegiatan	26
2.5	Manajemen Perencanaan Program Kegiatan <i>Stunting</i>	27
2.5.1	Definisi Penyusunan Rencana Program Kegiatan <i>Stunting</i>	27
2.5.2	Tujuan Penyusunan Rencana Program Kegiatan <i>Stunting</i>	28
2.5.3	Hasil Yang Diharapkan	28
2.5.4	Penanggung Jawab Kegiatan	29
2.5.5	Jadwal Kegiatan.....	30
2.5.6	Tahapan Kegiatan	30
2.6	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	31
2.6.1	Regulasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	31
2.6.2	Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	33
2.7	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	37
2.8	Kajian Penelitian Terdahulu dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	40
2.8	Kerangka Berpikir.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1	Pendekatan Penelitian	47
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
3.3	Teknik Pengumpulan Data	51
3.3.1	Jenis Data Penelitian	51
3.3.2	Sumber Data Penelitian	52
3.4	Tahap Analisis Data.....	54
3.4.1	Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Hasil Penelitian.....	57
4.1.1	Deskripsi Analisis Situasi dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.....	60
4.1.2	Deskripsi Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan	

	Penurunan Stunting Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.....	94
4.1.3	Analisis Hasil Analisis Situasi dalam Percepatan <i>Penurunan Stunting</i> Kab. Deli Serdang Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.....	103
4.1.4	Analisis Hasil Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.....	112
4.2.	Pembahasan	121
4.2.1	Analisis Situasi dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.....	121
4.2.2	Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	125
4.2.3	Analisis Situasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	127
4.2.4	Manajemen Perencanaan Program Kegiatan <i>Stunting</i> Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	134
BAB V	SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	139
5.1	Simpulan	139
5.2	Implikasi	142
5.3	Saran	144
	DAFTAR PUSTAKA	146
	LAMPIRAN.....	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses penyusunan rencana	20
Gambar 2. 2 Tahapan Analisis Situasi	27
Gambar 2. 3 Tahapan perencanaan program kegiatan <i>stunting</i>	30
Gambar 2. 4 Kerangka intervensi gizi berdasarkan sasaran <i>stunting</i>	34
Gambar 2. 5 Keterlibatan multisektor dalam penurunan <i>stunting</i>	35
Gambar 2. 6 Kerangka berpikir penelitian.....	45
Gambar 2. 7 Kerangka alur pelaksanaan manajemen perencanaan program kegiatan <i>stunting</i>	46
Gambar 3. 1. Komponen dalam analisis data	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Tren Prevelensi <i>Stunting</i> Kab. Deli Serdang Tahun 2021 - 2023	3
Tabel 3. 1	Rencana waktu penelitian dan penyusunan tesis	50
Tabel 3. 2	Kisi-kisi wawancara penelitian.....	53
Tabel 4. 1	Tren data <i>stunting</i> Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 (E-PPGBM).....	57
Tabel 4. 2	Indikator cakupan layanan essensial (utama) dan layanan supply (pendukung).....	64
Tabel 4. 3	Hasil master analisis situasi (sebaran <i>stunting</i> dan cakupan layanan).....	70
Tabel 4. 4	Daftar calon lokasi desa prioritas intervensi <i>stunting</i> Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan tahun 2025.....	79
Tabel 4. 5	Hasil pemetaan program kegiatan <i>stunting</i> Kabupaten Deli Serdang tahun 2024	83
Tabel 4. 6	Hasil analisis ketersediaan program kegiatan <i>stunting</i>	86
Tabel 4. 7	Kendala/masalah dan rekomendasi perbaikan layanan.....	91
Tabel 4. 8	Perencanaan Program Kegiatan <i>Stunting</i> Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	97
Tabel 4. 9	Matriks Kendali Integrasi Program/Kegiatan Tahun Rencana Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	102
Tabel 4. 10	Capaian indikator Perpres 72 tahun 2021 Kabupaten Deli Serdang tahun 2024	128
Tabel 4. 11	Realisasi program kegiatan <i>stunting</i> Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 berdasarkan indikator Perpres 72 tahun 2021.....	135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara dan observasi	148
Lampiran 2 Surat persetujuan judul tesis & dosen pembimbing tesis.....	150
Lampiran 3 Surat permohonan izin riset / penelitian	151
Lampiran 4 Surat persetujuan izin riset Bappedalitbang Kab. Deli Serdang	152
Lampiran 5 Hasil pemeriksaan turnitin dari Perpustakaan UMSU	153
Lampiran 6 Dokumentasi kegiatan observasi, dokumentasi dan wawancara	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada anak usia di bawah lima tahun, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Perpres 72 2021). *Stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas hidup, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia sebagai dampak dari terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh dalam jangka panjang. Untuk itu pemerintah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu program prioritas nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan bahwa target penurunan *stunting* pada anak bawah usia 2 (dua) tahun adalah 14% pada tahun 2024.

Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus 2 (dua) standard deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Penyebab langsung dari masalah *stunting* berhubungan dengan 4 (empat) faktor yaitu akses terhadap pangan bergizi, praktek pemberian makanan bayi dan balita, akses terhadap pelayanan kesehatan serta akses terhadap kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Sedangkan penyebab tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi tata kelola pemerintahan, pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mencegah dan menangani permasalahan *stunting* dilakukan pendekatan multisektor melalui intervensi layanan spesifik dan sensitif yang terintegrasi dan dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Di Kawasan Asia Tenggara, prevalensi *stunting* di Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Negara Kamboja. Data menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* ditingkat nasional menurun sebesar 6,4% selama periode 5 tahun yaitu dari 37,2% (tahun 2013) menjadi 30,8% (tahun 2018). Kemudian pencapaian pemerintah berhasil menurunkan prevalensi *stunting* sebesar 9,3% dari 5 tahun percepatan penurunan *stunting* dari 30,8% (tahun 2018) menjadi 21,5% (tahun 2023). Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan *stunting* menjadi sebesar 14,4% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

Kemudian untuk percepatan penurunan *stunting* secara nasional, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mengatur dan memuat target nasional penurunan *stunting*, kelompok sasaran penurunan *stunting*, kelembagaan dan unsur mendukung penurunan *stunting* dan indikator kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting*.

Kementerian/lembaga yang mendukung percepatan penurunan *stunting* secara nasional, khususnya Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai peran khusus dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan konvergensi intervensi gizi prioritas bagi Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di lokasi-lokasi prioritas serta bimbingan dan pengawasan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan

percepatan penurunan *stunting* secara terpadu, maka dirancang dan dilaksanakan aksi konvergensi *stunting* untuk dilakukan oleh kabupaten/kota lokus *stunting* mulai tahun 2020. Berdasarkan surat penetapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 tahun 2021 menetapkan 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menjadi Lokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022.

Pelaksanaan aksi konvergensi *stunting* merupakan Instrument dalam bentuk kegiatan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Kementerian Dalam Negeri memberikan peningkatan kapasitas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dengan daerah dapat terkoordinasi dengan baik serta memastikan indikator kegiatan *stunting* termuat dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah setiap tahun. (PPN/Bappenas 2018)

Berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara angka prevelensi *stunting* sebesar 18,90% dan mengalami penurunan sebesar 2,20% dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 (21,10%), tetapi Kabupaten Deli Serdang salah satu kabupaten/kota yang mengalami kenaikan signifikan dari angka prevelensi *stunting* sebesar 13,90% (SSGI tahun 2022) mengalami kenaikan angka prevelensi *stunting* sebesar 33,80% (SKI tahun 2023) dan total kenaikan angka prevelensi *stunting*nya sebesar 19,90%. Hal ini menjadikan Kabupaten Deli Serdang menjadi kabupaten/kota angka prevelensi *stunting* tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. (Kemenkes RI 2022; RI 2023)

Berikut tren prevelensi *stunting* Kabupaten Deli Serdang berdasarkan hasil SSGI tahun 2021-2022 dan SKI tahun 2023 adalah:

Tabel 1. 1 Tren Prevelensi *Stunting* Kab. Deli Serdang Tahun 2021 - 2023

No	Tahun	SSGI (%)	Tren <i>Stunting</i>	Keterangan
1	2021	12,50	-	Peringkat 1 se-Sumatera Utara
2	2022	13,90	Peningkatan 1,40%	Peringkat 3 se-Sumatera Utara
3	2023	33,80	Peningkatan 19,90%	Peringkat 33 se-Sumatera Utara

(Sumber: (Kemenkes RI 2022; RI 2021, 2023))

Kenaikan dan tingginya angka prevelensi *stunting* di daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya: kurangnya akses terhadap pangan bergizi, kurangnya akses pelayanan kesehatan, kurangnya akses pelayanan kesehatan lingkungan (air bersih dan sanitasi), kurangnya pengetahuan penyediaan gizi anak balita dan faktor tidak langsung lainnya. Kemudian tata kelola pemerintahan dalam penyediaan layanan kegiatan intervensi *stunting* juga menjadi penyebab tidak langsung naiknya angka prevelensi *stunting* di daerah karena tata kelola pemerintahan menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan layanan kegiatan *stunting* tersedia sampai kepada kelompok sasaran *stunting*. Berapa faktor kendala dan masalah tata kelola pemerintahan penyediaan layanan kegiatan *stunting*, diantaranya: kurang lengkap dan akuratnya data anak *stunting*, kurang tepatnya perencanaan program kegiatan untuk penentuan lokasi dan program prioritas kegiatan *stunting*, kurangnya dukungan program kegiatan dari anggaran APBD/APBN untuk kegiatan *stunting*, kurang terlibatnya semua multisektor untuk melakukan intervensi *stunting*, kurang optimalnya kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah dalam mengawal intervensi *stunting*, kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan kader kesehatan masyarakat, kegiatan promosi dan kampanye *stunting* yang masih kurang masif serta kurang pedulinya masyarakat dalam penyediaan gizi anak balita dan kesehatan keluarga. Multifaktor penyebab *stunting* ini membutuhkan intervensi yang harus dilakukan

terhadap kelompok sasaran, lokasi prioritas dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai indikator kegiatan di Perpres 72 tahun 2021 dan ini membutuhkan analisa situasi dan perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat serta sesuai dukungan anggaran yang tersedia di kabupaten/kota. (Mastina and Mitra 2023)

Dalam penelitian ini tidak akan membahas dan meneliti teknis terkait kesehatan dan gizi masyarakat yang mengalami *stunting* tetapi peneliti hanya berfokus pada manajemen perencanaan program kegiatan *stunting* yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, mempertimbangkan hasil kenaikan angka prevelensi *stunting* tahun 2023 (SKI 2023). Peneliti akan mengidentifikasi dan analisis tentang strategi analisis situasi dan perencanaan program kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 apakah dapat menyediakan semua program kegiatan intervensi *stunting* yang dibutuhkan kelompok sasaran *stunting*, keluarga dan masyarakat untuk menurunkan angka prevelensi *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Meningkatnya angka prevelensi *stunting* salah satu faktornya adalah kurang optimalnya tata kelola pemerintahan dalam penyediaan program kegiatan *stunting* agar dilaksanakan intervensi kegiatan kepada kelompok sasaran *stunting*, keluarga dan masyarakat. Berapa kendala dan masalah tata kelola pemerintahan antara lain :

1. Kurang tepatnya perencanaan program kegiatan untuk penentuan lokasi prioritas dan program prioritas kegiatan *stunting*.
2. Kurangnya dukungan program kegiatan dari anggaran APBN, APBD dan Dana Desa untuk kegiatan *stunting*.

3. Kurang terlibatnya semua multisektor (pemerintah, lembaga profesi, swasta, LSM, masyarakat) untuk melakukan intervensi *stunting*.
4. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan kader masyarakat.
5. Kurangnya kampanye dan sosialisasi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat.

Berdasarkan kendala dan masalah tata kelola pemerintahan dalam penyediaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting*, Sehingga pada penelitian ini ruang lingkup yang akan dilakukan adalah manajemen perencanaan program kegiatan *stunting*, diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis situasi adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting* dan kondisi capaian program kegiatan *stunting* tahun sebelumnya dalam wilayah kabupaten/kota yaitu sebaran balita *stunting*, sebaran keluarga berisiko *stunting*, situasi ketersediaan program, kesenjangan program kegiatan dan pelaksanaan manajemen layanan kegiatan.
2. Manajemen perencanaan program kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi, dimana rencana ini berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi kegiatan dan meningkatkan integrasi intervensi kegiatan oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
3. Percepatan penurunan *stunting* adalah upaya kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan angka balita *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024, dimana upaya ini dilakukan melalui kerjasama multisektor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah landasan hukum dalam percepatan penurunan *stunting* yang mengatur dan memuat target nasional penurunan *stunting*, kelompok sasaran penurunan *stunting*, kelembagaan dan unsur mendukung penurunan *stunting* dan indikator kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dibatasi sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis situasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 ?
2. Bagaimana manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 ?
3. Apakah analisis situasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021?
4. Apakah manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan analisis situasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.
2. Mendeskripsikan manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

3. Menganalisis hasil analisis situasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021.
4. Menganalisis hasil manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan penelitian maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan manajemen perencanaan program kegiatan percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 dalam penentuan lokasi sasaran prioritas dan perencanaan program kegiatan *stunting* pada tahun berikutnya.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang bermaksud mengkaji dan analisa masalah yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bagi peneliti akan memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan penelitian secara langsung dan pendampingan kepada OPD dan lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman terhadap manajemen program kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *Mismanagement*, artinya salah urus, salah kelola atau salah pengaturan. Menurut Robbin dan Coulter (2002), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan dan/atau melalui orang lain.

Menurut Mary Parker Follett di dalam buku Hani Handoko (1998) disebutkan bahwa *management is the art of getting thing done through people*. Artinya, manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang. Seni disini dimaksudkan sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang dan kelompok orang memainkan alat atau orang sehingga menghasilkan keindahan serta kemajuan. Terry (1982) mengartikan manajemen sebagai serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya. Sementara itu, Stoner (1996) menyebutkan bahwa manajemen ialah serangkaian proses dalam menetapkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pencapaian sesuatu tujuan.

Dari pengertian tersebut diatas, terdapat dua kata kunci, yaitu seni dan proses. Proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah sistematis untuk pencapaian tujuan.

Misalnya seseorang yang ingin masuk menjadi mahasiswa suatu perguruan tinggi, maka kepadanya diharuskan menjalani langkah-langkah tertentu sebagai persyaratan menjadi mahasiswa, misalnya membeli formulir pendaftaran terlebih dahulu, melaksanakan seleksi, membayar uang kuliah dan seterusnya, tidak bisa langsung membayar kuliah kemudian menjadi mahasiswa, sebab langkah pendaftaran dan seleksi belum dilakukan. Jadi langkah-langkah urutan yang harus dilakukan inilah yang disebut proses. Demikian halnya dengan langkah-langkah dalam manajemen, urutannya adalah melakukan perencanaan, kemudian pengorganisasian, selanjutnya pengarahan serta diakhiri dengan pengawasan. Di sisi lain, jika proses ini dijalankan dengan benar, maka dapat dikatakan sebagai seni. Berdasarkan uraian tersebut, manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu seni dan/atau proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Indayani 2018).

2.1.2 Tingkatan Dalam Manajemen

Setiap manusia dilahirkan dengan bakat, naluri, keterampilan, dan nasib yang berbeda. Tidak semua orang dilahirkan dan dibentuk menjadi seorang yang sukses atau manajer yang berhasil. Sebaliknya juga tidak semua orang akan mengalami kesulitan, kesusahan, kemiskinan, atau menjadi karyawan rendahan. Menjadi orang sukses atau gagal adalah tergantung pada orang itu sendiri untuk mau dan mampu merubah kehidupannya. Umumnya orang yang kreatif, inovatif relatif akan berhasil dalam karirnya, dan sebaliknya orang yang malas, sering menyerah dengan kesulitan, maka akan gagal dalam meniti karirnya. Demikian juga dalam organisasi perusahaan, tidak semua orang akan menduduki posisi puncak, melainkan hanya satu orang yang akan mengendalikan jalannya perusahaan yang disebut sebagai Presiden direktur misalnya. Di tingkatan bawahnya ada para direktur dan manajer yang membantu top manajemen tersebut. (Indayani 2018)

Manajemen atau manajer dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan berikut:

1. *Top Management*

Top management atau manajemen puncak dapat didefinisikan sebagai seorang atau kelompok orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap maju mundurnya perusahaan. Tugas utamanya adalah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum. Misalnya menyusun kebijakan ekspansi produk ataupun pasar, kebijakan mengenai kesejahteraan karyawan, dan lain-lain.

2. *Middle Management*

Middle management atau sering disebut manajemen tingkat menengah merupakan seorang atau sekelompok orang yang bertugas menjalankan kebijakan yang dibuat oleh *top management*. Tugas utamanya antara lain mengawasi unit-unit kerja dan mengimplementasikan rencana untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh manajemen tingkat atas. Contoh jabatan para manajer tingkat menengah ini adalah para manajer fungsional, misalnya manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, atau manajer sumber daya manusia.

3. *Lower Management*

Lower management atau manajemen tingkat bawah adalah mereka yang bertanggung jawab atas suatu unit kerja dan penyelesaian berbagai pekerjaan jangka pendek yang telah direncanakan oleh manajemen di tingkat menengah ataupun di tingkat puncak. Contoh manajer level bawah ini adalah supervisor, mandor, kepala divisi dan lain sebagainya. (Indayani 2018)

2.2 Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep

mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. (Nasional, Departemen Pendidikan, 2005:1902). Strategi adalah pedekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Henry Mintzberg (1998) pengertian strategi terbagi atas lima definisi, yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi, strategi sebagai taktik dan terakhir strategi sebagai perspektif.

Menurut Siagian (2004) memberikan definisi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Siagian lebih cenderung mengemukakan pendapatnya tentang bisnis.

Stephanie K. Marrus menjelaskan bahwa strategi ialah merupakan suatu proses yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan Craig & Grant (1996) yang mengartikan, pengertian strategi sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Menurut Jauch dan Gluek (2003:12) strategi adalah sarana yang digunakan untuk tujuan akhir (sasaran). Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi ialah rencana yang disatukan, strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu terpadu, semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.

Menurut Effendy (2007:32), mengatakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Menurut Chandler dalam buku Analisis Swot (2003:3) menjelaskan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Learned, Christensen, Andrews dan Guth dalam buku Analisis Swot (2003:3) memaparkan bahwa strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.

Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner dalam buku Analisis Swot (2003:4) menjelaskan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi. Porter dalam buku Analisis Swot (2003:4) memberikan pengertian tentang strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan.

Andrews, Chaffe dalam buku Analisis Swot (2003:4) menjelaskan bahwa strategi ialah kekuatan motivasi untuk stakeholder, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Hamel dan Prahalad dalam buku Analisis Swot (2003:4) memberikan definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian,

perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi,” bukan dimulai dari “apa yang terjadi.” Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen.

2.2.2 Tahapan-Tahapan Strategi

Dalam proses penerapan strategi menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

1. Perumusan strategi

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi yaitu dengan cara merumuskan strategi atau menyusun langkah awal. Sudah termasuk didalamnya untuk pembangunan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan kelebihan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, mengasikkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

2. Implementasi strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Tanpa adanya komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan strategi, maka proses formulasi dan analisis strategi hanya akan menjadi impian yang sangat jauh dari kenyataan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya, perusahaan dan organisasi.

3. Evaluasi strategi

Tahap akhir dari strategi adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi strategi

diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan dicapai.

2.3 Dasar-Dasar Perencanaan

2.3.1 Pengertian Perencanaan

Berbagai literatur manajemen, fungsi perencanaan senantiasa ditempatkan sebagai fungsi manajemen yang pertama. Hal ini mengandung arti bahwa setiap tindakan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang didasarkan kepada rencana yang dibuat sebelumnya. Setelah perencanaan dilakukan, maka fungsi-fungsi manajemen yang lain akan menyertai atau bahkan melekat sebagai suatu sistem manajemen keseluruhan.

Perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan tujuan dan menentukan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Agar bisa mencapai tujuan yang dikehendaki, organisasi perlu meningkatkan kualitas penerapan fungsi manajemennya. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan berperan penting karena akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen lainnya hanya akan menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam fungsi perencanaan itu sendiri. (Indayani 2018)

2.3.2 Manfaat Perencanaan

Kegunaan atau manfaat dibuatnya perencanaan, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Menciptakan arah (fokus) dan tujuan perusahaan
2. Menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian

3. Perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur
4. Menjadi alat pengawasan
5. Merangsang prestasi.

Namun demikian, perencanaan mempunyai kelemahan atau keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan biasanya memerlukan biaya yang besar
2. Perencanaan terkadang menghambat kreativitas
3. Perencanaan membutuhkan waktu yang lama
4. Perencanaan terkadang mempunyai nilai praktis yang terbatas.

Salah satu metode yang digunakan oleh organisasi untuk menghubungkan tujuan organisasional dengan perencanaannya yaitu *Management By Objective (MBO)*, yakni suatu metode formal ataupun semiformal yang diawali oleh suatu penetapan tujuan, pelaksanaan dan diakhiri oleh suatu pengevaluasian. Metode ini ditujukan untuk mendorong bawahan agar dapat lebih berpartisipasi serta untuk memperjelas tujuan dan mengkomunikasikan tujuan serta hasil yang diharapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan MBO adalah partisipasi dan komunikasi. MBO ini dapat juga digunakan oleh organisasi bisnis maupun non bisnis. (Indayani 2018)

2.3.3 Jenis Perencanaan

Pengklasifikasian perencanaan dapat dilakukan dengan berdasarkan jangka waktu, subjek, ruang lingkup, dan unit organisasi. Dilihat dari segi waktunya, perencanaan dapat digolongkan menjadi rencana jangka pendek (< 1 tahun), jangka menengah ($1 - 2$ tahun) dan jangka panjang (≥ 3 tahun). Dilihat dari subjeknya, rencana terdiri dari rencana produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia. Dilihat dari ruang lingkupnya, rencana dibagi menjadi rencana strategis dan operasional. Adapun jika dilihat dari dari

unit organisasi, maka rencana dibagi menjadi rencana perusahaan, divisi, departemen, dan proyek.

1. Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Pengelompokan perencanaan jangka panjang pendek ini didasarkan pada jangka waktu penggunaannya. Keduanya merujuk ke upaya penyelesaian berbagai masalah di masa mendatang. Perencanaan jangka pendek mempunyai jangka waktu satu tahun ataupun kurang daripada itu dan cenderung bersifat operasional. Sementara itu, perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu lima tahun ataupun lebih daripada itu dan cenderung bersifat strategis. Penggolongan perencanaan ke dalam jangka pendek dan jangka panjang itu cukup sulit untuk dilakukan karena ada perbedaan jangka waktu antar-organisasi. Faktor penentu lainnya ialah adanya perubahan dari jangka pendek ke jangka panjang seiring dengan berjalannya waktu.

2. Perencanaan Strategis dan Operasional

Perencanaan strategis ialah suatu perencanaan berjangka panjang dalam upaya mencapai suatu tujuan strategis. Fokus utamanya ialah keseluruhan organisasi. Secara umum, rencana strategis mencakup pengalokasian sumber daya serta penyusunan prioritas dan cara dalam pencapaian tujuan strategis. Tujuan strategis itu sendiri biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak, misalnya mengenai tujuan umum organisasi. Ruang lingkup dari perencanaan operasional cenderung lebih sempit daripada perencanaan strategis. Perencanaan operasional itu sendiri ialah pendefinisian berbagai hal yang perlu dijalankan untuk mengimplementasikan suatu rencana strategis dan mencapai suatu tujuan strategis. Jenis perencanaan operasional mencakup perencanaan produksi, fasilitas dan pemasaran.

3. Perencanaan Tetap dan Sekali Pakai

Perencanaan tetap (*standing plans*) ialah suatu perencanaan yang disusun bagi suatu

kegiatan rutin yang berulang-ulang. Perencanaan ini dituangkan dalam kebijakan, aturan dan prosedur.

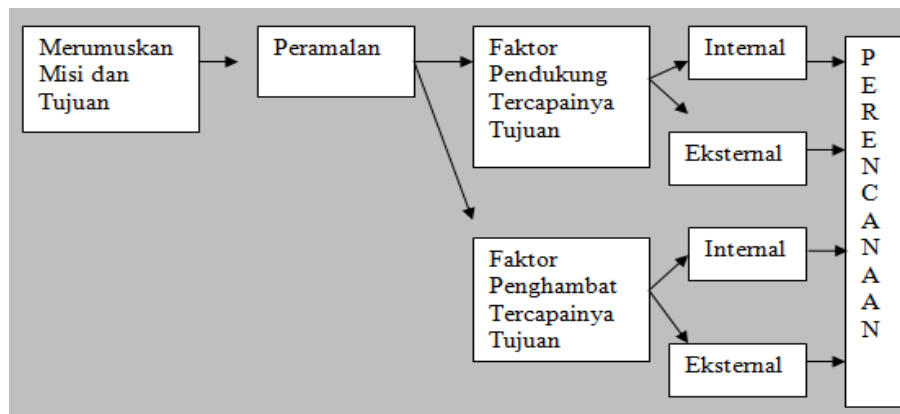
- a. Kebijakan, yakni suatu pedoman pengambilan keputusan yang mengarahkan cara berpikir untuk pengambilan, dan bukan pada tindakan yang lebih spesifik. Misalnya dalam masalah sumber daya manusia kebijakan meliputi kontrak karyawan, pemecatan karyawan, dan pemberhentian sementara.
- b. Prosedur. Dibandingkan dengan kebijakan, prosedur sifatnya lebih spesifik dan merupakan pedoman yang mengarah pada tindakan yang diperlukan. Dalam penarikan tenaga kerja baru, biasanya telah tersusun langkah-langkah secara kronologis.
- c. Aturan, yakni penetapan tindakan yang perlu, boleh, ataupun tidak boleh dilakukan dalam suatu kondisi tertentu. Terkadang, peraturan merupakan bagian dari suatu prosedur.

Perencanaan sekali pakai ialah perencanaan yang hanya sesekali dipergunakan dan secara khusus didesain bagi pemenuhan berbagai kebutuhan di kondisi yang unik sebagai respon atas berbagai keputusan tidak terprogram. Contoh perencanaan ini bisa diobservasi dari perusahaan yang hendak memperluas usahanya (Indayani 2018).

2.3.4 Proses Penyusunan Perencanaan

Sebagai salah satu tahapan dalam serangkaian proses, perencanaan merupakan suatu cara sistematis yang disusun untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Perencanaan mengandung berbagai kegiatan yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan mencakup sekelompok kegiatan manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil suatu keputusan di saat ini yang memungkinkannya untuk mendahului dan menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. (Indayani 2018).

Suatu proses perencanaan digambarkan dalam skema berikut:



(Sumber: Pengantar Manajemen, 2019)

Gambar 2. 1 Proses penyusunan rencana

1. Merumuskan Misi dan Tujuan

Misi organisasi yang terdefinisikan secara jelas akan membantu manajer dalam menetapkan dan menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pernyataan misi hendaknya mampu mengidentifikasi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi, termasuk pelanggan yang dilayaninya, produk yang ditawarkan, pelayanan yang disediakan, dan lokasi tempat organisasi tersebut beroperasi. Hendaknya misi juga mencantumkan filosofi mendasar yang dapat mengarahkan kerja karyawan.

Penetapan tujuan seringkali disulitkan oleh banyaknya alternatif tujuan yang sama-sama menguntungkan. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan berbagai hal, seperti sumber daya manusia yang ada serta kapasitas dan kemampuan dari sumber daya ekonominya.

2. Memahami Kondisi Saat ini

Tujuan ditetapkan untuk mengantisipasi situasi mendatang dengan berbagai standar yang dikehendaki. Agar bisa memahami situasi mendatang, keadaan saat ini perlu diperjelas, serta perlu diadakan penelitian dan pengumpulan berbagai data relevan, untuk kemudian dikaji secara mendalam terkait relevansi fungsi organisasi dan tujuan,

sehingga bisa diproyeksikan prospeknya di masa mendatang.

3. Mempertimbangkan Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Tujuan

Berbagai faktor pendukung dan penghambat dari usaha pencapaian tujuan perlu diinventarisasi sedini mungkin agar berbagai persiapan pengantisipasi bisa dilakukan. Di satu sisi, perusahaan bisa dimudahkan oleh berbagai faktor pendukung dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada. Di sisi lainnya, perusahaan perlu mengantisipasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin timbul serta menyiapkan berbagai cara penyelesaiannya.

4. Menyusun Rencana Pencapaian Tujuan

Tujuan bisa dicapai dengan cara berikut ini:

- a. Mengembangkan alternatif kebijakan ataupun tindakan.
- b. Menilai dan membandingkan keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif kegiatan ataupun kebijakan.
- c. Memilih dan menetapkan alternatif yang dinilai paling tepat.

2.3.5 Pendekatan dalam Perencanaan

Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam menyusun perencanaan, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Perencanaan *Inside-Out* dan *Outside-In*

Perencanaan *inside-out* ialah perencanaan yang berfokus ke hal yang sudah dilakukan, tetapi dengan terus berupaya untuk melakukan hal terbaik. Tujuannya ialah meningkatkan efektivitas organisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Di lain sisi, perencanaan *outside-in* berupaya menganalisis lingkungan eksternal dan menyusun rencana pengeksplorasi peluang dan minimalisasi masalah.

2. Pendekatan Perencanaan *Top-Down* dan *Bottom-Up*

Pada perencanaan *top-down*, *top manager* akan menentukan tujuan secara luas dan mendelegasikan manajer tingkat bawah untuk menyusun rencana dengan batasan tersebut. Sementara itu, perencanaan *bottom-up* mulai mengembangkan rencana dari tingkat bawah, dengan tanpa adanya pembatasan, secara teratur ke tingkat manajemen puncak. Kombinasi dua pendekatan tersebut akan menghasilkan perencanaan yang efektif.

3. Pendekatan Perencanaan Situasional (*Contingency Planning*)

Perencanaan *contingency* mencakup perencanaan alternatif yang menimbulkan pengimplementasian yang pada saat perencanaan awal menjadi tidak sesuai karena adanya perubahan kondisi. Fokus utamanya ialah menentukan sedini mungkin berbagai perubahan yang mungkin terjadi di peristiwa mendatang yang bisa berdampak bagi pelaksanaan perencanaan. Pendekatan ini berupaya untuk senantiasa melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam hal ini, perencanaan yang efektif ialah perencanaan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi organisasi.

2.4 Analisis Situasi

2.4.1 Pengertian Analisis Situasi

Analisis Situasi program pencegahan dan penurunan *stunting* adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting* dan kondisi capaian program kegiatan *stunting* tahun sebelumnya dalam wilayah kabupaten/kota yaitu sebaran balita *stunting*, sebaran keluarga berisiko *stunting*, situasi ketersediaan program, kesenjangan program kegiatan dan pelaksanaan manajemen layanan kegiatan. Analisis Situasi dilakukan untuk mengenali permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada kelompok sasaran. Hasil Analisis Situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi

kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi kelompok sasaran.

Analisis ketersediaan program dan manajemen layanan dilakukan untuk mengidentifikasi program/kegiatan pokok seperti Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program perbaikan gizi masyarakat termasuk kegiatan perubahan perilaku, program air minum dan sanitasi, perlindungan sosial, serta seluruh program-program bagi setiap sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota termasuk DAK, APBDes termasuk Dana Desa. (Dirjen Bangda 2022)

2.4.2 Tujuan Analisis Situasi

Analisis Situasi bertujuan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses 5 (lima) kelompok sasaran terhadap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Analisis Situasi diharapkan dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan strategis dalam hal :

1. Memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola kabupaten/kota bagi peningkatan cakupan layanan intervensi gizi terintegrasi
2. Memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses 5 (lima) kelompok sasaran terhadap intervensi gizi terintegrasi
3. Meningkatkan efektivitas sistem manajemen data dalam membuat usulan keputusan alokasi program dan lokasi prioritas *stunting*
4. Menentukan kegiatan penguatan dan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam meningkatkan integrasi layanan

2.4.3 Hasil Analisis Situasi

Hasil yang diharapkan dari Analisis Situasi meliputi, antara lain :

1. Rekomendasi desa/kelurahan prioritas percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada setiap tahunnya
2. Rekomendasi tindakan perbaikan layanan yang perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya dan diprioritaskan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan desa
3. Rekomendasi peningkatan ketersediaan, kualitas serta aksesibilitas data *stunting* dan cakupan layanan dari lintas OPD terkait
4. Rekomendasi kebutuhan penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam sinkronisasi program/kegiatan maupun koordinasi antara kabupaten/kota dan desa/kelurahan dengan dukungan kecamatan

2.4.4 Ruang Lingkup Kegiatan

1. Analisis sebaran prevalensi *stunting* dan keluarga berisiko *stunting* dalam wilayah kabupaten/kota
2. Analisis kesenjangan cakupan layanan intervensi prioritas yang berhubungan dengan prevalensi *stunting* dan keluarga berisiko *stunting*
3. Analisis ketersediaan program/kegiatan dan pembiayaan intervensi gizi spesifik dan sensitif di wilayah kabupaten/kota berbasis indikator yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
4. Analisis permasalahan dalam menentukan target layanan kepada 5 (lima) kelompok sasaran, termasuk permasalahan perilaku
5. Analisis tantangan akses 5 (lima) kelompok sasaran dalam memanfaatkan layanan
6. Analisis kondisi koordinasi antar Lembaga dalam meningkatkan integrasi intervensi

2.4.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab pelaksanaan Analisis Situasi adalah Bappeda. Dalam pelaksanaannya, Bappeda melibatkan OPD-OPD (termasuk kecamatan) yang bertanggung jawab dalam kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif di bawah koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan Analisis Situasi, Tim juga dapat melibatkan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan. Data sasaran dalam Analisis Situasi dikendalikan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta data cakupan layanan dilengkapi oleh beberapa OPD terkait sesuai urusan masing-masing.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Analisis Situasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi melaksanakan Analisis Situasi dengan melakukan :

1. Konsolidasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum bulan Januari untuk persiapan pelaksanaan Analisis Situasi.
2. Identifikasi dan reviu data sasaran dan layanan intervensi spesifik dan sensitif di setiap kabupaten/kota.
3. Identifikasi dan reviu daftar desa/kelurahan prioritas percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

2.4.6 Jadwal Kegiatan

Analisis Situasi dilakukan pada awal tahun berjalan agar hasilnya dapat menjadi bahan persiapan perencanaan dan penganggaran daerah, terutama sebagai masukan atas rencana kerja OPD. Bahan data Analisis Situasi berbasis data *stunting* dan capaian program intervensi spesifik dan sensitif tahun sebelumnya yang dapat digali sebelum bulan Januari.

Untuk itu maka tahapan persiapan dan perencanaan Analisis Situasi dapat

dilakukan sebelum bulan Januari, dengan mengidentifikasi data sasaran dan cakupan layanan yang termuat dalam Form Master Analisis Situasi. Pendalaman atas hasil Analisis Situasi dilakukan hingga bulan Februari melalui beberapa pertemuan yang melibatkan lintas sektor. Rumusan atas hasil Analisis Situasi dan penetapan desa/kelurahan prioritas *stunting* selambat-lambatnya pada bulan Maret agar selaras dan menjadi bahan masukan dalam proses perencanaan di tingkat pusat dan desa.

2.4.7 Tahapan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan Analisis Situasi sebagaimana diuraikan dalam tahapan pelaksanaan Analisis Situasi terdiri dari :

1. **Tahap 1:** Penyusunan Rencana Analisis Situasi
2. **Tahap 2:** Reviu Hasil Analisis Sebelumnya yang Relevan
3. **Tahap 3:** Pelaksanaan Analisis Situasi

Seluruh rangkaian kegiatan Analisis Situasi meliputi analisis terhadap :

1. Sebaran kasus dan prevalensi *stunting* pada setiap sasaran prioritas maupun keluarga berisiko *stunting* untuk memetakan isu-isu utama permasalahan *stunting* di tingkat lokal (desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan) sebagai salah satu pertimbangan penetapan program/kegiatan prioritas dan penetapan lokasi-lokasi prioritas
2. Ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan, terutama pada dukungan anggaran daerah dan desa serta ketersediaan sumber daya di tingkat lokal. Kesenjangan atas kondisi *stunting*, ketersediaan sumber daya dan dukungan anggaran menjadi bagian dari proses reviu atas hasil analisis sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku peduli lainnya
3. Pendalaman atas peta permasalahan *stunting* di daerah serta perumusan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan kebijakan dan

pengalokasian anggaran serta peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan intervensi spesifik dan sensitif pada setiap prioritas maupun keluarga berisiko *stunting*. Peningkatan koordinasi dan pembagian peran lintas sektor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekomendasi tersebut.

Tahapan pelaksanaan Analisis Situasi disusun untuk menjawab kebutuhan alur pendalaman analisis yang diuraikan dalam gambar di bawah ini :



(Sumber: Juknis Aksi Konvergensi *Stunting*, 2022)

Gambar 2. 2 Tahapan Analisis Situasi

2.5 Manajemen Perencanaan Program Kegiatan *Stunting*

2.5.1 Definisi Penyusunan Rencana Program Kegiatan *Stunting*

Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi, dimana rencana ini berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi kegiatan dan meningkatkan integrasi intervensi kegiatan oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah

daerah kabupaten/kota selanjutnya mengintegrasikan hasil Rencana Kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah. (Dirjen Bangda 2022)

2.5.2 Tujuan Penyusunan Rencana Program Kegiatan *Stunting*

Penyusunan Rencana Kegiatan bertujuan untuk :

1. Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Analisis Situasi ke dalam :
 - a. Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi bagi 5 (lima) sasaran intervensi penurunan *stunting*
 - b. Kegiatan OPD untuk meningkatkan intervensi gizi terintegrasi, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan/satu tahun mendatang, baik yang memerlukan atau tidak memerlukan anggaran
2. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota dan OPD (khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD)
3. Mengidentifikasi dukungan anggaran daerah dan desa bagi desa/kelurahan prioritas penurunan *stunting* yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah

2.5.3 Hasil Yang Diharapkan

Melalui penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan dapat teridentifikasi rencana program/kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan tahun rencana, termasuk perbandingan dengan hasil Rencana Kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Hasil Rencana Kegiatan ini sekaligus melengkapi data Analisis Situasi sebagai bahan kegiatan Rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten/kota.

Dengan ditetapkan Perpres 72/2021 yang secara rinci menguraikan indikator-indikator strategis untuk percepatan penurunan *stunting*, maka dapat menjadi acuan daerah

dan desa dalam menyusun program/kegiatan yang diprioritaskan untuk penurunan *stunting*. Selain itu, kode nomenklatur program/kegiatan yang relevan terhadap seluruh indikator dimaksud disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan perencanaan dan evaluasi dukungan anggaran.

2.5.4 Penanggung Jawab Kegiatan

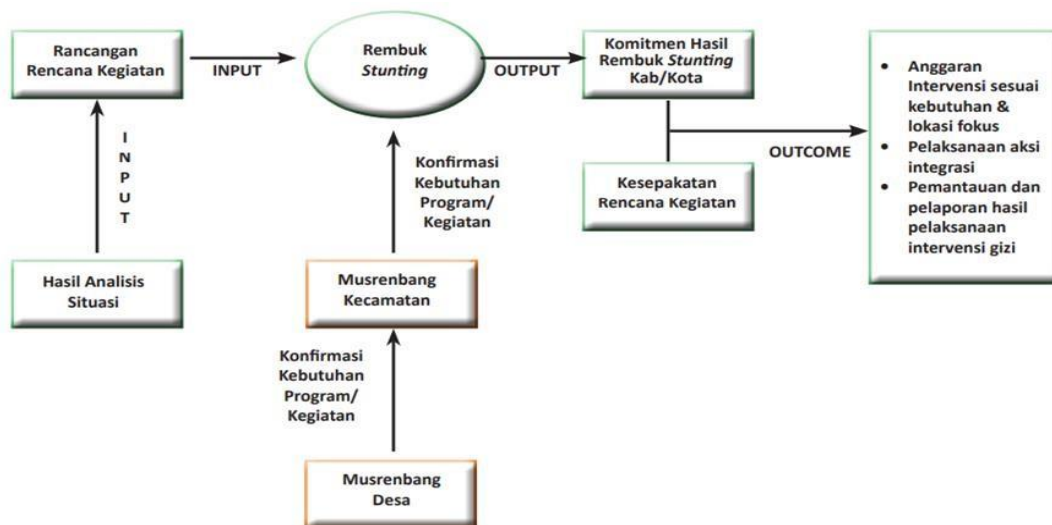
Mengingat pentingnya penyusunan Rencana Kegiatan ini sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota pada tahun berjalan dan/atau satu tahun anggaran berikutnya, maka tim penyusun harus berasal dari berbagai OPD terkait dan dikoordinir oleh Bappeda. Tim penyusun juga dapat berupa tim yang sama dengan Tim Teknis Analisis Situasi atau beberapa anggotanya berasal dari Tim Teknis Analisis Situasi. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) mengendalikan peran aktif OPD lintas sektor untuk mengawal setiap tahapan Rencana Kegiatan melalui dokumen perencanaan tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Kegiatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi berperan dalam mengidentifikasi keberpihakan kab/kota terhadap integrasi program/kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan daerah melalui rekapitulasi form 2.3 dan 2.4, serta melakukan analisis tren peningkatan dukungan anggaran tersebut setiap tahun. Selain itu, pemerintah daerah provinsi melaksanakan tahapan Rencana Kegiatan dengan melakukan pemetaan dukungan anggaran daerah tingkat provinsi dalam dokumen perencanaan daerah tahun berjalan dan satu tahun rencana.

2.5.5 Jadwal Kegiatan

Penyusunan Rencana Kegiatan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah sejak penyusunan usulan rencana kerja OPD hingga ditetapkan APBD tahun rencana.

2.5.6 Tahapan Kegiatan



(Sumber: Juknis Aksi Konvergensi *Stunting*, 2022)

Gambar 2. 3 Tahapan perencanaan program kegiatan *stunting*

Penyusunan Rencana Kegiatan meliputi tahapan sebagai berikut :

1. **Tahap 1** : Penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan
2. **Tahap 2** : Konsultasi Rancangan Rencana Kegiatan dengan DPRD
3. **Tahap 3** : Publikasi Rancangan Rencana Kegiatan pada Rembuk *Stunting* Kabupaten/Kota
4. **Tahap 4** : Finalisasi Rancangan Rencana Kegiatan
5. **Tahap 5** : Integrasi Rencana Kegiatan ke dalam RKPD, Renja OPD, KUA PPAS, dan RKA OPD

2.6 Percepatan Penurunan *Stunting*

2.6.1 Regulasi Percepatan Penurunan *Stunting*

Dalam mewujudkan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dengan target pencapaian sebesar 14% pada tahun 2024, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, sebagai regulator, dan sebagai pelaksana. Sebagai pengarah pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Sebagai regulator, pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat, sedangkan sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Regulasi atau Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dalam bertindak, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Untuk itu, peraturan perundang-undangan selayaknya dirumuskan dengan jelas, tegas, sinkron, dan konsisten sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga sebaiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berlaku efektif dan efisien serta memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas, hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan dan mematuhi sehingga dapat dilakukan simplifikasi terhadap peraturan yang telah ada. Hanya dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas, maka kepastian hukum dapat terwujud sehingga

mampu membangun keteraturan hukum yang kondusif bagi pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Kerangka regulasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* diarahkan untuk menjamin terwujudnya pencapaian target/sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Secara umum, sudah terdapat dukungan regulasi yang berdampak pada pencegahan dan penurunan angka *Stunting* serta dapat memperkuat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: a). bayi dan balita; b). remaja perempuan; dan c). ibu hamil dan menyusui.

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman,

tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

4. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Indonesia

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* diperlukan regulasi dan kebijakan yang sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, agar pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. (Pelatihan Penelitian BKKBN 2021)

2.6.2 Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan *stunting* secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi terintegrasi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko *stunting*. (Tampubolon 2010)

1. Pendekatan Intervensi Gizi Terintegrasi

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak

serta penurunan faktor risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitive adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian *stunting*. Intervensi ini mencakup utamanya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia. Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada masa inkubasi terjadinya kasus *stunting*, dengan melakukan refokusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka diharapkan kejadian kasus *stunting* dapat di cegah secara dini dan simultan.



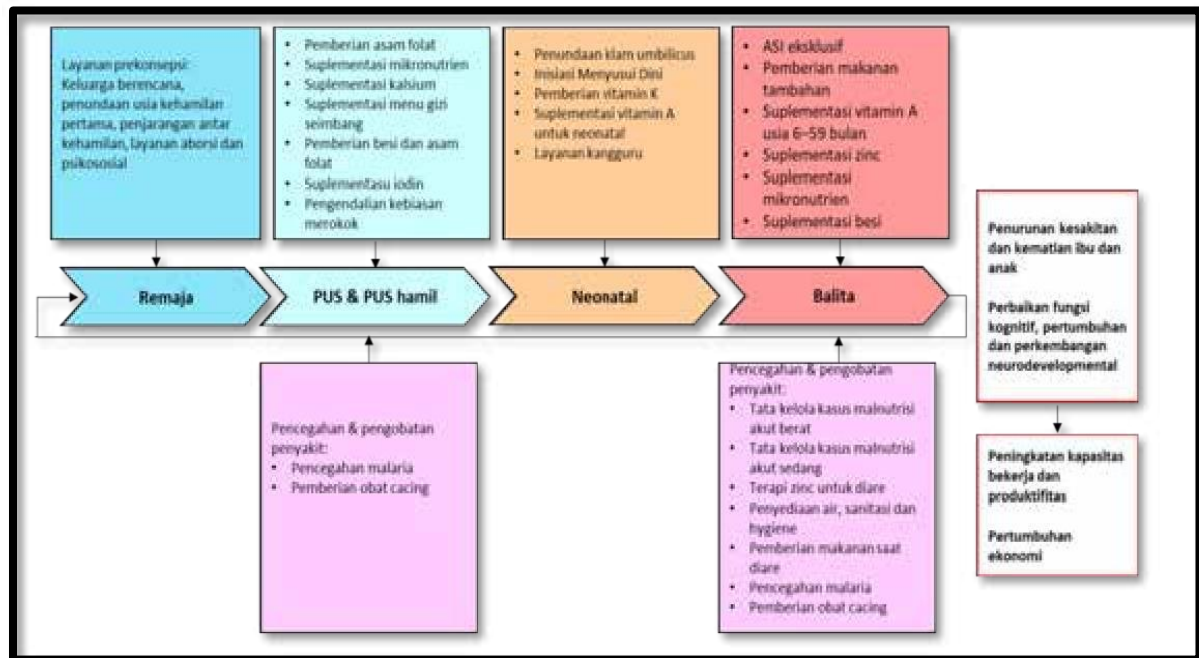
(Sumber: Buku kebijakan dan strategi PPS, 2021)

Gambar 2. 4 Kerangka intervensi gizi berdasarkan sasaran *stunting*

2. Pendekatan Multisektor dan Multipihak

Melihat kebutuhan dalam mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka kolaborasi dalam kerangka

pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sedikitnya melibatkan beberapa kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa serta pihak swasta yang peduli *stunting*.



(Sumber: Buku kebijakan dan strategi PPS, 2021)

Gambar 2. 5 Keterlibatan multisektor dalam penurunan *stunting*

Koordinasi dan kolaborasi pada level kementerian dan lembaga juga harus diikuti dengan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko *stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan

stunting baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko

Pelaksanaan RAN-PASTI memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat sisa waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan target prevalensi *stunting* yang harus dicapai 14% pada tahun 2024, maka diperlukan sebuah inovasi pendekatan yang dapat menjembatani langsung pada kelompok sasaran, pada faktor dominan dan memiliki daya ungkit yang tinggi serta berkontribusi nyata terhadap keberhasilan percepatan penurunan *stunting* sebagai sebuah penguatan terhadap pendekatan gizi terintegrasi, multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan *stunting*. Pendekatan berbasis keluarga berisiko *stunting* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak *stunting*. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko *stunting* diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan *stunting* memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, 2) pendampingan keluarga berisiko *stunting*, 3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), 4) surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan 5) audit kasus *stunting*. Dengan melakukan sedikitnya 5 skema pendekatan berbasis keluarga risiko, diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan *stunting*. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia (RAN-PASTI) dilaksanakan melalui tahapan yang sistemik dan sistematis, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, penyediaan data/penapisan, pendampingan, surveilans, audit kasus serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan

penurunan *stunting* sebagai rangkaian kegiatan bertahap yang utuh dan menyeluruh. Sebagai sebuah sistem, maka setiap tahapan intervensi saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Begitu juga sebagai sebuah tahapan yang sistematis, setiap tahapan harus dilakukan secara berurutan mulai dari penyediaan data, penapisan, pendampingan, surveilan dan audit kasus.

2.7 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan *stunting*, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini merupakan landasan hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengatasi masalah *stunting* di Indonesia. *Stunting* adalah salah satu indikator gizi buruk yang terjadi pada balita, yang ditandai dengan tingginya prevalensi status gizi kurang (*underweight*) dan pendek (*short stature*). *Stunting* dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, termasuk masalah perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja di masa depan.

Perpres No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* memiliki tujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Untuk mewujudkan percepatan penurunan persentase kasus *stunting* di Indonesia, pemerintah membuat rencana strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang mana rencana tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu untuk menurunkan pravalensi *stunting* di Indonesia, meningkatkan kualitas persiapan kehidupan dalam berkeluarga pada masyarakat, menjamin pemenuhan asupan gizi anak, memperbaiki pola asuh orang tua kepada anak, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum, air bersih dan juga sanitasi di masyarakat.

Target pravalensi *stunting* secara nasional berdasarkan pada pasal 5 Perpres No.72 tahun 2021 yaitu sebesar 14% pada tahun 2024 mendatang. yang mana target tersebut nantinya dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian. Program percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan dengan kelompok masyarakat yang menjadi objek sasaran program ini yaitu kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan perkembangan kasus *stunting* yang mana meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan.

Dalam Perpres No.72 tahun 2021 juga disebutkan 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yaitu: pertama, adanya peningkatan baik komitmen

maupun visi pimpinan di kementrian maupun lembaga baik di tingkat pemerintah daerah, kota/kabupaten maupun pemerintah desa. kedua, adanya peningkatan pertukaran informasi serta komunikasi terkait perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. ketiga, adanya peningkatan konvergensi intervensi secara spesifik dan intervensi sensitif. keempat, adanya peningkatan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi baik secara individu, keluarga maupun masyarakat umum. kelima, adanya penguatan dan pengembangan sistem data, inovasi, riset dan informasi.

Rencana program aksi nasional untuk menurunkan kasus *stunting* ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yang bersinergi. mulai kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota hingga Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program aksi percepatan penurunan *stunting*. Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa program-program aksi percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan sebagaimana mestinya diperlukan koordinasi dan pemantauan serta evaluasi dalam setiap proses pelaksanaannya.

Koordinasi penyelenggaraan program aksi percepatan penurunan *stunting* di tingkat pusat yaitu dengan membentuk tim percepatan penurunan *stunting*. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ini bertugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah.

Penyelenggaraan program percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dimulai dengan gubernur dan bupati/walikota menetapkan dan membentuk tim percepatan penurunan *stunting* untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi dan kabupaten/kota ini bertugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program percepatan penurunan *stunting* diselenggarakan secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor. Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* dilakukan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud didukung dengan :

1. Sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

2.8 Kajian Penelitian Terdahulu dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Dalam penulisan tesis diperlukan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar kerangka berpikir atau kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan bagi penulis sebagai data pendukung dalam proses pembuatan tesis, penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2. 1 Kajian penelitian terdahulu dalam percepatan penurunan stunting

No.	Judul, Penulis dan Identitas Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Lokus, Fokus dan Analisis)	Hasil Penelitian
1.	“Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara”. (Hermawati dan Sastrawan, 2020. p. 48) Jurnal Kesehatan Qamarul Huda, Vol. 8 No. 2	Mengkaji implementasi kebijakan program penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara.	a. Metode Penelitian: deskriptif kualitatif. b. Lokus penelitian: Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara. c. Fokus penelitian: implementasi kebijakan program penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara. d. Analisis: Mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan program penanggulangan stunting terintegrasi di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.	Program penanggulangan stunting terintegrasi belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan maksimal disebabkan beberapa kendala teknis yang terjadi pada saat pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
2.	“Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia”. (Latifa Suhada Nisa, 2018, p. 173) Jurnal Kebijakan Pembangunan, Vol. 13 No. 2	Mendeskripsikan kebijakan dan regulasi tentang penanggulangan stunting di Indonesia (intervensi spesifik dan sensitiv)	a. Metode Penelitian: deskriptif kualitatif. b. Lokus penelitian: Indonesia. c. Fokus penelitian: regulasi tentang penanggulangan stunting secara keseluruhan dengan lingkup Indonesia. d. Analisis: melakukan analisa terhadap kebijakan dan regulasi tentang penanggulangan stunting secara menyeluruh mulai dari tingkat pusat, daerah dan desa dengan pelibatan multi sektor.	Dalam upaya penanggulangan stunting diperlukan kerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan penanggulangan stunting dengan melibatkan sektor kesehatan dan sektor terkait lainnya.
3.	“Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting”. (Hafzana Bedasari, dkk, 2022. p. 703) Jurnal Fishum Universitas	Mengetahui bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> dan untuk mengetahui apa saja faktor	a. Metode Penelitian: kualitatif. b. Lokus penelitian: Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. c. Fokus penelitian: strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> . d. Analisis: menganalisis strategi dalam penanganan <i>stunting</i> dan mengetahui faktor-	Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun belum berhasil menurunkan angka <i>stunting</i> di Desa Pongkar dari 2,76% tahun 2019, menjadi 7,6% tahun 2020, serta mengalami kenaikan 12,8% tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan

No.	Judul, Penulis dan Identitas Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Lokus, Fokus dan Analisis)	Hasil Penelitian
	Karimun, Vol. 3	pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanganan <i>stunting</i> di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.	faktor yang mempengaruhi program penanganan <i>stunting</i> .	program <i>stunting</i>
4.	“Peleburan Ego Sektoral: Strategi Menurunkan Stunting di Trenggalek”. (Ratnaningsih Damayanti, dkk, 2021. p. 197) Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 2	Menemukan strategi kebijakan penanganan stunting berbasis praktik di Kabupaten Trenggalek serta memberikan uraian aktor-aktor yang terlibat, menganalisis peran dan dinamika hubungan di antara aktor-aktor tersebut.	a. Metode Penelitian: kualitatif. b. Lokus penelitian: Kabupaten Trenggalek. c. Fokus penelitian: peleburan ego sektoral sebagai strategi dalam menurunkan stunting di Kabupaten Trenggalek. d. Analisis: mendeskripsikan strategi kebijakan penanganan stunting berbasis praktik dan peleburan ego sektoral di Kabupaten Trenggalek.	Negosiasi yang dilakukan dari berbagai sektor telah mampu merubah ego antar aktor dan stigma negatif tentang stunting menjadi sebuah kekuatan bersama yang mampu memerangi tingginya angka stunting di Kabupaten Trenggalek. memiliki kecenderungan lebih berfokus pada peleburan ego sektoral sebagai strategi dalam menurunkan stunting di Kabupaten Trenggalek
5.	“Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang”. (Febby Febrian dan Rahmadani, 2021. p.110) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Vol. 3 No.1	Menganalisis pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di Kota Padang	a. Metode Penelitian: deskriptif kualitatif. b. Lokus penelitian: Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kota Padang. c. Fokus penelitian: pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di Kota Padang. d. Analisis: melakukan analisis terhadap pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di Kota Padang.	Pelaksanaan koordinasi dan mekanisme kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di Kota Padang hanya terlaksana di tingkat sektoral Dinas Kesehatan beserta jajarannya, belum ada koordinasi antar lintas sektoral dengan instansi lain yang membahas khusus tentang pencegahan <i>stunting</i> , belum adanya regulasi mempengaruhi kejelasan fungsi dan tugas pokok dari lembaga yang terlibat, serta tidak adanya anggaran khusus tentang pencegahan stunting.

No.	Judul, Penulis dan Identitas Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Lokus, Fokus dan Analisis)	Hasil Penelitian
6.	“Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi”, (Dahlan Tampubolon, 2018, p. 25) Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 11 No. 1	Mengevaluasi kebijakan intervensi stunting di Provinsi Riau	a. Metode Penelitian: <i>mixed method</i>. b. Lokus penelitian: Provinsi Riau. c. Fokus penelitian: implementasi kebijakan intervensi stunting di Provinsi Riau. d. Analisis: melakukan evaluasi kebijakan stunting di Rokan Hulu dan Kampar, Provinsi Riau.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intervensi stunting Provinsi Riau telah dilakukan, namun belum adanya koordinasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Riau.
7.	“Efektivitas Program Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”. (Aminah dan Akhmad Riduan, 2022. p. 865) Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1 No.8	Mengkaji efektivitas program Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.	a. Metode Penelitian: deskriptif kualitatif. b. Lokus penelitian: Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. c. Fokus penelitian: efektivitas pelaksanaan program KP2S di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. d. Analisis: menganalisis keberhasilan program Penurunan Stunting.	Efektivitas Program KP2S di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif sehingga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyarankan agar menyebarluaskan informasi terkait program KP2S melalui peran tokoh agama dalam perilaku hidup sehat.

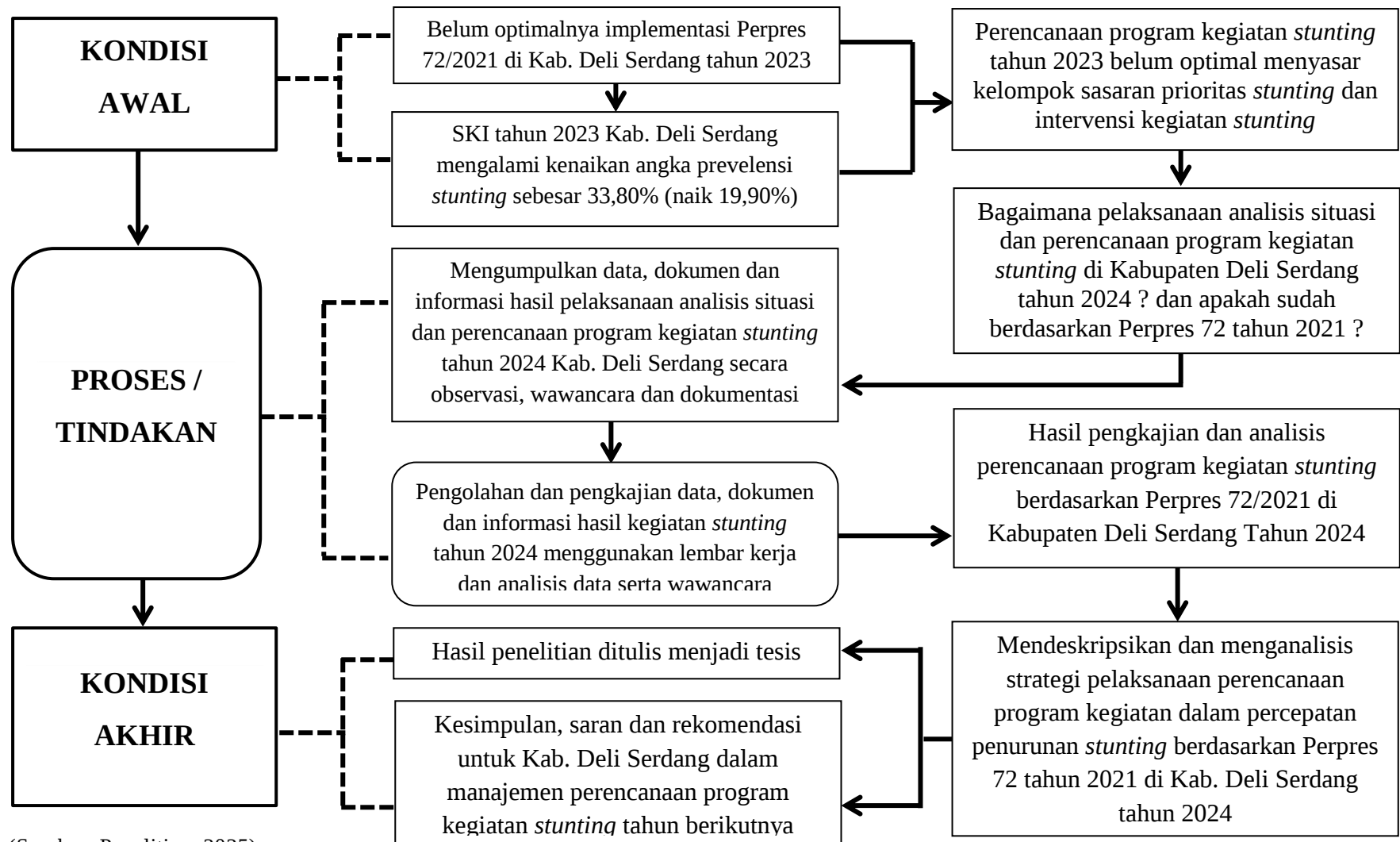
(Sumber: Penelitian, 2025)

2.8 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti merasa perlu menentukan lingkup dan batasan masalah agar kerangka berpikir tersebut memiliki keterkaitan dengan masalah/penelitian yang akan diteliti. Konsep tersebut bertujuan untuk menyederhanakan dan menegaskan berbagai pengertian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di lapangan, sehingga judul menjadi jelas.

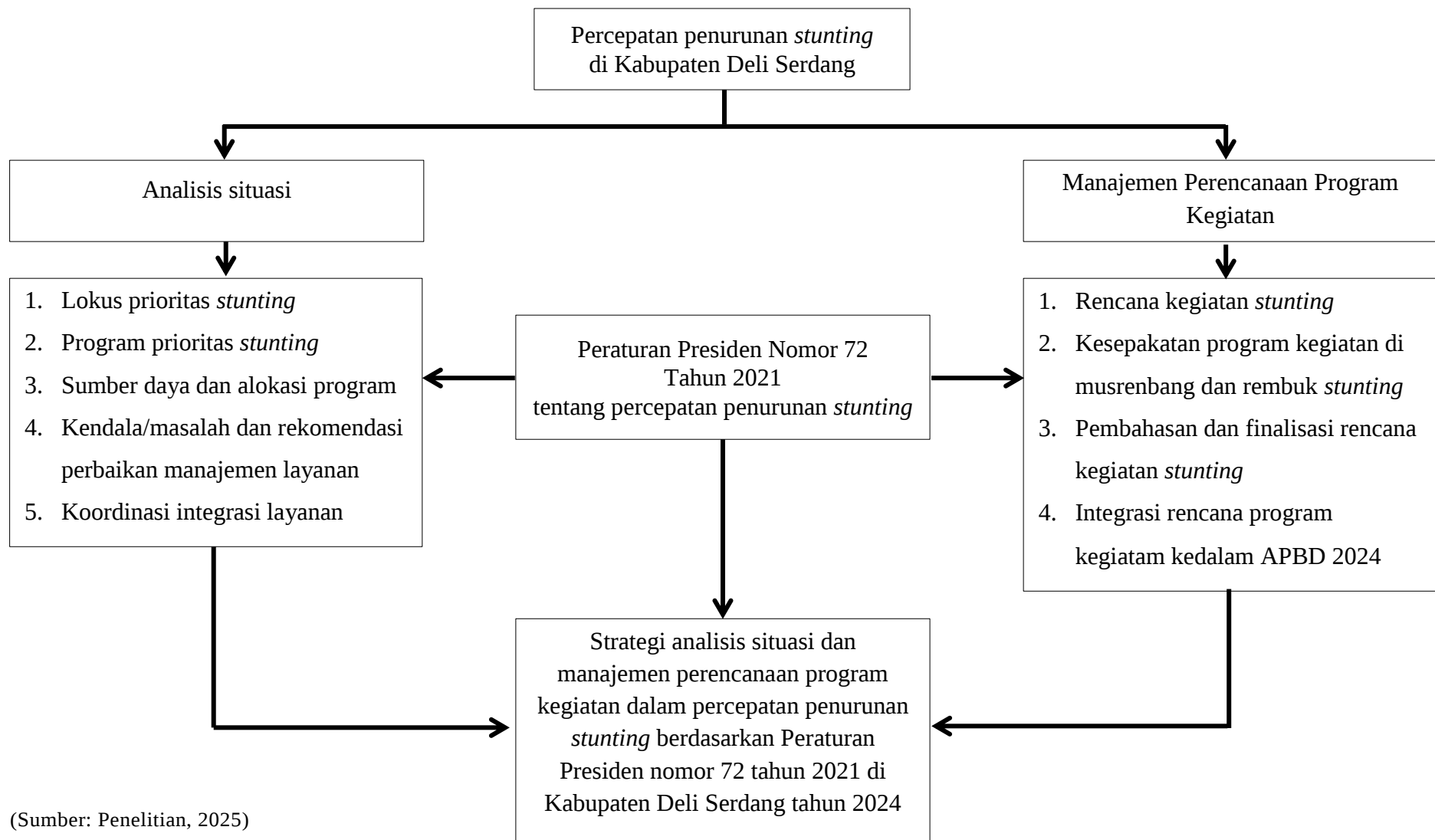
Berdasarkan konsep yang disajikan diatas, maka batasan dalam penelitian ini adalah identifikasi dan mengkaji analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, dalam menyediakan program kegiatan *stunting* untuk memenuhi asupan gizi melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif terhadap kelompok sasaran *stunting* yang dilaksanakan secara terintegrasi (multisektor), holistik dan berkualitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Identifikasi dan kajian ini memastikan kembali pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sudah sesuai dengan lokasi sasaran prioritas dan program kegiatan prioritas dalam intervensi layanan kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Harapannya hasil kajian ini menjadi kesimpulan dan rekomendasi perbaikan dalam penyediaan manajemen layanan intervensi gizi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang pada tahun berikutnya.



(Sumber: Penelitian, 2025)

Gambar 2. 6 Kerangka berpikir penelitian



(Sumber: Penelitian, 2025)

Gambar 2. 7 Kerangka alur pelaksanaan manajemen perencanaan program kegiatan *stunting*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sifatnya deskriptif dan induktif. Pada metode ini, penelitian sebuah fenomena berangkat dari data yang ada, bukan teori. Jadi fokus penelitian kualitatif bukan pada pembuktian teori yang sudah ada. Adapun landasan teori biasanya sekedar digunakan sebagai penopang fokus penelitian.

Peneliti memilih metode kualitatif dikarenakan penelitian tersebut mengangkat sebuah fenomena yang berkembang di Kabupaten Deli Serdang yaitu masalah penurunan kinerja dalam percepatan penurunan *stunting* berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2023 (studi kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang selaku Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*). Penelitian ini berangkat dari data yang sudah didapatkan peneliti bukan hanya sekedar teori saja. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keabsahan data penelitian.

Pada bab ini akan dijelaskan secara berturut-turut mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data penelitian, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Soegiyono 2011)

Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Tujuannya untuk menggambarkan, menjelaskan, mengklarifikasikan, serta mendeskripsikan variabel-variabel yang diamati sesuai dengan masalah yang dirumuskan sehingga peneliti dapat mendeskripsikan realita empiris yang terkait dengan strategi Analisis Situasi dan Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Deli Serdang selaku Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang memiliki kantor beralamatkan Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan tujuan penelitian dan penanggung jawab untuk pelaksanaan manajemen perencanaan program kegiatan *stunting* di kabupaten Deli Serdang yang mengalami penurunan kinerja percepatan penurunan *stunting*.

Peneliti juga akan berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

(TPPS) Kabupaten Deli Serdang sebagai khususnya informan utama adalah Kepala Bidang PPM Bappedalitbang, Fungsional Muda Bidang PPM Bappedalitbang dan Penelaah Data Sumber Daya Alam Bidang PPM Bappedalitbang dan informan tambahan adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian & Perikanan, Dinas Kominfo, Dinas PPPA/PPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas CKTR serta Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan pada periode kegiatan percepatan penurunan *stunting* tahun 2024, untuk tindaklanjut dari hasil SKI 2023 yang mengalami penurunan angka prevelensi *stunting*.

Tabel 3. 1 Rencana waktu penelitian dan penyusunan tesis

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																											
		Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025				Mei 2025				Juni 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset awal & baca literatur																												
2	Pengajuan judul tesis																												
3	Penyusunan proposal tesis																												
4	Bimbingan proposal tesis																												
5	Seminar proposal tesis																												
6	Penelitian dan pengumpulan data																												
7	Pengolahan dan analisis data																												
8	Penyusunan tesis																												
9	Bimbingan tesis																												
10	Seminar hasil																												
11	Perbaikan seminar hasil																												
12	Pengecekan Keabsahan tesis																												
13	Ujian tesis																												
14	Perbaikan ujian tesis																												

(Sumber: Penelitian, 2025)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:50) menjelaskan bahwa "penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi di transfer ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari oleh sampel dalam penelitian kualitatif bukan nama responden tetapi narasumber, partisipan, informasi, data dan dokumen dalam penelitian".

Kemudian menurut Lofland yang dikutip Lexy J. Moleong (2002:112) mengemukakan bahwa "sumber data utama dari kualitatif ialah kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain." Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara kepada narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi. Peneliti memilih *Key Informan* yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dan Fungsional Muda Bidang PPM Bappedalitbang serta Penelaah Data Sumber Daya Alam Bidang PPM Bappedalitbang dan informan tambahan adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian & Perikanan, Dinas Kominfo, Dinas PPPA/PPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas CKTR serta Dinas Lingkungan Hidup.
2. Data sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan kegiatan. (Sugiyono, 2006:156). Sumber data

dalam penelitian ini dapat berupa benda atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *puposif sampling* (Moleong, 2002:65). Adapun cirinya dari mana atau dari siapa informasi mulai diambil tidak menjadi soal, akan tetapi bila telah berjalan proses tersebut berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan proses akan berlangsung terus. Proses berakhir apabila terjadi pengulangan informasi serta pertimbangan kecukupan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian meliputi :

- a. Tempat dan peristiwa : dalam hal ini lokasi penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Deli Serdang.
- b. Dokumen-dokumen: sumber data lainnya yang sifatnya melengkapi data utama, seperti dokumen mengenai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan regulasi percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Deli Serdang serta petunjuk teknis pelaksanaan aksi konvergensi *stunting*, hasil pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang guna melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) metode, yaitu:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui

penggunaan panca indra, pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung maupun tidak langsung atau secara formal maupun informal.

2. Wawancara (*Interview*) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dilakukan secara terbuka dan terstruktur, dan pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Kisi-kisi wawancara penelitian kepada informan, antara lain :

Tabel 3. 2 Kisi-kisi wawancara penelitian

Fokus Penelitian	Informasi yang dibutuhkan	Informan/Narasumber
Analisis situasi.	1. Sebaran sasaran prioritas <i>stunting</i> dalam wilayah kabupaten/kota 2. Ketersediaan program kegiatan dan kesenjangan cakupan layanan 3. Penyampaian layanan pada sasaran prioritas <i>stunting</i> 4. Koordinasi yang diperlukan untuk meningkatkan konvergensi intervensi bagi sasaran prioritas <i>stunting</i>	1. Bappedalitbang 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas PMD 5. Dinas Sosial 6. Dinas Pertanian & Perikanan 7. Dinas Kominfo 8. Dinas PPPA/PPKB 9. Dinas Ketahanan Pangan 10. Dinas CKTR 11. Dinas Lingkungan Hidup
Manajemen perencanaan program kegiatan	1. Rancangan rencana kegiatan <i>stunting</i> 2. Konfirmasi kebutuhan program kegiatan <i>stunting</i> di Musrenbang dan rembuk <i>stunting</i> 3. Komitmen hasil rembuk <i>stunting</i> kabupaten/kota 4. Kesepakatan rencana kegiatan <i>stunting</i>	

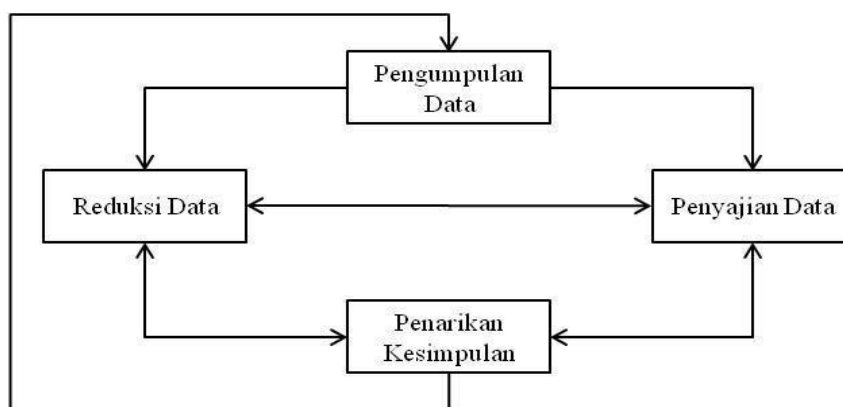
Fokus Penelitian	Informasi yang dibutuhkan	Informan/Narasumber
Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021.	1. Capaian indikator kegiatan Pepres 72 tahun 2021 2. Kendala, inovasi dan praktek baik dalam program kegiatan <i>stunting</i>	

(Sumber: Penelitian, 2025)

3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, yang digunakan untuk menelusuri data historis. Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa: regulasi, surat keputusan, arsip, data dan dokumen lain yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan dalam percepatan dan penurunan *stunting*.

3.4 Tahap Analisis Data

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :



(Sumber: Metodologi Penelitian Bisnis, Lexy J. Moleong, 2014)

Gambar 3. 1. Komponen dalam analisis data

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data sesuai metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan rumusan masalah

penelitian serta selanjutnya dikembangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Merupakan proses penyederhanaan, pemilihan dan transformasi data keseluruhan berupa transkrip, wawancara, catatan lapangan dan dokumen- empiris lainnya.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah merupakan penggabungan informasi dan data yang nantinya akan disampaikan dan dilaksanakan melalui aksi kegiatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

4. Kesimpulan

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari analisis atau verifikasi dengan mengecek ulang sesuai dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait Strategi Analisis Situasi dan Manajemen Perencanaan Program Kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 berdasarkan bukti, data dan temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan peneliti.

3.4.1 Tahap-Tahap Penelitian

Tahap atau prosedur penelitian dilakukan berdasarkan pada prinsip- prinsip yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah. Adapun tahap-tahap umum yang berlaku untuk sebuah penelitian secara garis besarnya adalah:

1. *Research Planning* adalah merupakan perencanaan untuk penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data atau buku-buku yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan mengenai manajemen perencanaan kegiatan *stunting*. Pada tahap ini juga sudah mulai menyusun proposal dan

proses selanjutnya proposal penelitian dikonsultasikan pada dosen pembimbing serta proposal diseminarkan untuk mendapat persetujuan dari dosen penguji dan dosen pembimbing.

2. *Data Collecting* adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.
3. *Data Analiting* adalah proses pengolahan data dan pengkajian hasil penelitian kegiatan. Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga menjadi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.
4. *Research Reporting* adalah tahap ini merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini hasil kajian dan analisa yang sudah dilakukan, Peneliti akan tulis dalam bentuk tesis secara sistematis dan terperinci serta menjadi saran dan rekomendasi bagi Kabupaten Deli Serdang dalam intervensi layanan *stunting* tahun 2025.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Kabupaten Deli Serdang secara administratif mengelilingi ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Memiliki luas wilayah sebesar 249.772 Ha (2.497,72 km²), yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Berdasarkan data statistik daerah jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.014.629 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.003.535 jiwa dengan total penduduk sebesar 2.018.164 jiwa, dimana dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 777 jiwa per km².

Kondisi *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 menjadi cerminan dari tren penurunan *stunting* yang telah dicapai melalui berbagai upaya dan program kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*, sekaligus menjadi tantangan bagi Kabupaten Deli Serdang untuk percepatan penurunan *stunting*.

Tabel 4. 1 Tren data *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 (E-PPGBM)

No	Tahun	Jumlah Balita	Balita Sangat Pendek	Balita Pendek	Jumlah Balita <i>Stunting</i>	(%)
1	2022	130.417	267	905	1.172	0,89%
2	2023	111.997	134	318	452	0,40%
3	2024	135.121	131	76	207	0,15%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase balita *stunting* di Kabupaten Deli Serdang, dari tahun 2023 jumlah anak *stunting* 452 anak balita dan menjadi 207 anak balita *stunting* di tahun 2024 (total penurunan anak *stunting* sebesar 245 balita). Hal ini menunjukkan bahwa, adanya konvergensi program intervensi upaya

percepatan penurunan *stunting* telah mampu menurunkan balita *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

Regulasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait percepatan penurunan *stunting* tertuang dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Deli Serdang dengan perubahan Nomor 299 Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024. Ketua TPPS Kabupaten Deli Serdang saat ini yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang dan telah mengeluarkan kebijakan percepatan penurunan *stunting* melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 melalui kegiatan pemetaan tematik *stunting*, antara lain:

1. Intervensi kelompok sasaran 1.000 HPK, melalui kegiatan:
 - a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita kurus;
 - b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK);
 - c. Penyediaan obat-obat kesehatan anak;
 - d. Penyediaan obat-obat gizi untuk ibu hamil;
 - e. Suplementasi kalsium;
 - f. Pemeriksaan kehamilan;
 - g. Suplementasi kapsul vitamin A;
 - h. Suplementasi taburia;
 - i. Imunisasi;

- j. Suplementasi;
 - k. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
2. Intervensi peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, melalui kegiatan:
 - a. Akses air minum yang aman;
 - b. Akses sanitasi yang layak.
 3. Intervensi peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PK-R) di Kampung KB;
 - b. Pengelolaan surveilans kesehatan.
 4. Intervensi kelompok sasaran usia lainnya, melalui kegiatan:
 - a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita kurus;
 - b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil KEK;
 - c. Penyediaan obat-obat kesehatan anak;
 - d. Penyediaan obat-obat gizi untuk ibu hamil;
 - e. Distribusi PMT balita dan ibu hamil daerah lokus *stunting* tahun 2024.
 5. Intervensi peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, melalui kegiatan:
 - a. Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
 - b. Orientasi tenaga kesehatan dalam Sistem Konseling Berimbang KB (SKB-KB);
 - c. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
 - d. Rapat koordinasi LP/LS dan organisasi profesi dalam pelaksanaan penanggulangan *stunting*;
 - e. Penyediaan kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1.000 HPK.

4.1.1 Deskripsi Analisis Situasi dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Kegiatan analisis situasi Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2024 di Kantor Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjadi anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yaitu Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian & Perikanan, Dinas Kominfo, Dinas PPPA/PPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas CKTR dan Dinas Lingkungan Hidup.

Analisis situasi bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran prevelensi/anak *stunting* dan kondisi capaian program kegiatan *stunting* tahun sebelumnya berdasarkan indikator kegiatan Perpres 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 yaitu sebaran balita *stunting*, sebaran keluarga berisiko *stunting*, situasi ketersediaan program kegiatan, kesenjangan program kegiatan dan pelaksanaan manajemen layanan kegiatan. Tahapan analisis situasi yang dilaksanakan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, antara lain:

4.1.1.1 Sebaran Sasaran Prioritas *Stunting* dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024

A. Identifikasi dan Penyusunan Sebaran Prevelensi *Stunting*

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sebaran kondisi balita *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan memastikan pelaksanaan pengukuran dan penimbangan anak balita sudah terlaksana terhadap semua anak balita pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya serta sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Data dan tahapan pelaksanaannya, antara lain:

1. Data yang digunakan adalah data jumlah kasus dan prevalensi *stunting* pada anak dibawah dua tahun (baduta) pada satu tahun terakhir, untuk tingkat kecamatan, posyandu dan desa/kelurahan;
2. Tim pelaksana meminta Dinas Kesehatan memberikan data *stunting* (dalam jumlah kasus dan prevalensi) dari hasil surveilans gizi atau hasil pengukuran pada bulan penimbangan balita (bulan Februari atau Agustus), atau hasil kegiatan lainnya yang telah divalidasi/dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan;
3. Data *stunting* kabupaten tersebut dapat dirinci per desa/kelurahan, per kecamatan atau per wilayah Puskesmas untuk mengetahui di mana lokasi *stunting* terjadi.

Cara analisis sebaran prevelensi *stunting*:

Bappedalitbang bersama OPD terkait menggunakan data balita *stunting* dan memasukan ke dalam format master analisis situasi untuk menyusun dan menghasilkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Prevalensi *stunting* terkini tingkat Kabupaten Deli Serdang, yaitu angka rata-rata prevalensi seluruh wilayah (seluruh desa/kelurahan atau seluruh kecamatan atau seluruh wilayah layanan puskesmas);
2. Prevalensi *stunting* berdasarkan kecamatan, puskemas dan desa/kelurahan untuk mengetahui di mana wilayah dengan prevalensi *stunting* yang melampaui rata-rata secara signifikan;

Output/Hasil:

1. Jumlah Balita *stunting* Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 sebanyak 380 balita.
2. Wilayah yang perlu menjadi fokus perhatian dalam pencegahan/penurunan *stunting* sebanyak 39 desa/kelurahan;

3. Berdasarkan ketersediaan data balita *stunting* yang sudah tersedia lengkap disampaikan Dinas Kesehatan, maka identifikasi sebaran balita *stunting* ditampilkan dalam skala desa/kelurahan (tabel 4.4).

B. Identifikasi dan Penyusunan Sebaran Keluarga Resiko Stunting

Pelaksanaan ini dilakukan untuk mengetahui sebaran kondisi keluarga yang resiko *stunting* berdasarkan pendataan keluarga yang dilaksanakan dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Data dan tahapan pelaksanaannya, antara lain:

1. Data yang digunakan adalah data jumlah keluarga berisiko *stunting* tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang bersumber dari hasil pendataan keluarga;
2. Tim pelaksana meminta OPD terkait yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) memberikan data keluarga yang berpotensi resiko *stunting*;
3. Data keluarga berisiko *stunting* kabupaten tersebut dirinci per desa/kelurahan untuk mengetahui lokasi keluarga berisiko *stunting* terjadi.

Cara analisis sebaran keluarga resiko *stunting*:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan data keluarga berisiko *stunting* dan memasukkan kedalam format master analisis situasi untuk menyusun dan menghasilkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Jumlah keluarga berisiko *stunting* terkini tingkat kabupaten, yaitu angka rata-rata keluarga berisiko *stunting* seluruh wilayah (seluruh desa/kelurahan atau seluruh kecamatan);
2. Jumlah kasus dan prevalensi *stunting* disandingkan dengan jumlah keluarga berisiko *stunting* untuk melihat irisan sasaran *stunting* tertinggi;
3. Jumlah keluarga berisiko *stunting* berdasarkan kecamatan/desa/kelurahan untuk

mengetahui di mana wilayah dengan jumlah yang melampaui rata-rata secara signifikan;

Output/Hasil:

1. Jumlah keluarga berisiko *stunting* terkini tingkat kabupaten, yaitu angka keluarga berisiko *stunting* seluruh wilayah (desa/kelurahan) sebanyak 69.160 keluarga;
2. Wilayah yang perlu menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan penurunan keluarga berisiko *stunting* sebanyak 38 desa/kelurahan.
3. Berdasarkan ketersediaan data keluarga risiko *stunting* yang sudah tersedia lengkap disampaikan Dinas PPKB, maka identifikasi sebaran keluarga risiko *stunting* ditampilkan dalam skala desa/kelurahan (tabel 4.4).

C. Identifikasi dan Penyusunan Capaian Layanan Kegiatan Stunting

Pelaksanaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan capaian layanan kegiatan yang sudah dilakukan intervensi *stunting* pada 5 (lima) kelompok sasaran (Remaja, Catin/Capus, Ibu hamil, Ibu menyusui dan Balita) pada tahun sebelumnya di Kabupaten Deli Serdang .Data yang dibutuhkan, antara lain:

1. Data program/kegiatan beserta lokasinya untuk setiap layanan intervensi *stunting* (gizi spesifik dan sensitif) yang dirinci untuk tingkat desa/kelurahan/kecamatan/puskesmas;
2. Sumber data cakupan dari desa/kelurahan dapat mengakomodir hasil laporan konvergensi layanan dasar desa/kelurahan, layanan ibu hamil dan layanan balita, dll.
3. Data cakupan layanan bersumber dari OPD terkait, misalnya dengan memberikan data ketersediaan sarana air minum dan sanitasi per desa/kelurahan untuk mengetahui status capaian akses dimana lokasi *stunting* terjadi dari Dinas CKTR dan data layanan kesehatan serta data layanan lainnya yang menjadi penanggung jawab OPD terkait.

Daftar indikator cakupan layanan intervensi *stunting* dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4. 2 Indikator cakupan layanan essensial (utama) dan layanan supply (pendukung)

No	Indikator	Target (%)	Urutan Bidang
1	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58	- Kesehatan
2	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	90	- Kesehatan
3	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	90	- Agama - Kesehatan
4	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90	- Agama - PPKB - Kesehatan
5	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90	- PPKB - Kesehatan - Agama
6	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>	90	- Agama
7	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90	- Sosial
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90	- Sosial
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90	- Sosial
10	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90	- Kesehatan
11	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80	- Kesehatan
12	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	7,4	- PPKB
13	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5	- PPKB
14	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	80	- Kesehatan
15	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80	- Kesehatan
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90	- Kesehatan
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90	- Kesehatan
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90	- Kesehatan
19	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90	- Kesehatan
20	Keluarga yang Stop BABS	90	- Kesehatan

No	Indikator	Target (%)	Urusan Bidang
21	Keluarga yang melaksanakan PHBS	70	- Kesehatan
22	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90	- Kesehatan - PPKB - Perikanan
23	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	70	- PPKB
24	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan	90	- PPKB
25	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50	- Pertanian - Pangan
26	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100	- CKTR
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	90	- CKTR
28	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90	- Sosial
29	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	90	- Sosial

(sumber: lampiran Perpres 72/2021)

Indikator cakupan layanan supply (pendukung)

No	Indikator	Target	Urusan Bidang
1	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	112,9 Juta Jiwa	Sosial dan Kesehatan
2	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	10 Juta Jiwa	Sosial
3	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	15.600.039 Jiwa	Sosial
4	Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	100% Pendamping	Sosial
5	Terselenggaranya rembuk <i>stunting</i> tingkat kabupaten/kota	Min 1 kali	TPPS
6	Terselenggaranya rembuk <i>stunting</i> tingkat kecamatan	Min. 2 kali	TPPS
7	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>stunting</i>	100% Kab/Kota	TPPS
8	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i> di pemerintah daerah kabupaten/kota	2 kali	TPPS
9	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100% desa/kel	Kesehatan

No	Indikator	Target	Urusan Bidang
10	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>stunting</i>	100,00%	Kesehatan
11	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah tebebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	90,00%	Kesehatan
12	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas	70,00%	Kesehatan
13	Publikasi data <i>stunting</i> tingkat Kabupaten/Kota	1 kali	Kesehatan
14	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90,00%	Kesehatan
15	Terselenggaranya audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i>	50,00%	Kesehatan
16	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100% desa/kel	Kesehatan
17	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan <i>stunting</i>	100% desa/kel	PMD & Tata pemerintahan
18	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90% Kader	PMD & Tata pemerintahan
19	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	100% desa/kel	PMD & Tata pemerintahan
20	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	90% desa/kel	PMD & Tata pemerintahan
21	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	80% desa/kel	PMD & Tata pemerintahan
22	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i> di pemerintahan desa	2 kali	PMD & Tata pemerintahan
23	Jumlah Desa/kelurahan Bebas <i>Stunting</i>	100,00%	PMD & Tata pemerintahan
24	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan <i>stunting</i>	90,00%	PMD & Tata pemerintahan
25	Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>	3 kanal	Komunikasi dan Informasi
26	Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	90,00%	Pendidikan

No	Indikator	Target	Urusan Bidang
27	Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	70,00%	Pendidikan
28	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>stunting</i> lintas agama	2 kali	Agama
29	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i>	2 kali	PPKB
30	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> melalui Sistem Informasi Keluarga	2 kali	PPKB
31	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	90% Kab/Kota	PPKB
32	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90,00%	PPKB
33	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	90,00%	PPKB
34	Pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	75,00%	Ketahanan Pangan
35	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100% Kab/Kota	Ketahanan Pangan

(sumber: lampiran Perpres 72/2021)

Keterangan indikator cakupan layanan intervensi *stunting*, antara lain :

1. Data cakupan esensial (29 indikator) dan data cakupan supply (35 indikator) merupakan data dari indikator-indikator lampiran Perpres 72 tahun 2021 dalam lingkup tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota;
2. Data cakupan esensial dipilih berdasarkan korelasinya yang bersifat langsung terhadap layanan bagi sasaran prioritas *stunting*, mudah diukur secara cakupan persentase, serta berbasis data dari desa/kelurahan, Sehingga cakupannya memiliki peran strategis untuk penentuan desa/kelurahan prioritas *stunting*;
3. Data cakupan supply memiliki tingkat korelasi yang tidak langsung terhadap layanan bagi sasaran prioritas *stunting*, memiliki keragaman isian data yang berupa cakupan

persentase maupun data absolut, serta umumnya dapat digali secara langsung di tingkat kabupaten/kota;

Output/Hasil:

1. Memetakan ketersediaan dan lokasi program kegiatan dan pembiayaan untuk penyediaan intervensi *stunting* dan hasilnya semua program kegiatan tersedia datanya serta capaian kegiatan rata-rata 85% dan capaian ini kategori sangat baik;
2. Mengidentifikasi kesenjangan cakupan layanan dari setiap intervensi *stunting*;
3. Memutuskan program/kegiatan mana saja yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya, baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program dan ini ditetapkan semua program kegiatan akan diusahakan intervensi *stunting* tahun 2024;
4. Mendorong konvergensi program dan kegiatan intervensi *stunting* yang mendukung penurunan *stunting* di kabupaten hingga desa/kelurahan dan sudah melibatkan semua lintas sektor (pemerintah, lembaga/profesi, swast/CSR, LSM/NGO dan masyarakat).
5. Program/kegiatan yang dimaksud adalah program/kegiatan untuk menyediakan intervensi *stunting* (gizi spesifik dan sensitif) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten termasuk DAK, dan APBDesa/kelurahan termasuk Dana Desa.
6. Cakupan layanan dimaksud berbasis seluruh indikator lampiran Perpres 72 tahun 2021 yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten.
7. Berdasarkan ketersediaan data cakupan layanan yang sudah tersedia lengkap disampaikan OPD pengampu kegiatan *stunting*, maka identifikasi capaian cakupan layanan ditampilkan dalam skala desa/kelurahan (tabel 4.4).

Pelaksanaan kegiatan ini menjelaskan semua kebutuhan data cakupan layanan tersedia lengkap dari OPD pengampu kegiatan *stunting* dan dimasukan ke format master analisis situasi (ansit), maka didapatkan kategorisasi warna yang mengklasifikasikan

wilayah yang tergolong tinggi dan rendahnya kondisi *stunting* dan layanan yang sudah diintervensi *stunting* di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi wilayah yang kategori tinggi (merah) yang akan menjadi calon lokasi prioritas *stunting* dan cakupan layanan yang membutuhkan intervensi *stunting*. Berikut hasil formulasi analisis situasi (ansit) dari data sebaran prevelensi *stunting* (jumlah & kasus) dan data kesenjangan cakupan layanan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024:

Tabel 4. 3 Hasil master analisis situasi (sebaran *stunting* dan cakupan layanan)

No	LOKASI			STUNTING			Rata-Rata Cakupan Layanan Stunting 2023
	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi Stunting	
1	LABUHAN DELI	LABUHAN DELI	Helvetia	433	20	2,11	84,77%
2	SUNGGAL	MULYOOREJO	Mulyorejo	716	14	1,25	83,55%
3	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Sunggal Kanan	148	12	2,11	85,75%
4	SUNGGAL	MULYOOREJO	Purwodadi	1416	11	1,28	83,97%
5	BERINGIN	ARASKABU	Aras Kabu	88	11	3,73	83,50%
6	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Sei Mencirim	670	10	0,96	84,08%
7	GALANG	PETUMBUKAN	Naga Rejo	36	8	1,81	85,26%
8	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Purwodadi	31	8	3,33	84,82%
9	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Paluh Sibaji	491	7	4,46	85,80%
10	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Sekip	516	7	1,08	83,46%
11	LUBUK PAKAM	PAGAR JATI	Cemara	265	7	2,06	85,50%
12	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Ujung Serdang	494	6	2,73	89,81%
13	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Wono Sari	515	6	0,85	88,02%
14	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Paya Bakung	648	6	0,64	88,59%
15	LABUHAN DELI	LABUHAN DELI	Manunggal	653	6	0,52	84,84%
16	GALANG	GALANG	Jaharum B	31	6	1,44	84,93%
17	BERINGIN	ARASKABU	Pasar Lima Kebun Kelapa	173	6	1,21	82,64%
18	BERINGIN	ARASKABU	Serdang	61	6	3,11	83,18%
19	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Syahmad	129	6	1,78	83,74%
20	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sidoarjo Satu Pasar Miring	165	6	1,44	86,09%
21	PATUMBAK	PATUMBAK	Marindal Satu	2011	5	0,52	82,73%
22	GALANG	GALANG	Kramat Gajah	10	5	3,03	88,90%
23	LUBUK PAKAM	PAGAR JATI	Pagar Jati	173	5	1,30	83,86%
24	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Bandar Dolok	10	5	5,05	87,38%
25	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Tanjung Garbus Kampung	54	5	3,14	86,27%
26	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Tanjung Mulia	109	5	0,91	83,47%
27	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Dalu 10 A	520	4	0,70	89,44%
28	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Cinta Damai	208	4	1,01	82,71%
29	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Tanjung Sari	357	4	0,84	85,00%
30	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Bangun Sari	621	4	0,43	87,64%
31	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIFAH	Bandar Klippa	1219	4	0,25	81,80%
32	STM HULU	TIGA JUHAR	Durian Empat Mbelang	74	4	7,55	90,11%
33	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Dagang Kelambir	158	4	1,95	88,46%
34	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Perdamaian	156	4	1,48	88,44%
35	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Telaga Sari	104	4	1,04	85,53%
36	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Tanjung Selamat	155	4	0,82	83,46%
37	BERINGIN	ARASKABU	Tumpatan	30	4	0,68	82,80%
38	LUBUK PAKAM	PAGAR JATI	Pasar Melintang	153	4	1,24	86,72%
39	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sukamandi Hilir	73	4	1,36	83,06%
40	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Bangun Sari Baru	452	3	0,91	86,72%
41	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Dalu 10 B	417	3	0,60	88,83%
42	DELI TUA	DELI TUA	Kedai Durian	804	3	0,39	82,38%
43	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	Tembung	2746	3	0,10	82,94%
44	PATUMBAK	PATUMBAK	Lantasan Baru	95	3	1,08	82,24%
45	PATUMBAK	PATUMBAK	Lantasan Lama	103	3	0,80	83,22%
46	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Pagar Merbau II	23	3	1,53	84,39%
47	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Sei Beras Sekata	387	2	0,55	84,89%
48	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sidoarjo Satu Jatibaru	186	2	1,13	86,63%
49	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Deli Tua	840	2	0,24	81,83%
50	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Buntu Bedimbar	814	2	0,31	88,08%
51	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Suka Maju	1027	2	0,38	84,77%
52	SUNGGAL	MULYOOREJO	Paya Geli	821	2	0,23	83,36%
53	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Hamparan Perak	970	2	0,15	89,40%
54	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Kuala	28	2	8,33	88,53%
55	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Tangkahan	36	2	3,33	84,39%
56	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Jati Kesuma	138	2	0,73	82,41%
57	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Ujung Labuhen	80	2	0,71	82,69%
58	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Bagerpang	18	2	4,35	86,65%
59	GALANG	GALANG	Kampung Paku	4	2	1,75	88,37%
60	GALANG	GALANG	Kotangan	39	2	2,13	89,29%
61	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Telaga Sari	163	2	0,70	87,71%
62	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Penara Kebun	5	2	7,69	91,28%
63	PATUMBAK	PATUMBAK	Sigara Gara	282	2	0,22	83,43%
64	DELI TUA	DELI TUA	Deli Tua Barat	137	2	0,46	81,67%
65	DELI TUA	DELI TUA	Deli Tua Timur	10	2	0,52	79,68%

No	LOKASI			STUNTING			Rata-Rata Cakupan Layanan Stunting 2023
	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi Stunting	
66	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Klumpang Kampung	21	2	0,70	88,73%
67	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	Amplas	442	2	0,39	80,83%
68	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIFAH	Laut Dendang	473	2	0,27	82,81%
69	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Ramunia Satu	40	2	1,64	89,47%
70	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Tanjung Garbus Satu	57	2	0,88	84,53%
71	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Jati Rejo	9	2	1,14	86,51%
72	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Paluh Kemiri	220	1	1,25	82,92%
73	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Limau Manis	684	1	0,16	89,04%
74	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Tanjung Morawa B	510	1	0,15	89,78%
75	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	Sei Semayang	714	1	0,06	83,86%
76	HAMPARAN PERAK	KOTA DATAR	Bulu Cina	582	1	0,13	88,53%
77	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIFAH	Bandar Setia	901	1	0,18	80,74%
78	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIFAH	Kolam	974	1	0,07	83,20%
79	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Gunung Meriah	47	1	6,67	89,27%
80	STM HULU	TIGA JUHAR	Tiga Juhar	27	1	1,96	90,62%
81	STM HULU	TIGA JUHAR	Rumah Sumbul	69	1	1,30	89,45%
82	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Martelu	48	1	3,57	87,02%
83	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Nagri Gugung	38	1	4,35	87,91%
84	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Suka Makmur	119	1	0,50	88,80%
85	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Perpanden	110	1	0,66	82,81%
86	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Kutalimbaru	103	1	0,93	83,55%
87	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Suka Rende	103	1	1,61	85,51%
88	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Tuntungan I	150	1	0,42	91,32%
89	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Jaba	53	1	1,08	85,57%
90	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Batu Gemuk	35	1	3,33	85,86%
91	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Kuala Simeme	16	1	4,35	83,34%
92	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Sudi Rejo	68	1	0,81	80,04%
93	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Kuala Dekah	37	1	0,83	87,57%
94	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Mbaruai	42	1	0,56	89,67%
95	STM HILIR	TALUN KENAS	Negara/Beringin	174	1	0,51	86,17%
96	GALANG	GALANG	Sungei Putih	65	1	0,93	89,17%
97	GALANG	PETUMBUKAN	Kampung Kelapa Satu	21	1	1,43	90,56%
98	GALANG	PETUMBUKAN	Tanjung Gusti	41	1	0,90	90,52%
99	GALANG	GALANG	Jaharum A	22	1	0,43	87,28%
100	GALANG	PETUMBUKAN	Pertangguhan	96	1	0,51	90,22%
101	GALANG	PETUMBUKAN	Batu Lokong	25	1	1,15	90,79%
102	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Medan Sinembah	308	1	0,16	88,86%
103	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Aek Pancur	7	1	10,00	90,10%
104	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Naga Timbul	102	1	0,38	89,47%
105	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Sei Merah	46	1	1,22	90,23%
106	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Tanjung Morawa Pekan	86	1	0,14	89,30%
107	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Tanjung Baru	144	1	0,15	88,24%
108	PATUMBAK	PATUMBAK	Patumbak Satu	151	1	0,16	83,18%
109	PATUMBAK	PATUMBAK	Patumbak Dua	266	1	0,19	83,20%
110	SUNGGAL	MULYOREJO	Puji Mulyo	233	1	0,18	84,72%
111	SUNGGAL	MULYOREJO	Kampung Lalang	227	1	0,30	83,20%
112	HAMPARAN PERAK	KOTA DATAR	Tandam Hilir Satu	56	1	0,24	85,57%
113	HAMPARAN PERAK	KOTA DATAR	Kota Datar	15	1	0,34	89,40%
114	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Kampung Lama	246	1	0,30	86,13%
115	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Klambir	302	1	0,25	88,49%
116	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Sungai Baharu	230	1	0,23	88,49%
117	HAMPARAN PERAK	KOTA DATAR	Paluh Manan	187	1	0,36	88,23%
118	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Percut	400	1	0,11	82,44%
119	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Tanjung Rejo	302	1	0,09	83,36%
120	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Tumpatan Nibung	227	1	0,14	85,75%
121	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Sugiharjo	144	1	0,17	85,02%
122	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Kelambir	16	1	0,47	86,93%
123	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Denai Kuala	32	1	1,04	85,18%
124	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Bagan Serdang	95	1	0,82	85,63%
125	BERINGIN	KARANG ANYER	Emplasmen Kuala Namu	62	1	0,52	87,37%
126	BERINGIN	ARASKABU	Pasar Enam Kuala Namu	8	1	1,16	85,12%
127	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Pagar Merbau Tiga	115	1	1,00	83,77%
128	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Perbarakan	47	1	0,47	84,08%
129	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sidodadi Batu Delapan	27	1	0,62	86,03%
130	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Tanjung Morawa A	573	0	0,00	89,40%
131	PATUMBAK	PATUMBAK	Patumbak Kampung	481	0	0,00	83,17%
132	PATUMBAK	PATUMBAK	Marindal Dua	889	0	0,00	83,26%
133	SUNGGAL	MULYOREJO	Tanjung Gusta	688	0	0,00	84,65%
134	SUNGGAL	MULYOREJO	Helvetia	586	0	0,00	84,34%
135	HAMPARAN PERAK	KOTA DATAR	Tandam Hilir Dua	627	0	0,00	85,53%

No	LOKASI			STUNTING			Rata-Rata Cakupan Layanan Stunting 2023
	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi Stunting	
136	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	Kenangan	1478	0	0,00	80,06%
137	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIFAH	Sumber Rejo Timur	1736	0	0,00	82,80%
138	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIFAH	Sei Rotan	1282	0	0,00	83,05%
139	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIFAH	Bandar Khalipah	1595	0	0,00	82,78%
140	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Medan Estate	494	0	0,00	81,93%
141	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Saentis	1248	0	0,00	81,57%
142	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Kuta Bayu	24	0	0,00	86,40%
143	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Gunung Sinembah	15	0	0,00	86,33%
144	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Gunung Paribuan	21	0	0,00	87,90%
145	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Simempar	19	0	0,00	85,06%
146	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Gunung Seribu	30	0	0,00	88,85%
147	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Kuta Tengah	22	0	0,00	88,29%
148	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Pekan Gunung Meriah	23	0	0,00	90,31%
149	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Bintang Meriah	20	0	0,00	88,75%
150	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Ujung Meriah	23	0	0,00	88,22%
151	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Marjanji Pematang	21	0	0,00	91,09%
152	GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH	Marjanji Tongah	11	0	0,00	90,31%
153	STM HULU	TIGA JUHAR	Liang Pematang	15	0	0,00	89,35%
154	STM HULU	TIGA JUHAR	Liang Muda	16	0	0,00	89,55%
155	STM HULU	TIGA JUHAR	Tanjung Raja	84	0	0,00	89,66%
156	STM HULU	TIGA JUHAR	Gunung Manumpak B	13	0	0,00	89,45%
157	STM HULU	TIGA JUHAR	Sippinggan	52	0	0,00	89,64%
158	STM HULU	TIGA JUHAR	Tanjung Muda	15	0	0,00	87,44%
159	STM HULU	TIGA JUHAR	Bah Bah Buntu	76	0	0,00	90,00%
160	STM HULU	TIGA JUHAR	Kuta Mbelin	59	0	0,00	89,53%
161	STM HULU	TIGA JUHAR	Tanjung Bampu	27	0	0,00	89,84%
162	STM HULU	TIGA JUHAR	Tanjung Timur	30	0	0,00	89,45%
163	STM HULU	TIGA JUHAR	Durin Tinggung	18	0	0,00	89,90%
164	STM HULU	TIGA JUHAR	Rumah Rih	53	0	0,00	91,50%
165	STM HULU	TIGA JUHAR	Sibunga Bunga Hilir	85	0	0,00	90,67%
166	STM HULU	TIGA JUHAR	Gunung Manumpak A	39	0	0,00	89,93%
167	STM HULU	TIGA JUHAR	Ranggitgit	6	0	0,00	89,49%
168	STM HULU	TIGA JUHAR	Rumah Lengo	44	0	0,00	90,18%
169	STM HULU	TIGA JUHAR	Tanah Gara Hulu	42	0	0,00	89,96%
170	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Bandar Baru	242	0	0,00	87,73%
171	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Sikeben	6	0	0,00	87,94%
172	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Bukum	78	0	0,00	87,55%
173	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Cinta Rakyat	33	0	0,00	89,24%
174	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Ketanguhen	78	0	0,00	89,03%
175	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Suka Maju	87	0	0,00	88,31%
176	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Buluh Awar	49	0	0,00	88,07%
177	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Batu Layang	26	0	0,00	89,25%
178	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Rumah Pil-Pil	73	0	0,00	88,42%
179	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Durin Serugun	73	0	0,00	88,22%
180	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Ujung Deleng	30	0	0,00	88,42%
181	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Tanjung Beringin	31	0	0,00	87,87%
182	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Tambunen	83	0	0,00	87,78%
183	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Puang Aja	27	0	0,00	87,93%
184	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Betimus Baru	33	0	0,00	87,35%
185	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Rumah Sumbul	6	0	0,00	88,18%
186	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Rm Kinangkung Suka Piring	46	0	0,00	87,30%
187	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	Sala Bulan	12	0	0,00	88,68%
188	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Bengkuring	38	0	0,00	88,55%
189	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Batu Mbelin	38	0	0,00	89,89%
190	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Sibolangit	24	0	0,00	89,85%
191	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Sembahe	108	0	0,00	89,35%
192	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Buah Nabar	55	0	0,00	89,51%
193	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Bingkawan	117	0	0,00	88,77%
194	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	Sayum Sabah	36	0	0,00	88,23%
195	SIBOLANGIT	SIBOLANGIT	RAMBUNG BARU	107	0	0,00	89,58%
196	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Suka Makmur	235	0	0,00	85,97%
197	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Namo Mirik	145	0	0,00	81,85%
198	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Suka Dame	230	0	0,00	83,97%
199	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Kwala Lau Bicik	63	0	0,00	84,55%
200	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Pasar X	92	0	0,00	85,49%
201	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Sampe Cita	141	0	0,00	84,15%
202	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Lau Bakeri	318	0	0,00	84,56%
203	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Silebo Lebo	56	0	0,00	83,68%
204	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Sawit Rejo	187	0	0,00	84,24%
205	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Sei Mencirim	133	0	0,00	80,84%

No	LOKASI			STUNTING			Rata-Rata Cakupan Layanan Stunting 2023
	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi Stunting	
206	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	Namo Rube Julu	5	0	0,00	87,82%
207	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Bintang Meriah	193	0	0,00	90,95%
208	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Sugau	148	0	0,00	90,40%
209	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Tiang Layar	71	0	0,00	90,97%
210	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Salam Tani	22	0	0,00	90,66%
211	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Namo Riam	85	0	0,00	90,98%
212	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Durin Simbelang A	149	0	0,00	88,44%
213	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Durin Tunggal	148	0	0,00	89,38%
214	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Pertampilen	65	0	0,00	90,96%
215	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Hulu	200	0	0,00	90,48%
216	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Namo Simpuri	46	0	0,00	90,92%
217	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Namo Bintang	83	0	0,00	90,93%
218	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Simalingkar A	142	0	0,00	90,66%
219	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Perumnas Simalingkar	160	0	0,00	88,32%
220	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Baru	76	0	0,00	87,15%
221	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Lama	284	0	0,00	90,39%
222	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Kampung Tengah	112	0	0,00	90,42%
223	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Namori	37	0	0,00	90,63%
224	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Durian Jangak	71	0	0,00	88,45%
225	PANCUR BATU	TUNTUNGAN	Tuntungan II	220	0	0,00	90,71%
226	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Gunung Tinggi	71	0	0,00	88,18%
227	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Sei Gelugur	263	0	0,00	87,75%
228	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Suka Raya	107	0	0,00	89,09%
229	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Tanjung Anom	106	0	0,00	89,19%
230	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	Sembahe Baru	147	0	0,00	88,69%
231	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Rimo Mungkur	9	0	0,00	85,30%
232	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Namo Batang	18	0	0,00	87,77%
233	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Bekukul	6	0	0,00	87,08%
234	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Namo Pinang	26	0	0,00	85,59%
235	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Tanjung Selamat	2	0	0,00	86,80%
236	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Namo Pakam	24	0	0,00	86,30%
237	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Suka Mulia Hulu	2	0	0,00	86,43%
238	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Uruk Gedang	5	0	0,00	87,16%
239	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Suka Mulia Hilir	8	0	0,00	87,98%
240	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Silue Lue	6	0	0,00	88,37%
241	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Lubang Ido	15	0	0,00	86,47%
242	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Rumah Mbacang	10	0	0,00	87,49%
243	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Rumah Keben	8	0	0,00	87,42%
244	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Cinta Rakyat	0	0	0,00	86,66%
245	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Gunung Berita	8	0	0,00	85,59%
246	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Namo Rambe	77	0	0,00	80,14%
247	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Namo Landur	40	0	0,00	84,39%
248	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Namo Mbaru	16	0	0,00	87,81%
249	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Salang Tungir	25	0	0,00	86,91%
250	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Gunung Kelawas	83	0	0,00	83,53%
251	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Batu Rejo	15	0	0,00	85,63%
252	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Batu Mbelin	15	0	0,00	87,08%
253	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Kuta Tengah	50	0	0,00	83,89%
254	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Timbang Lawan	14	0	0,00	87,37%
255	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Lau Mulgap	14	0	0,00	86,52%
256	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Kuta Tualah	21	0	0,00	83,95%
257	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Namo Mbelin	11	0	0,00	85,87%
258	NAMO RAMBE	NAMORAMBE	Batu Penjemuran	2	0	0,00	83,42%
259	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Mardinding Julu	92	0	0,00	87,88%
260	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Penen	140	0	0,00	89,57%
261	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Per Ria Ria	93	0	0,00	89,82%
262	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Sari Laba Jahe	86	0	0,00	88,85%
263	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Biru Biru	51	0	0,00	88,79%
264	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Rumah Gerat	12	0	0,00	88,57%
265	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Tanjung Sena	36	0	0,00	87,94%
266	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Kuta Mulyo	21	0	0,00	89,60%
267	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Namo Tualang	23	0	0,00	88,57%
268	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Kampung Selamat	137	0	0,00	88,66%
269	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Sidodadi	54	0	0,00	88,52%
270	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Namo Suro Baru	16	0	0,00	88,01%
271	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Aji Baho	32	0	0,00	87,83%
272	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Candi Rejo	21	0	0,00	89,34%
273	BIRU-BIRU	BIRU-BIRU	Sidomulyo	141	0	0,00	90,25%
274	STM HILIR	TALUN KENAS	Rambai	76	0	0,00	87,56%
275	STM HILIR	TALUN KENAS	Kuta Jurung	25	0	0,00	86,71%

No	LOKASI			STUNTING			Rata-Rata Cakupan Layanan Stunting 2023
	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi Stunting	
276	STM HILIR	TALUN KENAS	Penungkiren	96	0	0,00	87,75%
277	STM HILIR	TALUN KENAS	Lau Rakit	70	0	0,00	86,20%
278	STM HILIR	TALUN KENAS	Tala Peta	123	0	0,00	86,54%
279	STM HILIR	TALUN KENAS	Siguci	96	0	0,00	87,28%
280	STM HILIR	TALUN KENAS	Gunung Rintis	83	0	0,00	88,56%
281	STM HILIR	TALUN KENAS	Lau Rempah	7	0	0,00	87,93%
282	STM HILIR	TALUN KENAS	Juma Tombak	85	0	0,00	85,83%
283	STM HILIR	TALUN KENAS	Talun Kenas	128	0	0,00	87,75%
284	STM HILIR	TALUN KENAS	Sumbul	141	0	0,00	86,31%
285	STM HILIR	TALUN KENAS	Limau Mungkur	124	0	0,00	87,66%
286	STM HILIR	TALUN KENAS	Tadukan Raga	175	0	0,00	86,61%
287	STM HILIR	TALUN KENAS	Lau Barus Baru	128	0	0,00	87,29%
288	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Mabar	158	0	0,00	86,62%
289	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Sibaganding	12	0	0,00	87,08%
290	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Bah Balua	22	0	0,00	84,60%
291	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Rumah Deleng	68	0	0,00	83,16%
292	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Bandar Gugung	38	0	0,00	83,06%
293	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Bandar Meriah	169	0	0,00	84,68%
294	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Perguruan	36	0	0,00	86,51%
295	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Bangun Purba Tengah	7	0	0,00	84,52%
296	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Damak Maliho	107	0	0,00	82,52%
297	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Suka Luwe	5	0	0,00	83,74%
298	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Urung Ganjang	18	0	0,00	84,09%
299	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Bandar Kwala	18	0	0,00	83,15%
300	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Marombun Barat	2	0	0,00	83,86%
301	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Marombun Ujung Jawi	1	0	0,00	83,83%
302	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Bah Perak	14	0	0,00	83,79%
303	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Bangun Purba	46	0	0,00	84,69%
304	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Greahan	6	0	0,00	85,07%
305	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Cimahe	9	0	0,00	85,34%
306	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Batu Gingging	25	0	0,00	84,80%
307	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Tanjung Purba	49	0	0,00	87,35%
308	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Sialang	25	0	0,00	84,27%
309	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Batu Rata	4	0	0,00	85,15%
310	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	Ujung Rambe	47	0	0,00	84,36%
311	GALANG	GALANG	Bandar Kwala	48	0	0,00	89,17%
312	GALANG	GALANG	Baru Titi Besi	7	0	0,00	90,19%
313	GALANG	GALANG	Pulau Tagor Baru	35	0	0,00	89,00%
314	GALANG	GALANG	Galang Barat	7	0	0,00	90,73%
315	GALANG	PETUMBUKAN	Paya Kuda	1	0	0,00	92,34%
316	GALANG	PETUMBUKAN	Pisang Pala	8	0	0,00	89,80%
317	GALANG	PETUMBUKAN	Petumbukan	13	0	0,00	90,26%
318	GALANG	GALANG	Sungai Karang	47	0	0,00	90,10%
319	GALANG	GALANG	GALANG SUKA	12	0	0,00	89,61%
320	GALANG	GALANG	Galang Kota	121	0	0,00	85,14%
321	GALANG	GALANG	Timbang Deli	173	0	0,00	89,86%
322	GALANG	PETUMBUKAN	Tanah Merah	11	0	0,00	91,50%
323	GALANG	PETUMBUKAN	Tanjung Siporkis	5	0	0,00	90,16%
324	GALANG	PETUMBUKAN	Paya Itik	22	0	0,00	90,11%
325	GALANG	PETUMBUKAN	Paya Sampir	5	0	0,00	93,04%
326	GALANG	PETUMBUKAN	Kampung Johar Baru	16	0	0,00	89,98%
327	GALANG	PETUMBUKAN	Kotasan	51	0	0,00	89,64%
328	GALANG	GALANG	Tanah Abang	20	0	0,00	87,53%
329	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Bandar Labuhan	227	0	0,00	89,99%
330	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Bangun Rejo	176	0	0,00	90,92%
331	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Lengau Serpang	131	0	0,00	88,81%
332	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Dagang Kerawan	113	0	0,00	89,44%
333	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Punden Rejo	105	0	0,00	88,43%
334	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Tanjung Mulia	52	0	0,00	89,61%
335	DELI TUA	DELI TUA	Deli Tua	321	0	0,00	80,35%
336	DELI TUA	DELI TUA	Mekar Sari	356	0	0,00	84,20%
337	DELI TUA	DELI TUA	Suka Makmur	471	0	0,00	82,90%
338	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Tanjung Selamat	341	0	0,00	85,50%
339	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Medan Krio	262	0	0,00	85,97%
340	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	Sumber Melati Diski	49	0	0,00	83,30%

No	LOKASI			STUNTING			Rata-Rata Cakupan Layanan Stunting 2023
	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi Stunting	
341	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	Serba Jadi	98	0	0,00	82,95%
342	HAMPARAN PERAK	KOTA DATAR	Tandam Hulu Dua	36	0	0,00	87,65%
343	HAMPARAN PERAK	KOTA DATAR	Kampung Tandam Hulu Satu	46	0	0,00	86,55%
344	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Klambir Lima Kampung	244	0	0,00	89,05%
345	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Klambir Lima Kebon	248	0	0,00	87,65%
346	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Klumpang Kebon	49	0	0,00	88,95%
347	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Sialang Muda	98	0	0,00	87,07%
348	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Kota Rantang	233	0	0,00	87,57%
349	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Kampung Selemak	355	0	0,00	88,01%
350	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Paluh Kurau	262	0	0,00	87,67%
351	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	Pematang Johar	418	0	0,00	84,60%
352	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	Telaga Tujuh	77	0	0,00	86,40%
353	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	Karang Gading	435	0	0,00	85,79%
354	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Sampali	359	0	0,00	83,20%
355	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Cinta Rakyat	291	0	0,00	82,49%
356	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Pematang Lalang	55	0	0,00	82,32%
357	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	Kenangan Baru	311	0	0,00	80,43%
358	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Sena	210	0	0,00	84,40%
359	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Baru	137	0	0,00	85,28%
360	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Bakaran Batu	46	0	0,00	85,89%
361	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Bintang Meriah	179	0	0,00	85,99%
362	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Batang Kuis Pekan	331	0	0,00	85,99%
363	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Paya Gambar	164	0	0,00	86,25%
364	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Sidodadi	221	0	0,00	85,19%
365	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Mesjid	53	0	0,00	86,55%
366	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Sei Tuan	55	0	0,00	88,42%
367	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Tengah	54	0	0,00	87,81%
368	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Durian	255	0	0,00	85,07%
369	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Kubah Sentang	28	0	0,00	88,17%
370	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Perkbunan Ramunia	54	0	0,00	88,25%
371	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Ramunia Dua	18	0	0,00	88,57%
372	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Denai Sarang Burung	145	0	0,00	89,55%
373	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Denai Lama	43	0	0,00	88,79%
374	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Binjai Bakung	33	0	0,00	87,61%
375	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Pantai Labu Baru	15	0	0,00	89,50%
376	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Pantai Labu Pekan	166	0	0,00	86,71%
377	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Rugemuk	101	0	0,00	86,55%
378	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Pematang Biara	150	0	0,00	87,83%
379	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Rantau Panjang	209	0	0,00	86,85%
380	BERINGIN	KARANG ANYER	Sidodadi Ramunia	42	0	0,00	87,37%
381	BERINGIN	ARASKABU	Sidourip	33	0	0,00	83,62%
382	BERINGIN	KARANG ANYER	Karang Anyar	75	0	0,00	87,95%
383	BERINGIN	KARANG ANYER	Beringin	215	0	0,00	86,97%
384	BERINGIN	KARANG ANYER	Sidoarjo Dua Ramunia	49	0	0,00	88,31%
385	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Petapahan	141	0	0,00	86,00%
386	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Lubuk Pakam Tiga	147	0	0,00	83,23%
387	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Lubuk Pakam I/II	0	0	0,00	81,66%
388	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Lubuk Pakam Pekan	166	0	0,00	83,87%
389	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Bakaran Batu	218	0	0,00	84,85%
390	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Tanjung Garbus II	1	0	0,00	88,06%
391	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sukamulia	99	0	0,00	86,17%
392	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Pagar Merbau I	31	0	0,00	87,36%
393	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sumberejo	239	0	0,00	84,45%
394	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sukamandi Hulu	45	0	0,00	84,14%
TOTAL				69.160	380	0,45	86,78%

(Sumber: Bappedalitbang Deli Serdang 2025)

Keterangan tabel diatas menjelaskan semua desa/kelurahan sudah terpetakan kondisi stunting tahun 2023, dimana jumlah balita stunting sebesar 380 anak dan keluarga resiko stunting sebesar 69.160 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi stunting di Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 sudah sangat sedikit sebesar 380 balita (0,45%) dibandingkan jumlah semua anak balita di Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 sebesar 107.673 anak balita. Kemudian jumlah desa/kelurahan yang masih ada balita *stunting* sebanyak 129 desa/kelurahan dan lokasi tersebut menjadi fokus analisis situasi dalam penentuan calon lokus stunting tahun 2024 dan tahun 2025. Kondisi layanan kegiatan stunting tahun 2023 mencapai rata-rata 86,78% berdasarkan indikator Perpres 72 tahun 2021, hal ini menjelaskan intervensi kegiatan stunting kepada semua desa/kelurahan sudah sangat baik dan menghasilkan penurunan jumlah balita stunting dari tahun 2023.

D. Penyusunan Rekomendasi Lokasi dan Program Prioritas Stunting

Tim pelaksana merumuskan lokasi prioritas *stunting* dan rekomendasi perbaikan alokasi anggaran program/kegiatan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Tim pelaksana memfasilitasi pembahasan rekomendasi lokasi dan program prioritas ini dengan semua lintas sektor. Pembahasan dengan sektor-sektor tersebut bertujuan untuk menginformasikan hasil analisis situasi dan menyepakati rekomendasi rencana lokasi dan program prioritas kegiatan *stunting*.

Penetapan desa/kelurahan prioritas percepatan penurunan *stunting* dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan integrasi intervensi layanan yang lebih terarah sesuai isu dan kemendesakan permasalahan *stunting* yang dihadapi hingga di tingkat desa/kelurahan. Sehingga dukungan berbagai sumber daya dapat lebih efektif dan terkoordinasi dalam pembagian kewenangan pusat, daerah dan desa/kelurahan, baik pada tahun anggaran berjalan maupun rencana. Dengan demikian, maka penetapan desa/kelurahan prioritas

dilakukan setiap tahun. OPD terkait harus menyesuaikan uraian lokasi pada setiap sub-kegiatan dalam RKA yang mendukung penurunan *stunting* dengan menjelaskan nama desa/kelurahan prioritas tersebut.

Kriteria utama yang digunakan untuk menetapkan desa/kelurahan lokasi prioritas sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memiliki prevalensi *stunting* melebihi rata-rata;
2. Memiliki jumlah kasus *stunting* melebihi rata-rata;
3. Memiliki jumlah keluarga berisiko *stunting* melebihi rata-rata;
4. Memiliki lebih dari 50% indikator utama menunjukkan cakupan intervensi gizi tergolong kurang meskipun prevalensi *stunting* rendah.

Selanjutnya kabupaten menetapkan jumlah desa/kelurahan lokasi prioritas dengan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Melibatkan semua lintas OPD terkait dan hasil kesepakatan disahkan melalui berita acara hasil rapat;
2. Berdasarkan proporsi jumlah desa/kelurahan yang akan ditangani pada satu tahun mendatang dan tahun berjalan, karena sekaligus untuk kebutuhan pengawalan relokasi dan realokasi pada anggaran desa/kelurahan dan daerah pada tahun berjalan;
3. Berdasarkan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan intervensi di desa/kelurahan lokasi prioritas;
4. Mempertimbangkan irisan lokasi kemiskinan ekstrem serta program prioritas nasional dan daerah lainnya yang terkait;
5. Mengakumulasi daftar nama desa/kelurahan lokasi prioritas tahun sebelumnya dengan mempertimbangan status perkembangan angka dan prevalensi *stunting* serta jumlah keluarga berisiko *stunting* sekurang-kurangnya dalam 2 tahun terakhir;

6. Daftar nama desa/kelurahan yang menjadi lampiran SK Bupati/Walikota tentang penetapan desa/kelurahan prioritas harus sama dengan yang termuat dalam berita acara hasil rapat lintas OPD.

Berdasarkan hasil analisis sebaran kasus dan prevalensi *stunting*, sebaran keluarga berisiko *stunting*, serta analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan, Tim Pelaksana menyusun daftar lokasi prioritas intervensi penurunan *stunting* terintegrasi (lokus *stunting*). Penetapan desa/kelurahan lokasi prioritas percepatan penurunan *stunting* berdasarkan berita acara hasil rapat yang melibatkan semua lintas OPD yang kemudian diputuskan melalui surat keputusan kepala daerah selambatnya sebelum pengesahan RKPD tahun rencana.

Analisis atas data *stunting*, keluarga berisiko *stunting* dan data capaian cakupan layanan dalam form Master Analisis Situasi dilakukan dengan mencermati kriteria pewarnaan secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan ketentuan kriteria calon prioritas lokasi *stunting* maka didapatkan 20 desa/kelurahan yang terpenuhi syarat menjadi desa/kelurahan lokus *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan tahun 2025. Kemudian calon desa/kelurahan lokus *stunting* dibuatkan berita acara dan penetapan Bupati Deli Serdang tahun 2024 dan tahun 2025. Berikut daftar desa/kelurahan calon lokus *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025 :

Tabel 4. 4 Daftar calon lokasi desa prioritas intervensi *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan tahun 2025

No	LOKASI			STUNTING			INDIKATOR CAKUPAN												
	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi Stunting	REMAJA		CALON PENGANTIN/PASANGAN USIA SUBUR							IBU HAMIL			
							Remaja Putri konsumsi TTD	Remaja putri menerima pemeriksaan status anemia	Catin Konsumsi TTD	Calon PUS memperoleh pemeriksaan kesehatan	Calon PUS menerima pendampingan kesehatan reproduksi	Catin mendapatkan bimbingan perkawinan	PUS yang menerima bantuan tunai bersyarat	PUS yang menerima BPNT	PUS menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Bumil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Bumil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan
1	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Ujung Serdang	494	6	2,73	89,71	82,00	100,00	82,00	80,00	96,00	100,00	100,00	93,67	100,00	100,00	10,00	NA
2	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Wono Sari	515	6	0,85	81,00	76,80	82,60	94,10	85,00	87,60	100,00	100,00	84,68	100,00	95,20	11,00	NA
3	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Dalu 10 A	520	4	0,70	86,80	80,40	89,20	91,20	100,00	92,10	100,00	100,00	85,82	100,00	93,10	10,00	NA
4	PATUMBAK	PATUMBAK	Marindal Satu	2011	5	0,52	83,70	84,00	66,20	66,20	95,00	63,80	100,00	100,00	76,75	100,00	100,00	10,80	0,00
5	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Sei Mencirim	670	10	0,96	73,00	57,00	100,00	100,00	91,00	100,00	100,00	100,00	75,51	100,00	99,30	10,00	2,00
6	SUNGGAL	MULYOREJO	Mulyorejo	716	14	1,25	72,00	53,00	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	84,87	100,00	100,00	10,00	0,00
7	SUNGGAL	MULYOREJO	Purwodadi	1416	11	1,28	69,00	55,00	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	80,83	100,00	100,00	10,00	1,00
8	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Paya Bakung	648	6	0,64	83,40	81,50	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	81,59	100,00	96,00	8,30	NA
9	LABUHAN DELI	LABUHAN DELI	Manunggal	653	6	0,52	81,00	97,00	69,00	40,00	100,00	67,00	100,00	100,00	81,76	100,00	90,63	7,53	NA
10	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Paluh Sibaji	491	7	4,46	100,00	78,00	84,00	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,01	100,00	100,00	10,87	3,00
11	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Sekip	516	7	1,08	88,50	64,00	84,00	82,00	90,00	84,00	100,00	100,00	78,77	100,00	95,00	3,64	2,00
12	LABUHAN DELI	LABUHAN DELI	Helvetia	433	20	2,11	80,00	85,00	65,00	40,00	100,00	70,00	100,00	100,00	88,52	100,00	90,00	9,70	NA
13	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Cinta Damai	208	4	1,01	90,00	50,00	68,00	70,00	95,00	60,00	100,00	100,00	85,94	100,00	100,00	10,00	2,00
14	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Tanjung Sari	357	4	0,84	80,00	50,00	77,00	76,00	95,00	70,00	100,00	100,00	76,02	100,00	100,00	9,20	NA
15	LUBUK PAKAM	PAGAR JATI	Cemara	265	7	2,06	81,20	52,00	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	97,02	100,00	78,50	14,50	2,00
16	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Bangun Sari Baru	452	3	0,91	81,40	71,50	92,40	89,80	80,00	60,00	100,00	100,00	85,01	100,00	97,40	10,00	NA
17	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Dalu 10 B	417	3	0,60	84,20	78,30	91,30	89,90	90,00	94,60	100,00	100,00	82,97	100,00	93,40	10,00	NA
18	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Sei Beras Sekata	387	2	0,55	86,00	52,00	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	91,12	100,00	100,00	10,00	0,00
19	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Paluh Kemiri	220	1	1,25	80,20	74,00	74,00	84,00	90,00	74,00	100,00	100,00	93,08	100,00	95,00	13,77	2,00
20	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sidoarjo Satu Jatibaru	186	2	1,13	69,00	77,90	82,00	70,00	90,00	76,00	100,00	100,00	92,59	100,00	100,00	10,50	NA

No	LOKASI			INDIKATOR CAKUPAN															
				ANAK DI BAWAH USIA LIMA TAHUN (BALITA)						KELUARGA BERISIKO						AIR MINUM & SANITASI		PERLINDUNGAN SOSIAL	
	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Bayi mendapat ASI eksklusif	Anak mendapat MP-ASI	Balita gizi buruk mendapatpe layanan tata laksana gizi buruk	Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan gannya	Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap	Keluarga yang Stop BABS	Keluarga yang melaksana kan PHBS	Keluarga berisiko stunting mendapatka n promosi konsumsi ikan	Pelayanan KB pasca persalinan	Keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan	Keluarga berisiko stunting mendapatka n manfaat Pekarangan	Rumah tangga mendapat kan akses air minum layak	Rumah tangga mendapat kan akses sanitasi layak	KPM PKH mengikuti P2K2	KPM bumil susui baduta menerima variasi bantuan pangan selain ber
1	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	Ujung Serdang	50,40	100,00	100,00	96,00	100,00	97,00	100,00	80,60	100,00	80,00	100,00	100,00	NA	87,50	100,00	100,00
2	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Wono Sari	40,20	100,00	100,00	84,20	100,00	97,20	100,00	62,00	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00	98,00	100,00	100,00
3	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Dalu 10 A	45,10	100,00	100,00	84,10	100,00	97,50	100,00	60,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	98,88	100,00	100,00
4	PATUMBAK	PATUMBAK	Marindal Satu	35,48	80,00	100,00	85,16	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	89,23	100,00	100,00
5	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Sei Mencirim	35,00	100,00	100,00	73,80	100,00	82,50	100,00	65,00	100,00	90,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00
6	SUNGGAL	MULYOREJO	Mulyorejo	34,00	100,00	100,00	82,70	100,00	70,60	100,00	62,30	100,00	90,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00
7	SUNGGAL	MULYOREJO	Purwodadi	40,00	100,00	100,00	82,50	100,00	74,40	100,00	61,40	100,00	90,00	100,00	100,00	NA	97,11	100,00	100,00
8	HAMPARAN PERAK	HAMPARAN PERAK	Paya Bakung	37,71	100,00	100,00	88,83	100,00	77,50	100,00	60,00	100,00	85,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00
9	LABUHAN DELI	LABUHAN DELI	Manunggal	40,00	100,00	100,00	83,00	100,00	75,50	100,00	87,00	100,00	82,00	100,00	100,00	NA	89,13	100,00	100,00
10	PANTAI LABU	PANTAI LABU	Paluh Sibaji	36,54	100,00	100,00	91,29	100,00	91,00	100,00	70,50	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Sekip	30,80	100,00	100,00	60,10	100,00	99,50	100,00	82,90	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	95,18	100,00	100,00
12	LABUHAN DELI	LABUHAN DELI	Helvetia	39,05	100,00	100,00	86,30	100,00	73,20	100,00	81,00	100,00	81,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00
13	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	Cinta Damai	51,00	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	70,00	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00	71,54	100,00	100,00
14	BATANG KUIS	BATANG KUIS	Tanjung Sari	45,00	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	68,00	100,00	85,00	100,00	100,00	NA	73,70	100,00	100,00
15	LUBUK PAKAM	PAGAR JATI	Cemara	42,50	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00	66,40	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	80,32	100,00	100,00
16	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Bangun Sari Baru	37,50	100,00	100,00	85,20	100,00	96,20	100,00	68,00	100,00	88,00	100,00	100,00	NA	99,09	100,00	100,00
17	TANJUNG MORAWA	DALU SEPULUH	Dalu 10 B	43,70	100,00	100,00	83,20	100,00	96,80	100,00	65,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	93,96	100,00	100,00
18	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	Sei Beras Sekata	43,00	100,00	100,00	85,30	100,00	85,50	100,00	54,00	100,00	90,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00
19	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM	Paluh Kemiri	44,40	83,00	100,00	76,20	100,00	100,00	83,00	86,50	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	71,42	100,00	100,00
20	PAGAR MERBAU	BANDAR DOLOK	Sidoarjo Satu Jatibaru	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,00	100,00	62,00	100,00	80,00	100,00	100,00	NA	89,96	100,00	100,00

Kategorisasi warna master analisis situasi :

Keluarga Berisiko Stunting Sangat Tinggi	Keluarga Berisiko Stunting Tinggi	Keluarga Berisiko Stunting Rendah	Keluarga Berisiko Stunting sangat rendah
Kasus Stunting Sangat Tinggi	Kasus Stunting Tinggi	Kasus stunting rendah	Kasus stunting sangat rendah
Prevalensi Stunting Sangat Tinggi	Prevalensi Stunting Tinggi	Prevalensi stunting rendah	Prevalensi stunting sangat rendah
Cakupan Sangat Rendah	Cakupan Rendah	Cakupan Hampir memadai	Cakupan memadai

(Sumber: Bappedalitbang Deli Serdang 2025)

Keterangan tabel diatas menjelaskan jumlah desa/kelurahan yang memenuhi rekomendasi lokasi dan program prioritas stunting berdasarkan formulasi master analisis situasi sebanyak 20 desa/kelurahan, dimana lokasi tersebut terpenuhi tingginya jumlah balita stunting, tingginya persentase prevelensi stunting, tingginya jumlah keluarga resiko stunting dan rendahnya rata-rata cakupan layanan kegiatan stunting tahun 2023. Kemudian 20 desa/kelurahan ini akan menjadi pembahasan di forum OPD untuk ditetapkan menjadi calon lokus stunting tahun 2024 dan tahun 2025.

4.1.1.2 Ketersediaan Program Kegiatan dan Kesenjangan Cakupan Layanan

A. Pemetaan Program Kegiatan Stunting

Untuk memperkuat peninjauan atau hasil analisis sebelumnya perlu dilakukan pemetaan program/kegiatan dan pembiayaan yang mendukung penurunan *stunting* dalam APBD tahun berjalan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemetaan program/kegiatan waktu idealnya dilaksanakan sebelum bulan Januari sejak APBD ditetapkan tetapi di Kabupaten Deli Serdang pelaksanaannya dilaksanakan bersamaan dengan pada pelaksanaan analisis situasi tahun 2024 (Januari sampai Februari 2024) dengan melibatkan semua OPD terkait pengampu kegiatan intervensi *stunting*. Pada tahapan ini, pemetaan program dilakukan melalui penandaan (tagging) sub-sub kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) APBD tahun 2024 yang mendukung penurunan *stunting*, lalu disinkronkan dengan kode program/kegiatan sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

Hasil pemetaan tersebut pada tahapan selanjutnya disandingkan dengan capaian setiap indikator cakupan layanan kegiatan. Untuk itu maka hasil pemetaan program dapat menunjang pelaksanaan analisis situasi dan perencanaan program kegiatan, antara lain:

1. Memperkuat analisis dan penajaman rekomendasi hasil analisa situasi;

2. Mengetahui konvergensi program, kegiatan dan pembiayaan pada tingkat kabupaten sampai desa/kelurahan;
3. Mengetahui jenis intervensi *stunting* pada tingkat kabupaten sampai desa/kelurahan;
4. Hasil pemetaan program, kegiatan dan pembiayaan dapat mendukung penyusunan perencanaan program kegiatan *stunting* tahun selanjutnya;

Informasi tentang pemetaan program/kegiatan, cakupan, dan prevalensi (jumlah dan kasus) sebaran *stunting* sangat diperlukan dalam proses analisis situasi dan menentukan lokasi prioritas di Kabupaten Deli Serdang. Pemetaan program/kegiatan sekaligus dapat mengidentifikasi jenis dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Cakupan intervensi *stunting* perlu dikaji untuk menilai cakupan pelaksanaan program/kegiatan.

Maka hubungan hasil analisis faktor penyebab kesenjangan dan hasil pemetaan program sangat relevan. Perancangan rekomendasi perlu dikaitkan dengan hasil pemetaan program untuk menunjukkan apakah rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan melalui program/kegiatan eksisting atau yang sudah dianggarkan pada tahun berjalan atau memerlukan program/kegiatan baru pada anggaran perubahan tahun berjalan, atau program/kegiatan dengan anggaran tahun berikutnya (tahun rencana). Berikut hasil pemetaan program kegiatan *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 (tahun berjalan):

Tabel 4. 5 Hasil pemetaan program kegiatan *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024

NO	INDIKATOR PERPRES 72/2021	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD/PENANGGUNG JAWAB
1	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	82.000.000	APBD	BAPELITBANGDA
2	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	550.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
3	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15.435.300	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
4	Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	3.263.700.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
5	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	250.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
6	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan	67.360.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
7	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	80.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
8	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	2.967.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
9	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	393.750.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
10	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	1.182.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
11	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	98.000.280.000	APBD	DINAS KESEHATAN
12	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	19.448.900	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
13	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	151.396.000	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
14	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	122.566.900	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
15	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	49.500.000	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
16	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	107.091.738	DAU	DINAS KESEHATAN
17	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	31.902.540	DAU	DINAS KESEHATAN
18	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	282.906.845	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN
19	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	67.638.759	APBD	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
20	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	76.158.860	APBD	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
21	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	456.750.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	11.615.078.000	DAK NON-FISIK	DINAS PU / CIPTA KARYA
23	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	55.960.740.536	DANA LAINNYA	DINAS PU / CIPTA KARYA
24	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	995.101.356	APBD	DINAS SOSIAL
25	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
26	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA

NO	INDIKATOR PERPRES 72/2021	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD/PENANGGUNG JAWAB
27	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
28	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
29	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
30	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
31	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
32	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
33	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
34	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
35	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
36	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	74.000.000	APBD	LAINNYA
37	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	74.000.000	APBD	LAINNYA
38	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	74.000.000	APBD	LAINNYA
39	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	624.319.851	CSR	LAINNYA
40	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	141.412.000	DANA LAINNYA	LAINNYA
41	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	225.860.000	DANA LAINNYA	LAINNYA
42	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	58.640.000	DANA LAINNYA	LAINNYA
43	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	34.085.000	DANA LAINNYA	LAINNYA
44	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	41.070.000	DANA LAINNYA	LAINNYA
45	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	41.070.000	DANA LAINNYA	LAINNYA
TOTAL ANGGARAN		179.386.262.585		

(Sumber: Bappedalitbang Deli Serdang 2025)

Keterangan tabel diatas menjelaskan program kegiatan stunting yang sudah ditetapkan melalui APBD tahun 2024 sebanyak 45 program kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 179.386.262.585,- yang sudah terpetakan dari setiap OPD penanggung jawab kegiatan untuk intervensi *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Hasil pemetaan program ini nantinya menjadi pertimbangan untuk menentukan rekomendasi kelanjutan intervensi stunting tahun 2024, apakah perlu APBD perubahan atau dilanjutkan intervensi stunting dengan ketersediaan program kegiatan yang sudah ada.

B. Tindaklanjut Hasil Analisis Ketersediaan Program Kegiatan Stunting

Setelah diidentifikasi data pemetaan program/kegiatan tahun berjalan terkait penurunan *stunting*, Tim pelaksana akan menyandingkannya dengan capaian setiap indikator cakupan layanan. Tujuannya untuk mengetahui:

1. Ketersediaan (ada/tidaknya) program/kegiatan untuk setiap intervensi gizi spesifik dan sensitif;
2. Ketersediaan (ada/tidaknya) program/kegiatan penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Daftar desa/kelurahan prioritas *stunting* berdasarkan kelengkapan program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif yang didapat.

Dukungan pembiayaan diklasifikasi berdasarkan sumber APBN, APBD dan APBDes. Sumber pembiayaan APBN berupa kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sumber pembiayaan APBD berupa APBD Murni, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil pelaksanaan kegiatan ini memutuskan semua indikator kegiatan sudah tersedia program kegiatan *stunting* di lokasi prioritas dan akan dilanjutkan rencana

intervensi pada tahun berikutnya. Berikut hasil analisis ketersediaan program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024:

Tabel 4. 6 Hasil analisis ketersediaan program kegiatan *stunting*

No	Intervensi	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat Ini Skala Kab/Kota	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat Ini Desa/Kel Fokus	Ada program/kegiatan tahun berjalan yang berlokasi di desa focus	Tahun Berjalan (sama dengan tahun pelaksanaan analisis situasi)	Tahun Rencana (satu tahun pasca pelaksanaan analisis situasi)
1	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	86	86	Ada	Ya	Ya
2	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	64	64	Ada	Ya	Ya
3	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	88	88	Ada	Ya	Ya
4	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	87	87	Ada	Ya	Ya
5	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	93	93	Ada	Ya	Ya
6	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>	88	88	Ada	Ya	Ya
7	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	100	100	Ada	Ya	Ya
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	100	100	Ada	Ya	Ya
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90	90	Ada	Ya	Ya
10	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100	100	Ada	Ya	Ya
11	Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	95	95	Ada	Ya	Ya
12	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	9	9	Ada	Ya	Ya
13	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	1	1	Ada	Ya	Ya
14	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	42	42	Ada	Ya	Ya
15	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	98	98	Ada	Ya	Ya
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100	100	Ada	Ya	Ya
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	88	88	Ada	Ya	Ya
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	100	100	Ada	Ya	Ya
19	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	91	91	Ada	Ya	Ya
20	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	100	100	Ada	Ya	Ya
21	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	69	69	Ada	Ya	Ya
22	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	0	0	Ada	Ya	Ya

No	Intervensi	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat Ini Skala Kab/Kota	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat Ini Desa/Kel Fokus	Ada program/kegiatan tahun berjalan yang berlokasi di desa focus	Tahun Berjalan (sama dengan tahun pelaksanaan analisis situasi)	Tahun Rencana (satu tahun pasca pelaksanaan analisis situasi)
23	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	87	87	Ada	Ya	Ya
24	Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	100	100	Ada	Ya	Ya
25	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	0	0	Ada	Ya	Ya
26	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	93	93	Ada	Ya	Ya
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	87	87	Ada	Ya	Ya
28	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	100	100	Ada	Ya	Ya
29	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	100	100	Ada	Ya	Ya
30	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
31	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	0	0	Ada	Ya	Ya
32	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	0	0	Ada	Ya	Ya
33	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	0	0	Ada	Ya	Ya
34	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	0	0	Ada	Ya	Ya
35	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan	0	0	Ada	Ya	Ya
36	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
37	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	Ada	Ya	Ya
38	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	0	0	Ada	Ya	Ya
39	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
40	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	0	0	Ada	Ya	Ya
41	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	0	0	Ada	Ya	Ya
42	Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota	0	0	Ada	Ya	Ya
43	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	0	0	Ada	Ya	Ya
44	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
45	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	0	0	Ada	Ya	Ya

No	Intervensi	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat Ini Skala Kab/Kota	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat Ini Desa/Kel Fokus	Ada program/kegiatan tahun berjalan yang berlokasi di desa focus	Tahun Berjalan (sama dengan tahun pelaksanaan analisis situasi)	Tahun Rencana (satu tahun pasca pelaksanaan analisis situasi)
46	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
47	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Ada	Ya	Ya
48	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan	0	0	Ada	Ya	Ya
49	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
50	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
51	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	0	0	Ada	Ya	Ya
52	Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
53	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
54	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
55	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	0	0	Ada	Ya	Ya
56	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	0	0	Ada	Ya	Ya
57	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	0	0	Ada	Ya	Ya
58	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	0	0	Ada	Ya	Ya
59	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	0	0	Ada	Ya	Ya
60	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	0	0	Ada	Ya	Ya
61	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	0	0	Ada	Ya	Ya
62	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	0	0	Ada	Ya	Ya
63	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	0	0	Ada	Ya	Ya
64	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	0	0	Ada	Ya	Ya

(Sumber: Bappedalitbang Deli Serdang 2025)

Keterangan tabel diatas menjelaskan hasil pemetaan program kegiatan stunting tahun 2024 sudah disandingkan dengan kesenjangan cakupan layanan stunting dan hasilnya semua indikator program kegiatan yang masih rendah tersedia program kegiatan stunting di APBD tahun 2024 dan direkomendasikan dilanjutkan intervensi kegiatan stunting tahun 2024 melalui APBD yang tersedia tahun 2024. Kemudian hasil program kegiatan tahun 2024 ini menjadi rujukan OPD penanggungjawab kegiatan stunting untuk melanjutkan rencana program kegiatan tahun 2025 (tahun rencana).

4.1.1.3 Penyampaian Layanan pada Sasaran Prioritas *Stunting*

A. Penyampaian Layanan pada 5 (lima) Kelompok Sasaran Stunting

Pelaksanaan ini dilakukan untuk mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan intervensi layanan *stunting* pada 5 (lima) kelompok sasaran (Remaja, Catin/Capus, Ibu hamil, Ibu menyusui dan Balita) prioritas *stunting*. Tujuannya antara lain:

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam manajemen layanan yang menyebabkan layanan tidak dapat diakses oleh 5 (lima) kelompok sasaran;
2. Merumuskan rekomendasi tindakan perbaikan manajemen layanan agar dapat tersedia dan mampu diakses oleh 5 (lima) kelompok sasaran;
3. Memastikan penggunaan data 5 (lima) kelompok sasaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan layanan;
4. Data 5 (lima) kelompok sasaran akan dikelola oleh KPM, Sub PPKBD, TP PKK, Bidan Desa/petugas kesehatan, serta Kader Desa/Kelurahan lainnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif perlu dianalisis. Tim pelaksana memprioritaskan analisis pada penyampaian layanan kunci

pada 5 (lima) kelompok sasaran dan beberapa layanan lainnya berdasarkan kriteria yang disepakati bersama OPD.

Data yang dibutuhkan terdiri dari:

1. Cakupan layanan;
2. Gambaran umum proses penyelenggaraan layanan;
3. Daftar OPD yang berkontribusi dalam penyediaan layanan.

Berapa kriteria layanan yang perlu di analisis:

1. Alokasi pendanaan program/kegiatan yang dominan untuk penyediaan layanan;
2. Lokasi pelaksanaan program kegiatan ada di sebagian besar wilayah kabupaten/kota;
3. Cakupan layanan rendah;
4. Cakupan layanan tinggi pada wilayah dengan prevalensi *stunting* tinggi;
5. Layanan dari intervensi gizi yang target penerima manfaatnya masyarakat umum;
6. Layanan yang dirancang untuk menjangkau 5 (lima) kelompok sasaran namun cakupannya masih rendah.

B. Rekomendasi Kebutuhan Perbaikan Layanan Kegiatan Stunting

Tim pelaksana merumuskan rekomendasi perbaikan manajemen yang perlu diprioritaskan untuk memastikan 5 (lima) kelompok sasaran (Remaja, Catin/Capus, Ibu hamil, Ibu menyusui dan Balita) menjadi target penerima manfaat layanan, baik melalui proses manajemen layanan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) maupun melalui penyampaian layanan oleh para petugas.

Rekomendasi tersebut harus difokuskan pada upaya perbaikan manajemen pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Tim teknis memfasilitasi pembahasan rekomendasi perbaikan ini dengan sektor-sektor yang terlibat untuk mengkonfirmasi temuan analisis situasi dan menyepakati rekomendasi perbaikan manajemen layanan.

Rekomendasi ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Mekanisme penyediaan/pemutakhiran data/informasi dan pemanfaatan data 5 (lima) kelompok sasaran untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyampaian layanan;
2. Penyesuaian instrumen dan proses dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan layanan atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penyampaian layanan untuk menasar pada 5 (lima) kelompok sasaran;
3. Mekanisme pemantauan peningkatan cakupan layanan pada 5 (lima) kelompok sasaran;
4. Kegiatan terkait perubahan perilaku keluarga sasaran yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Hasil identifikasi masalah/kendala dan rekomendasi kebutuhan perbaikan layanan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Kendala/masalah dan rekomendasi perbaikan layanan

NO	Masalah / Kendala	Rekomendasi
101. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)		
1	Tidak ada kendala	Kegiatan tetap dilaksanakan di tahun berjalan dan Rencana
102. Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)		
1	Tidak ada kendala	kegiatan tetap dilaksanakan tahun berjalan dan tahun rencana
103. Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)		
1	Tidak ada kendala	kegiatan tetap dilaksanakan tahun berjalan dan tahun rencana
104. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah		
1	Tidak ada kendala	-
105. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah		
1	Tidak ada kendala	-
106. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting		
1	Tidak ada kendala	-
107. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat		
108. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai		
109. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan		
110. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi		
111. Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan		
112. Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana		
1	Tidak ada kendala	-
113. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan		
1	Tidak ada kendala	-
114. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif		
1	Tidak ada kendala	-
115. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)		
1	Tidak ada kendala	-
116. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk		
1	Tidak ada kendala	-
117. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya		
1	Tidak ada kendala	-

NO	Masalah / Kendala	Rekomendasi
118.	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	
1	Tidak ada kendala	-
119.	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	
1	Tidak ada kendala	-
120.	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	
1	Tidak ada kendala	-
121.	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
1	Tidak ada kendala	-
122.	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	
1	Tidak ada kendala	-
123.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	
1	Tidak ada kendala	-
124.	Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	
1	Tidak ada kendala	-
125.	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	
1	Tidak ada kendala	-
126.	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	
1	Tidak ada kendala	-
127.	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	
1	Tidak ada kendala	-
128.	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	
1	Tidak ada kendala	-
129.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	
1	Tidak ada kendala	-
130.	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	
1	Tidak ada kendala	-
131.	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	
1	Tidak ada kendala	-
132.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	
1	Tidak ada kendala	-
133.	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	
1	Tidak ada kendala	-
134.	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	
1	Tidak ada kendala	-
135.	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan	
1	Tidak ada kendala	-
136.	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	
1	Tidak ada kendala	-
137.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	
1	Tidak ada kendala	-
138.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	
1	Tidak ada kendala	-
139.	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	
1	Tidak ada kendala	-
140.	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	
1	Tidak ada kendala	Kegiatan tetap dilaksanakan di tahun berjalan dan Rencana
141.	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	
1	Tidak ada kendala	Kegiatan tetap dilaksanakan di tahun berjalan dan Rencana
142.	Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota	
1	Tidak ada kendala	Kegiatan tetap dilaksanakan di tahun berjalan dan Rencana
143.	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	
1	Tidak ada kendala	Kegiatan tetap dilaksanakan di tahun berjalan dan Rencana
144.	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	
1	Tidak ada kendala	Kegiatan tetap dilaksanakan di tahun berjalan dan Rencana
145.	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	
1	Tidak ada kendala	-
146.	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	
1	Tidak ada kendala	-
147.	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
1	Tidak ada kendala	-
148.	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan	
1	Tidak ada kendala	-
149.	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	
1	Tidak ada kendala	-
150.	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	
1	Tidak ada kendala	-
151.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	
1	Tidak ada kendala	-
152.	Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting	
1	Tidak ada kendala	-

NO	Masalah / Kendala	Rekomendasi
153.	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	
1	Tidak ada kendala	-
154.	Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	
1	Tidak ada kendala	-
155.	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	
1	Tidak ada kendala	-
156.	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	
1	Tidak ada kendala	-
157.	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	
1	Tidak ada kendala	-
158.	Terlaksanannya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	
1	Tidak ada kendala	-
159.	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	
1	Tidak ada kendala	-
160.	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	
1	Tidak ada kendala	kegiatan tetap dilaksanakan tahun berjalan dan tahun rencana
161.	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	
1	Tidak ada kendala	-
162.	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	
1	Tidak ada kendala	-
163.	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	
1	Tidak ada kendala	kegiatan tetap dilaksanakan tahun berjalan dan tahun rencana
164.	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	
1	Kabupaten Deli Serdang Tidak memiliki data terkait indikator ini	-

(Sumber: Bappedalitbang Deli Serdang 2025)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tidak ada kendala/masalah layanan kegiatan stunting yang dilaksanakan OPD penanggung jawab kegiatan yang menghambat kegiatan intervensi stunting tahun 2023 dan rata-rata cakupan layanan sebesar 86,78% sudah kategori sangat baik sehingga rekomendasi program kegiatan dilanjutkan untuk intervensi stunting tahun 2024 dan rencana program kegiatan tahun 2025 (tahun rencana).

4.1.1.4 Koordinasi Meningkatkan Konvergensi Intervensi bagi Sasaran Prioritas Stunting

Pelaksanaan ini untuk mengidentifikasi kebutuhan koordinasi dan rekomendasi penguatan koordinasi antar lembaga atau antar tingkatan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan integrasi layanan kegiatan *stunting*. Kegiatan ini meliputi :

1. Koordinasi di antara OPD-OPD penanggung jawab program/kegiatan.

Rekomendasi terkait dengan forum yang akan diperkuat untuk koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kemajuan program/kegiatan prioritas di tingkat

kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi, terutama di lokasi prioritas penurunan *stunting*.

2. Koordinasi upaya perbaikan penyampaian layanan dan komunikasi perubahan perilaku oleh penyedia layanan.

Rekomendasi terkait dengan forum yang perlu diperkuat untuk koordinasi teknis para penyedia layanan dan para pelaksana upaya perubahan perilaku 5 (lima) kelompok sasaran. Termasuk dalam hal ini koordinasi penyediaan/penambahan alokasi program/kegiatan bersumber APBN, APBD provinsi, koordinasi penetapan lokasi prioritas dari program- program yang dikelola OPD, dan koordinasi pemantauan kemajuan integrasi intervensi gizi.

3. Koordinasi antara kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Rekomendasi terkait dengan forum yang perlu diperkuat untuk koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kemajuan program/kegiatan prioritas dan penyampaian layanan untuk meningkatkan jumlah keluarga sasaran yang mengakses layanan secara serentak.

4.1.2 Deskripsi Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Kegiatan perencanaan program kegiatan *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Desember 2024 di Kantor Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjadi anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yaitu Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Kominfo, Dinas PPPA/PPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas CKTR dan Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan manajemen perencanaan program kegiatan adalah tindaklanjut pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi, dimana rencana ini berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi kegiatan dan meningkatkan integrasi intervensi kegiatan oleh kabupaten/kota dan desa/kelurahan pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang (tahun berikutnya) berdasarkan indikator kegiatan Perpres 72 tahun 2021, selanjutnya mengintegrasikan hasil rencana kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan tahun 2025. Tahapan manajemen perencanaan program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, antara lain:

4.1.2.1 Rancangan Rencana Kegiatan *Stunting*

Penyusunan rancangan rencana kegiatan dilaksanakan untuk tindaklanjut hasil analisis situasi yang sudah menetapkan lokus *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025, daftar layanan prioritas dilaksanakan intervensi *stunting* bagi kelompok sasaran prioritas, kendala/masalah dan rekomendasi perbaikan manajemen layanan serta rekomendasi koordinasi tingkat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan rencana program kegiatan tahun berjalan dan tahun rencana. langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Bappedalitbang bersama OPD terkait mereviu kembali rekomendasi hasil analisis situasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan guna merealisasikan setiap rekomendasi dan mengidentifikasi OPD pelaksana kegiatan. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Kegiatan untuk meningkatkan cakupan intervensi, meliputi 5 (lima) sasaran intervensi (Remaja, Catin/Capus, Ibu hamil, Ibu menyusui dan Balita);
 - b. Kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada lokasi prioritas.

Rumusan setiap rekomendasi hasil Analisis Situasi ditindaklanjuti dengan penyusunan dukungan anggaran sesuai kewenangan pusat, daerah dan desa, baik berupa rumusan dukungan anggaran yang telah tertuang dalam APBD tahun berjalan, maupun yang dapat diusulkan pada 1 (satu) tahun rencana. Hasil identifikasi program/kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan daerah tahun anggaran berjalan dan tahun rencana diselaraskan dengan seluruh indikator data cakupan layanan esensial dan layanan supply, untuk meninjau implementasi atas setiap indikator lampiran perpres 72 tahun 2021.

Proses identifikasi tersebut dengan memilah sub-sub kegiatan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang paling relevan terhadap upaya penurunan *stunting* pada setiap program/kegiatan dalam dokumen APBD tahun berjalan serta RKPD tahun rencana. Setiap sub-sub kegiatan dimaksud diselaraskan dengan kode nomenklatur program/kegiatan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Masing-masing OPD terkait mereviu dokumen perencanaan yang ada untuk mengidentifikasi apakah kegiatan yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil analisis situasi telah termuat dalam dokumen perencanaan yang ada dan kemungkinan perlunya penyesuaian target kinerja, lokasi prioritas, perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran.
3. Masing-masing OPD terkait mereviu hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan; hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan digunakan untuk verifikasi kebutuhan di tingkat desa/kelurahan dan penajaman kegiatan untuk desa/kelurahan prioritas. Selain itu, dapat dipetakan kegiatan apa saja yang dapat dilimpahkan kewenangannya ke tingkat desa.

4. Masing-masing OPD terkait memetakan berbagai opsi sumber pendanaan untuk membiayai program/kegiatan penyediaan intervensi dan kegiatan peningkatan integrasi.
5. Identifikasi kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Seperti halnya dukungan kegiatan percepatan penurunan *stunting* berupa program-program yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, CSR, NGO, kelompok masyarakat.

Berikut hasil rancangan rencana program kegiatan *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024:

Tabel 4. 8 Perencanaan Program Kegiatan *Stunting* Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

NO	INDIKATOR PERPRES 72/2021	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD/PENANGGUNG JAWAB
1	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	90.200.000	APBD	BAPELITBANGDA
2	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	605.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
3	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	16.978.830	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
4	Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	3.590.070.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
5	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	275.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
6	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan	74.096.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
7	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	96.800.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
8	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	3.263.700.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
9	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	433.125.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
10	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	1.300.200.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
11	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	DINAS KB
12	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	41.070.000	DANA LAINNYA	DINAS KB
13	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	98.000.280.000	APBD	DINAS KESEHATAN
14	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	21.393.790	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
15	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	166.535.600	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR PERPRES 72/2021	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD/PENANGGUNG JAWAB
16	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	148.305.949	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
17	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	59.895.000	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
18	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	129.581.002	DAU	DINAS KESEHATAN
19	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	38.602.073	DAU	DINAS KESEHATAN
20	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	282.906.845	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN
21	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	74.402.634	APBD	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	502.425.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
23	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	83.774.746	APBD	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
24	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	61.556.814.590	DAK NON-FISIK	DINAS PU / CIPTA KARYA
25	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	17.125.895.690	DAK NON-FISIK	DINAS PU / CIPTA KARYA
26	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	550.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
27	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
28	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
29	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
30	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
31	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
32	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
33	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	0	APBD	LAINNYA
34	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
35	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
36	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA

NO	INDIKATOR PERPRES 72/2021	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD/PENANGGUNG JAWAB
37	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	110.000.000	APBD	LAINNYA
38	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	74.000.000	APBD	LAINNYA
39	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	74.000.000	APBD	LAINNYA
40	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	74.000.000	APBD	LAINNYA
41	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	40.590.000	DAK NON-FISIK	LAINNYA
42	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	25.830.000	DANA LAINNYA	LAINNYA
43	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	34.085.000	DANA LAINNYA	LAINNYA
TOTAL ANGGARAN		190.059.557.749		

(Sumber: Bappedalitbang Deli Serdang 2025)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tindaklanjut hasil analisis situasi menjadi rencana program kegiatan stunting tahun 2025 (tahun rencana). Program kegiatan yang direncanakan sebanyak 43 program kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 190.059.557.749,- dari sumber APBD dan APBN (DAK dan DAU). Hal ini yang akan diupayakan menjadi pembahasan di forum perencanaan daerah dan integrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah.

4.1.2.2 Konfirmasi Kebutuhan Program Kegiatan *Stunting* di Musrenbang dan Rembuk *Stunting*

Pelaksanaan kegiatan ini untuk menyampaikan, diskusi dan menerima masukan dan saran dalam rancangan rencana program kegiatan *stunting* dari semua peserta musrenbang atau rembuk *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 yang sudah dilaksanakan tanggal 15 Februari 2025 di Aula Kantor Bupati Deli Serdang. Tahapan pelaksanaannya :

1. Bappedalitbang memaparkan rancangan rencana kegiatan dalam Musrenbang dan Rembuk *Stunting* untuk mendapatkan konfirmasi (terutama dari desa dan kecamatan) dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di wilayah kabupaten/kota.
2. OPD memberikan klarifikasi/konfirmasi yang diperlukan atas rancangan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Kesepakatan Musrenbang dan Rembuk *Stunting* atas rencana kegiatan pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi menjadi dasar finalisasi dan pengesahan rencana kegiatan.

4.1.2.3 Komitmen Hasil Rembuk *Stunting* Kabupaten Deli Serdang

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk menyepakati rancangan rencana program kegiatan *stunting* berdasarkan pembahasan di forum pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk tahun berjalan dan tahun rencana. Tahapan pelaksanaannya :

1. Jika pada Rembuk *Stunting* terdapat tambahan/masukan terhadap rancangan rencana kegiatan, tim penyusun melakukan revisi atas rancangan rencana kegiatan tersebut.
2. Rencana kegiatan yang telah difinalkan berdasarkan hasil Rembuk *Stunting* selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait.
3. OPD menggunakan rencana kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan intervensi gizi terintegrasi pada tahun berjalan ataupun dalam penyusunan Renja dan RKA OPD tahun rencana berikutnya.
4. Bappedalitbang dan OPD memastikan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK dan DAU) masuk dalam tahun rencana berikutnya.
5. Tahapan ini selaras dengan pelaksanaan Rembuk *Stunting* untuk memastikan hasil analisis situasi dan perencanaan program kegiatan merupakan bahan materi Rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten.

4.1.2.4 Kesepakatan Rencana Kegiatan *Stunting*

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk tindaklanjut kesepakatan finalisasi rancangan rencana program kegiatan *stunting* pada setiap OPD Kabupaten Deli Serdang kedalam dokumen rencana daerah. Tahapan pelaksanaannya :

1. Pengintegrasian bertujuan untuk memastikan komitmen lintas sektor dalam menuangkan program/kegiatan OPD hasil kesepakatan Rembuk *Stunting* ke dalam RKPD, Renja OPD sampai dengan RAPBD/RAPBD-P.
2. OPD mengidentifikasi kegiatan dalam rencana kegiatan yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.
3. TAPD mengintegrasikan rencana kegiatan tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yaitu RKPD, KUA – PPAS, RAPBD/RAPBD-P.

Jadwal pengintegrasian ini mengikuti jadwal penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD/RAPBD-P. Untuk mengetahui kemajuan proses integrasi ini, penanggung jawab dapat menggunakan:

1. Matriks kendali integrasi program/kegiatan tahun berjalan, yaitu matriks untuk mengetahui daftar program/kegiatan dalam rencana kegiatan yang masuk dalam APBD maupun yang diusulkan dalam RKPD Perubahan hingga disahkan dalam APBD Perubahan.
2. Matriks kendali integrasi program/kegiatan tahun rencana, yaitu matriks untuk mengetahui daftar program/kegiatan dalam rencana kegiatan yang masuk dalam RKPD, KUA PPAS hingga disahkan dalam APBD tahun rencana.

Tabel 4. 9 Matriks Kendali Integrasi Program/Kegiatan Tahun Rencana Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

NO	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025			
	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
1	TIDAK NOMENKLATUR	21.393.790	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	605.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
3	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16.978.830	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
4	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin / Calon PUS , Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	3.590.070.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
5	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	61.556.814.590	DAK NON-FISIK	DINAS PU / CIPTA KARYA
6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	17.125.895.690	DAK NON-FISIK	DINAS PU / CIPTA KARYA
7	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	550.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
8	Penyediaan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	282.906.845	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN
9	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	275.000.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
10	Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.200.000	APBD	BAPELITBANGDA
11	Pengendalian Program KKBPK	74.096.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.535.600	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	148.305.949	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129.581.002	DAU	DINAS KESEHATAN
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38.602.073	DAU	DINAS KESEHATAN
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	59.895.000	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN
17	Pengendalian Program KKBPK	96.800.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
18	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40.590.000	DAK NON-FISIK	LAINNYA
19	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
20	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
22	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
23	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	DINAS KB
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
25	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
26	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	APBD	LAINNYA
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
29	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
30	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	110.000.000	APBD	LAINNYA
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	74.000.000	APBD	LAINNYA
32	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	74.000.000	APBD	LAINNYA
33	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	74.000.000	APBD	LAINNYA
34	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	98.000.280.000	APBD	DINAS KESEHATAN
35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	74.402.634	APBD	DINAS PENDIDIKAN
36	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	502.425.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
37	1.02.02.2.03.11	83.774.746	APBD	DINAS PENDIDIKAN
38	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS , Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	3.263.700.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
39	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	433.125.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
40	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	1.300.200.000	DAK NON-FISIK	BKKBN/DINAS KB
TOTAL ANGGARAN		189.958.572.749		

(Sumber: Bappedalitbang Deli Serdang 2025)

Keterangan tabel diatas dijelaskan hasil kesepakatan rencana program kegiatan stunting di integrasikan kedalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah (Renja, RKPD, KUA PPAS dan APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025. Total program kegiatan stunting ditetapkan sebanyak 40 program kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 189.958.572.749,- dari sumber dana APBD dan APBN (DAK dan DAU).

4.1.3 Analisis Hasil Analisis Situasi dalam Percepatan Penurunan Stunting Kab. Deli Serdang Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Hasil analisis situasi program percepatan penurunan *stunting* merupakan proses untuk mengidentifikasi sebaran prevelensi *stunting*, keluarga resiko *stunting*, situasi ketersediaan program dan praktek manajemen layanan saat ini serta untuk memahami permasalahan integrasi intervensi *stunting* pada sasaran prioritas di wilayah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sesuai indikator Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 (tabel 4.3). Proses ini sebagai dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi *stunting* bagi kelompok sasaran prioritas. Integrasi intervensi gizi yang dimaksud adalah program kegiatan untuk menyediakan intervensi gizi prioritas yang dibutuhkan kelompok sasaran *stunting*, seperti program kesehatan, program gizi, program keluarga sehat, program pendidikan, program lingkungan sehat, perlindungan sosial dan ketahanan pangan.

Berdasarkan pelaksanaan analisis situasi yang sudah dilakukan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, maka ruang lingkup yang dihasilkan adalah:

4.1.3.1 Analisis Sebaran Sasaran Prioritas Stunting dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024

Pelaksanaan pertemuan awal analisis situasi, penyusunan sebaran *stunting*, sebaran keluarga resiko *stunting* dan capaian cakupan layanan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 (Tabel 4.4), dapat di analisis sebagai berikut:

1. Semua kebutuhan data sebaran *stunting*, keluarga resiko *stunting* dan cakupan layanan tersedia lengkap dari semua OPD penanggungjawab kegiatan.
2. Tim pelaksana menyusun data tersebut kedalam format master analisis situasi, agar dapat membentuk kategorisasi warna dan penentuan lokasi prioritas serta layanan prioritas *stunting*.
3. Hasil analisis situasi sebaran *stunting* berdasarkan pengukuran dan penimbangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 angka prevelensi *stunting* sebesar 0,45% (sebanyak 380 anak *stunting* dari total 69.160 anak balita) dan ini capaian yang sangat baik bila dibandingkan Perpres 72 tahun 2021 dengan target prevelensi stunting sebesar 14%.
4. Berdasarkan kategorisasi warna format master analisis situasi terdapat 39 desa/kelurahan kasus/jumlah *stunting* kategori merah (sangat tinggi) dan ini menjadi kriteria desa/kelurahan calon lokus *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025.
5. Kemudian desa/kelurahan keluarga resiko *stunting* yang kategori warna merah (sangat tinggi) sebanyak 38 desa/kelurahan dan ini menjadi kriteria desa/kelurahan calon lokus *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025.
6. Rata-rata capaian cakupan layanan kegiatan *stunting* Kabupaten Deli Serdang adalah 85% dan ini capaian yang sangat baik serta menggambarkan kondisi intervensi layanan *stunting* sudah terlaksana dengan baik kepada sasaran prioritas *stunting* dan pencapaian target indikator Perpres 72 tahun 2021.

7. Berdasarkan Kategori merah (sangat tinggi) sebaran balita *stunting*, keluarga resiko *stunting* dan capaian cakupan layanan serta kriteria penentuan calon prioritas daerah *stunting* maka dihasilkan 20 desa/kelurahan menjadi calon lokus prioritas intervensi *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025 (tabel 4.5).
8. Tetapi mempertimbangkan keberlanjutan intervensi dan target Perpres 72 tahun 2021 untuk pemerataan semua daerah pernah menjadi lokus *stunting* serta melaksanakan pencegahan kasus *stunting* yang baru di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, maka ditetapkan 394 desa/kelurahan menjadi lokus intervensi *stunting* (SK Bupati Deli Serdang No. 182 tahun 2023). Seperti yang disampaikan oleh Ibu Heriani Sembiring, SE, M.Eng, selaku Fungsional Muda Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang:

“Semua tahapan pelaksanaan analisis situasi pada tahun 2024 dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya dan melibatkan semua OPD terkait, dimana analisis situasi membahas capaian kegiatan tahun sebelumnya. Pada lokus *stunting* tahun sebelumnya (2020-2022) masih mempertimbangkan hasil sebaran balita *stunting* dan capaian cakupan layanan untuk penetapan lokus *stunting*. Tetapi untuk lokus *stunting* tahun 2024 ditetapkan sebanyak 394 desa/kelurahan dan ini sebenarnya sudah dimulai penetapannya sejak tahun 2023, mempertimbangkan arahan dari pemerintah pusat (Perpres 72/2021 dan RAN-Pasti BKKBN) bahwa semua desa/kelurahan harus bebas *stunting* di tahun 2024 dan fokus Deli Serdang tidak hanya mengobati (menurunkan) anak mengalami *stunting* tetapi juga mencegah terjadinya kasus baru balita *stunting*. Sebanyak 394 desa/kelurahan lokus *stunting* ini akan di klasifikasikan desa/kelurahan yang tidak ada kasus *stunting* akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan *stunting* dan desa/kelurahan yang ada balita *stunting* akan diberikan kegiatan tambahan seperti untuk desa ada balita *stunting*, maka wajib desa tersebut menganggarkan kegiatan PMT pemulihan *stunting* melalui dana desa. Terkait intervensi kegiatan

stunting terhadap desa/kelurahan lokus *stunting* akan disesuaikan kepada OPD terkait yang menjadi penganggungjawab kegiatan dan kemampuan anggarannya karena tidak semua OPD mampu intervensi terhadap semua desa/kelurahan (cth: Dinas CKTR akan intervensi kegiatan *stunting* terkait sanitasi dan air bersih dan akan menetapkan lokasi yang prioritas membutuhkan kegiatan tersebut karena kemampuan anggaran. Sedangkan untuk OPD terkait kesehatan dan keluarga berencana mampu melaksanakan intervensi *stunting* terhadap merata semua desa/kelurahan lokus *stunting* tahun 2024).”

9. Analisis peneliti dengan penetapan lokus *stunting* Kabupaten Deli Serdang sebanyak 394 desa/kelurahan sangat baik untuk mencapai target indikator Perpres 72 tahun 2021 tetapi juga perlu dikelompokkan 20 desa/kelurahan yang masuk kategori prioritas intervensi *stunting*. Kemudian sebanyak 129 desa/kelurahan menjadi fokus menurunkan jumlah balita *stunting* dengan memberikan program kegiatan percepatan penurunan *stunting* dan 265 desa/kelurahan menjadi fokus pencegahan kasus *stunting* yang baru. Pengelompokan ini untuk mempertimbangkan keterbatasan sumber dana dan alokasi anggaran daerah dalam merencanakan program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan tahun 2025.

4.1.3.2 Analisis Ketersediaan Program dan Kesenjangan Cakupan Layanan Stunting

Tindaklanjut dari hasil penetapan lokus prioritas *stunting*, kesenjangan cakupan layanan dan pemetaan ketersediaan program berdasarkan indikator Perpres 72 tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Semua OPD terkait pemetaan program kegiatan *stunting* sudah melaksanakan penandaan (tagging) anggaran untuk tahun berjalan sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021 dan semua kebutuhan data tersedia.

2. Penandaan (tagging) program kegiatan stunting menggunakan RKA (rencana kerja anggaran) dari masing-masing OPD yang mengalokasikan kegiatan stunting tahun 2024 dan menyesuaikan dengan indikator Pepres 72 tahun 2021 (tabel 4.3).
3. Terdapat 45 indikator kegiatan dari semua OPD terkait yang tersedia pada tahun 2024 yang akan melaksanakan intervensi *stunting* dengan total anggaran sebesar Rp. 179.386.262.585,- (tabel 4.6). Sehingga bila disandingkan dengan 64 indikator kegiatan *stunting* (Perpres 72 tahun 2021), maka ada selisih 19 indikator tidak tersedia di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Klarifikasi disampaikan Bapak Sesbasar Sitohang, ST selaku Penelaah Data Sumber Daya Alam Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang terhadap indikator yang belum terpetakan (tagging):

“Kemungkinan tidak semua indikator menjadi program khusus untuk dilaksanakan oleh OPD terkait (cth: indikator rembuk *stunting* di desa/kelurahan, indikator pemberian bantuan sosial, indikator ketahanan pangan dan indikator badan POM) dan memang setelah di konfirmasi kepada OPD terkait memang mereka tidak ada pemilahan pemberian bantuan secara khusus kepada sasaran prioritas *stunting* karena mereka memberikan bantuan kegiatan berdasarkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat umum. Sehingga bantuan kegiatannya langsung ditransfer dan diserahkan kepada penerima manfaat tanpa proses pencatatan di dokumen APBD tahun 2024. Sehingga kegiatan *stunting* yang tidak ada tersebut, belum tersedia kode rekening program kegiatan yang akan dilakukan oleh OPD pengampu kegiatan *stunting*.”

4. Setelah disandingkan kesenjangan cakupan layanan yang membutuhkan intervensi layanan *stunting* dan hasilnya dipetakan 64 indikator layanan (29 indikator esensial dan 35 indikator supply) akan dilaksanakan intervensi *stunting* pada tahun 2024 dan

tahun 2025 (tabel 4.7). Seperti yang disampaikan oleh Ibu Heriani Sembiring, SE, M.Eng, selaku Fungsional Muda Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang:

“Berdasarkan tingginya angka survei SKI tahun 2023 di Kabupaten Deli Serdang, maka kami sangat serius dalam memastikan semua program kegiatan tersedia di tingkat OPD terkait sampai tingkat desa yang menggunakan dana desa untuk intervensi langsung terhadap balita yang mengalami *stunting*. Sehingga Kabupaten Deli Serdang berkomitmen melaksanakan intervensi *stunting* di semua indikator kegiatan pada tahun 2024 dan tahun 2025, dengan mengupayakan semua sumber dana mencukupi untuk melaksanakan intervensi *stunting* (APBN, APBD, APBDes dan CSR).”

5. Berdasarkan indikator Perpres 72 tahun 2021 dalam pemetaan program kegiatan disandingkan dengan kesenjangan cakupan layanan, maka masih ada perbedaan pemetaan program yang belum dilakukan penandaan (tagging) anggaran tahun 2024. Klarifikasi disampaikan Bapak Sesbasar Sitohang, ST selaku Penelaah Data Sumber Daya Alam terhadap perbedaan ketersediaan indikator kegiatan *stunting*:

“Seperti disampaikan sebelumnya, belum semua indikator kegiatan menjadi kode khusus program kegiatan *stunting* yang bisa di rencanakan oleh OPD terkait sehingga indikator tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan cara transfer langsung kepada penerima manfaat atau melalui tenaga pendamping profesional untuk melaksanakan intervensi *stunting* (dinas sosial, ketahanan pangan dan BPOM). Tetapi komitmen pemerintah Deli Serdang sangat tinggi untuk memastikan semua indikator kegiatan tersedia untuk intervensi *stunting* dari sumber dana APBN, APBD, APBDes dan CSR.”

6. Analisis peneliti dengan ketersediaan program kegiatan *stunting* tahun 2024 dan kesanggupan menyediakan 64 program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 dan tahun 2025 dengan sumber dana APBD, APBN, APBDes dan

CSR maka sangat baik untuk mencapai target indikator Perpres 72 tahun 2021 tetapi perlu memprioritaskan desa/kelurahan yang jumlah balita stunting yang masih tinggi dan masih ada balita stunting (129 desa/kelurahan) untuk fokus program kegiatan dalam perbaikan gizi anak balita stunting tersebut serta perbaikan layanan kegiatan stunting yang masih rendah dan butuh perbaikan intervensi stunting, sehingga sumber dana yang ada dapat tepat sasaran dan kegiatan.

4.1.3.3 Analisis Situasi Penyampaian Layanan Sasaran Prioritas Stunting

Berdasarkan hasil penetapan lokasi prioritas *stunting*, kesenjangan cakupan layanan dan identifikasi kendala/masalah serta rekomendasi penyampaian layanan sasaran prioritas *stunting* berdasarkan indikator Perpres 72 tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi kendala/masalah penyampaian cakupan layanan *stunting* sudah dilakukan oleh setiap OPD terkait dan merumuskan rekomendasi perbaikan manajemen layanan untuk sasaran prioritas *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.
2. Hasil rata-rata cakupan layanan intervensi *stunting* mencapai 85% (sangat baik) berdasarkan target indikator Perpres 72 tahun 2021 (rata-rata 80%), maka OPD terkait merumuskan rekomendasi tidak ada kendala/masalah yang dihadapinya dalam melaksanakan intervensi *stunting* pada tahun sebelumnya. Penjelasan disampaikan oleh Ibu Heriani Sembiring, SE, M.Eng, selaku Fungsional Muda Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang terkait belum teridentifikasi kendala/masalah dan rekomendasi cakupan layanan yang disampaikan oleh OPD terkait:

“Pelaksanaan intervensi kegiatan *stunting* oleh OPD terkait dilakukan berdasarkan capaian layanan kegiatan pada tahun sebelumnya dan Bappedalitbang memberikan kewenangan kepada OPD terkait untuk melaksanakan intervensi berdasarkan sasaran prioritas *stunting*, termasuk juga identifikasi kendala/masalah yang dihadapi pada saat

pelaksanaan intervensi kegiatan tersebut. Sehingga tahun 2024 hanya Dinas Sosial yang memberikan umpanbalik atas kendala/masalah yang dihadapi dan OPD lainnya tidak ada menyampaikan kendala/masalah yang dihadapi. Sebelum dilaporkan rutin kepada Kemendagri, Bappedalitbang sudah menyampaikan kembali hasil pengisian kendala/masalah dan OPD terkait masih tidak ada menyampaikan umpanbalik kendala/masalah.”

3. Rekomendasi tidak ada kendala/masalah dan indikator layanan dalam kategori sangat baik, maka setiap OPD terkait di Kabupaten Deli Serdang akan melanjutkan setiap intervensi layanan yang sudah dikerjakan selama ini untuk menjadi rencana program kegiatan *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025.
4. Analisis peneliti dengan capaian cakupan layanan kegiatan *stunting* rata-rata 86% dan rata-rata dapat mencapai indikator Perpres 72 tahun 2021 (rata-rata 80%) maka capaian layanan kegiatan *stunting* kategori sangat baik dan OPD penanggung jawab kegiatan tidak ditemukan kendala/hambatan dalam intervensi *stunting* tetapi perlu pendalaman kembali kepada kelompok sasaran *stunting*, lokasi sasaran *stunting* dan cakupan layanan *stunting* dalam identifikasi kendala/masalah serta rekomendasi perbaikan manajemen layanan kegiatan *stunting* tahun berikutnya.

4.1.3.4 Koordinasi Meningkatkan Konvergensi Intervensi bagi Sasaran Prioritas *Stunting*

Pelaksanaan ini dibutuhkan untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penguatan antar lembaga atau antar tingkatan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan integrasi layanan kegiatan *stunting*. Kegiatan koordinasi ini melibatkan semua OPD terkait, penyedia layanan kegiatan, pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak swasta (CSR) serta masyarakat penerima manfaat

kegiatan *stunting* untuk meningkatkan integrasi layanan dapat diterima langsung dan efektif dalam menurunkan balita *stunting*. Penjelasan disampaikan oleh Ibu Heriani Sembiring, SE, M.Eng, selaku Fungsional Muda Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang: “Setelah hasil analisis situasi menetapkan lokus *stunting* tahun 2024, lokasi keluarga resiko *stunting* yang tinggi dan prioritas cakupan layanan yang membutuhkan intervensi kegiatan, kemudian disampaikan dan dikoordinasikan kepada OPD pengampu kegiatan tetapi dengan penetapan lokus *stunting* sebanyak 394 desa/kelurahan, setidaknya bagi OPD kesehatan dan keluarga berencana diharapkan intervensi kegiatan merata kesemua desa/kelurahan serta bagi OPD lainnya direkomendasikan tetap melanjutkan program kegiatan yang tersedia untuk dilakukan intervensi bagi desa/kelurahan prioritas *stunting* yang sesuai tersedia program dan alokasi anggarannya. Intinya Bappedalitbang tetap mendorong OPD terkait agar program kegiatan *stunting* tidak terkena refocusing dan pemotongan anggaran dan bappedalitbang tetap menjaga program kegiatan agar bisa terencana dan teralokasi anggarannya, walaupun anggaran daerah terbatas dan luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang, sehingga koordinasi dengan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk pengalokasian kegiatan dari dana desa, bahkan untuk dana CSR sebesar 600 juta di Kabupaten Deli Serdang di koordinasikan dan diserahkan kepada lokasi dan sasaran kegiatan *stunting* tahun 2024. Khusus untuk anak balita *stunting* di koordinasikan kepada dinas kesehatan untuk mengalokasikan di APBD-P tahun 2024 untuk pemberian pendampingan dan konsumsi obat/makanan bergizi (PMT) yang diberikan rutin kepada balita *stunting*. Hambatan kadang terjadi di program kegiatan bidang kesehatan yang dialokasikan dari pemerintah pusat (DAK Non-Fisik) tidak khusus diberikan kepada anak balita *stunting* (cth: PMT lokal diberikan kepada anak bemasalah dengan gizi) dan daerah harus mengupayakan sendiri PMT lokal untuk balita *stunting* yang teralokasi dari sumber dana lainnya (dana desa dan CSR) di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 serta banyak

inovasi kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan layanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) untuk dapat mendampingi dan pemberian makanan bergizi untuk balita yang *stunting* tersebut.”

Analisis peneliti sudah sangat bagus koordinasi dan konvergensi lintas sektor melibatkan pihak pemerintahan, swasta dan masyarakat sehingga amanat Perpres 72 tahun 2021 dapat tercapai dalam konvergensi lintas sektor intervensi *stunting* tetapi pastikan melibatkan pihak akademisi dan pakar kesehatan/gizi dan lembaga profesi kesehatan/gizi dalam memastikan program kegiatan *stunting* sesuai kebutuhan kelompok sasaran *stunting* dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang sehingga intervensi kegiatan dapat tepat sasaran dan tepat kegiatan.

4.1.4 Analisis Hasil Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Hasil manajemen perencanaan program kegiatan didefinisikan sebagai rencana tindaklanjut Kabupaten Deli Serdang dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan OPD terkait untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi *stunting* oleh tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang sesuai indikator Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 (tabel 4.3). Pemerintah kabupaten selanjutnya mengintegrasikan rencana kegiatan *stunting* ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta sampai penetapan APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

Output/hasil penyusunan rencana kegiatan ini adalah rencana program/kegiatan untuk peningkatan cakupan layanan dan integrasi intervensi *stunting* pada tahun berjalan

dan/atau satu tahun mendatang. Berdasarkan pelaksanaan manajemen perencanaan program yang sudah dilakukan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, maka ruang lingkup yang dihasilkan adalah:

4.1.4.1 Analisis Rancangan Rencana Kegiatan Stunting

Rekomendasi hasil analisis situasi (lokasi prioritas *stunting*, kesenjangan cakupan layanan, ketersediaan program kegiatan dan identifikasi kendala/masalah serta rekomendasi) akan ditindaklanjuti menjadi rancangan rencana program kegiatan *stunting* setiap OPD terkait di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan tahun 2025 berdasarkan indikator layanan Pepres 72 tahun 2021 (tabel 4.3). Rekomendasi analisis situasi tersebut akan disepakati menjadi rancangan rencana program kegiatan akan dibahas dalam forum OPD dalam penetapan program kegiatan *stunting* yang membutuhkan penetapan APBD perubahan tahun 2024 dan lanjutan rencana kegiatan tahun 2025. Setelah disusun bersama dengan pertimbangan hasil analisa situasi bersama semua OPD terkait, maka disepakati program kegiatan stunting tahun 2024 tidak ada APBD perubahan dan rencana program kegiatan tahun 2025 sebanyak 43 indikator kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 190.059.557.749,-. Penjelasan disampaikan Bapak Sesbasar Sitohang, ST selaku Penelaah Data Sumber Daya Alam terkait manajemen rencana kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024:

“Pada tahun 2024 terkait manajemen perencanaan program kegiatan dimulai dari desa dengan merencanakan kegiatan *stunting* dari dana desa, kemudian melaksanakan rembuk *stunting* kecamatan untuk pembahasan usulan-usulan dari desa, kemudian dilanjutkan rembuk *stunting* di kabupaten Deli Serdang setelah semua kecamatan selesai rembuk *stunting*. Khusus untuk rembuk *stunting* kecamatan dibatasi usulan yang masuk pembahasan maksimal 5 usulan dan sudah diinformasikan bahwa kegiatan *stunting* harus

masuk dalam usulan tersebut tetapi kenyataannya dari desa banyak usulan kegiatan fisik dan antisipasinya dari OPD kesehatan dan keluarga berencana harus merencanakan program kegiatan *stunting* untuk semua desa dan melanjutkan program kegiatan yang sudah ada terkait *stunting*. Jadi kegiatannya tidak ada menimbulkan kegiatan baru dan hanya mengikuti kode rekening program yang sudah ada dipetakan selama ini. Jadi dipastikan usulan kegiatan *stunting* tetap tersedia di forum rembuk kabupaten dari OPD pengampu kegiatan berdasarkan hasil analisis situasi dan SK penetapan lokus *stunting* Kabupaten Deli Serdang.”

Terkait perencanaan program kegiatan di desa/kelurahan lokus *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025 dengan mempertimbangkan indikator Perpres 72 tahun 2021 dalam pemerataan semua lokasi intervensi *stunting* dan pencapaian target indikator layanan, maka sumber daya (tenaga, fasilitas dan anggaran) yang ada diupayakan terlibat dalam intervensi kegiatan di lokus prioritas *stunting*, hal ini dijelaskan oleh Ibu Heriani Sembiring, SE, M.Eng, selaku Fungsional Muda Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang :

“Bisa jadi semua desa/kelurahan lokus *stunting* tersedia program kegiatan dari anggaran APBD tahun 2024 dan tahun 2025, seperti dinas kesehatan dan dinas KB yang merata kegiatan *stunting* di semua desa/kelurahan dan berapa OPD lainnya merencanakan program kegiatan berdasarkan lokasi prioritas yang membutuhkan segera intervensi *stunting* (cth: CKTR, ketahanan pangan, pertanian, pendidikan) yang menggunakan berapa desa/kelurahan lokus untuk prioritas intervensi kegiatan *stunting*. Kemudian mendorong semua desa yang memiliki dana desa untuk mengalokasikan kegiatan pemberian makanan tambahan dan program kegiatan yang dibutuhkan untuk balita yang mengalami *stunting*”

Analisis peneliti sudah sangat baik dalam proses penyusunan rencana program kegiatan *stunting* dimulai dari usulan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/Rembuk *Stunting* Kabupaten Deli Deli Serdang tahun 2024

sehingga usulan masyarakat dapat dipertimbangkan di forum OPD penanggung jawab kegiatan *stunting* karena sejalan dengan indikator Perpres 72 tahun 2021 dalam integrasi sistem perencanaan daerah reguler tetapi pastikan usulan kegiatan yang direncanakan melalui APBDes (dana desa) tahun 2024 tidak numpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan APBD, APBN dan CSR yang sudah direncanakan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan tahun 2025.

4.1.4.2 Analisis Rancangan Rencana Program Kegiatan di Musrenbang dan Rembuk *Stunting*

Setelah rancangan rencana program kegiatan *stunting* Kabupaten Deli Serdang disusun dan disepakati di rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, kemudian rencana kegiatan dibahas dan dipaparkan di forum Musrenbang (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) dan Rembuk *Stunting* ditingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dengan menghadirkan kepala daerah dan semua lintas sektor penanggung jawab kegiatan sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021, pada tanggal 15 Februari 2025 di Aula Kantor Bupati Deli Serdang, agar mendapat masukan dan saran serta komitmen bersama semua pihak dalam memastikan rancangan rencana program kegiatan *stunting* tahun berjalan dan tahun rencana ditetapkan di APBD Kabupaten Deli Serdang. Kemudian rancangan rencana program kegiatan akan disepakati bersama semua pihak lintas sektor pada berita acara Rembuk *Stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Heriani Sembiring, SE, M.Eng, selaku Fungsional Muda Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang terkait pelaksanaan rembuk *stunting*:

“Pelaksanaan rembuk *stunting* menghadirkan semua lintas sektor yaitu, kepala daerah, kepala OPD, kecamatan, desa/kelurahan, organisasi/LSM, tokoh masyarakat, pihak swasta

dan termasuk DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk komitmen bersama dalam intervensi kegiatan *stunting*. Rencana program kegiatan *stunting* dipaparkan di forum rembuk *stunting* kabupaten untuk tahun 2024 dan rencana tahun 2025 untuk mendapat persetujuan dan komitmen dalam memastikan termuat di APBD Kabupaten Deli Serdang. Tetapi yang menjadi catatan, ternyata perencanaan program kegiatan *stunting* yang sudah ada dan mengalokasikan anggaran yang besar tersebut apakah menysasar langsung ke sasaran *stunting* atau tidak menysasar langsung agar memastikan efektifitas kegiatannya kepada kelompok sasaran dikarenakan di sub kegiatan program tersebut masih banyak didalamnya kegiatan tidak menysasar langsung kepada sasaran *stunting* seperti kegiatan kampanye/publikasi, sosialisasi, rapat/seminar, perjalanan dinas dan ATK.”

Analisis peneliti sudah baik sekali pelaksanaan musrenbang dan rembuk *stunting* dilaksanakan tepat waktu dan melibatkan semua lintas sektor serta menghasilkan usulan kebutuhan masyarakat dalam intervensi *stunting* sesuai amanat Perpres 72 tahun 2021 dalam konvergensi lintas sektor dalam intervensi *stunting* tetapi pastikan komitmen dan hasil musrenbang dan rembuk *stunting* dikawal sampai forum OPD dalam pembahasan rencana program kegiatan *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025.

4.1.4.3 Analisis Komitmen Hasil Musrenbang dan Rembuk Stunting serta Kesepakatan Rencana Program Kegiatan Stunting

Hasil kesepakatan musrenbang dan rembuk *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, kemudian dibahas bersama di rapat forum OPD dalam finalisasi rencana program kegiatan intervensi *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025. Rapat forum OPD juga membahas hasil Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten untuk mengakomodir usulan yang menjadi kewenangan OPD pengampu *stunting* di Kabupaten Deli Serdang untuk dilakukan pengusulan di Renja atau RKPD. Dari hasil pembahasan di

forum OPD di tingkat Kabupaten Deli Serdang, maka ditetapkan program kegiatan *stunting* tahun 2025 sebanyak 43 indikator kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 190.059.557.749,- (tabel 4.9).

4.1.4.4 Analisis Integrasi Rancangan Program kedalam Dokumen Rencana Daerah

Penetapan rencana program kegiatan *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025 diintegrasikan kedalam dokumen rencana daerah dituangkan dalam bentuk dokumen Renja, RKPD, KUA-PPAS dan APBD/APBD-P tahun 2024 dan tahun 2025. Setiap OPD pengampu kegiatan *stunting* mengawal program kegiatan dalam setiap proses pembahasan TAPD dan penetapan di dokumen rencana daerah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Heriani Sembiring, SE, M.Eng, selaku Fungsional Muda Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang:

“Tetap semua tahapan usulan kegiatan melalui pencatatan di Renja, RKPD, KUA PPAS, serta pembahasan di TAPD Bappedalitbang untuk memastikan keberlanjutan menjadi dokumen anggaran APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Kadang yang dihadapi yang menjadi kendala keberlanjutan program kegiatan *stunting* yang sudah ditetapkan menjadi APBD adalah kebijakan dari pemerintah pusat seperti refocusing dan sebagainya dan ini menjadi dinamika yang dihadapi sehingga dampaknya tidak tersedia program dan anggaran kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang.”

Analisis peneliti pelaksanaan integrasi rancangan program kegiatan *stunting* sudah masuk dokumen anggaran daerah (Renja, RKPD, KUA PPAS dan APBD) Kabupaten Deli Serdang tetapi pastikan semua indikator Perpres 72 tahun 2021 yang ditetapkan dokumen APBD sesuaikan dengan kode rekening program kegiatan SIPD dan kemendagri.

4.1.4.5 Analisis Pakar/Ahli dalam Perencanaan Program Kegiatan Stunting

Analisis dan pendapat pakar dan ahli tentang perencanaan program kegiatan stunting dibutuhkan dalam memastikan perencanaan program kegiatan sudah sesuai dengan peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 dan kesenjangan layanan kegiatan yang dibutuhkan kelompok sasaran stunting dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Analisis pakar dan ahli antara lain:

A. Analisis Bappedalitbang Provinsi Sumatera Utara Tentang Manajemen Perencanaan Program Kegiatan Stunting Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Berdasarkan pelaksanaan analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, sudah menghasilkan program kegiatan intervensi *stunting* tahun 2024 sesuai lampiran indikator Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Semua tahapan proses perencanaan program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dengan tahapan identifikasi sebaran balita *stunting*, keluarga resiko *stunting*, capaian cakupan layanan, kesenjangan layanan kegiatan *stunting*, rekomendasi perbaikan integrasi layanan, perencanaan program kegiatan melalui musrenbang dan rembuk *stunting* serta integrasi rencana kegiatan *stunting* kedalam dokumen rencana daerah. Pendapat pembanding terkait pelaksanaan perencanaan program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 ini disampaikan Bapak Hijrah Syahputra, SE, MM, selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Provinsi Sumatera Utara:

“Kabupaten Deli Serdang ditetapkan menjadi lokasi prioritas dalam percepatan penurunan *stunting* tahun 2024 dan diupayakan mencapai target sasaran, lokasi dan program kegiatan sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021. Salah satu instrument dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting* adalah analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan

untuk memastikan semua indikator kegiatan dalam Perpres 72 tahun 2021 dapat ditetapkan APBD tahun 2024 dan melibatkan semua lintas sektor dalam intervensi *stunting*. Berdasarkan pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan analisis situasi dan perencanaan program kegiatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan semua tahapan secara tepat waktu dan sudah menghasilkan program kegiatan *stunting* di dokumen APBD tahun 2024 dan tahun 2025 serta sudah dilaksanakan intervensi terhadap sasaran dan lokasi yang menjadi prioritas *stunting*. Berdasarkan pelaporan *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 semua indikator Perpres 72 tahun 2021 sudah dilakukan intervensi *stunting* dan hampir semua target indikator dapat dicapai serta sudah dilakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* tahun 2024. Dengan semua instrument dan kebijakan perencanaan program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dalam percepatan penurunan *stunting* sesuai Perpres 72 tahun 2021, diharapkan proses pencegahan kasus baru *stunting* dapat terjadi dan jumlah balita *stunting* akan menurun serta target prevelensi *stunting* dapat tercapai 14% tahun 2024. ”

B. Analisis Ahli Gizi Tentang Program Kegiatan Stunting Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 berdasarkan indikator Perpres 72 tahun 2021 sudah ditetapkan melalui APBD tahun 2024 serta sudah dilaksanakan intervensi *stunting* terhadap kelompok sasaran *stunting* dan lokasi sasaran prioritas di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Berdasarkan pengamatan dan pendapat dari Ahli Gizi/Ahli Kesehatan dan Dosen di Politeknik Kesehatan Medan di Lubuk Pakam (Bp. Effendi S. Nainggolan) menyampaikan antara lain:

“Program kegiatan *stunting* sudah dipersiapkan sesuai kebutuhan balita *stunting* dan kelompok sasaran *stunting* sesuai Perpres 72 tahun 2021 tetapi program kegiatan tersebut belum berdampak dengan baik karena jumlah balita *stunting* yang kembali meningkat dari tahun sebelumnya. Kendala/masalah yang dihadapi adalah daerah yang cukup luas, partisipasi masyarakat yang masih rendah dan dukungan tenaga kesehatan yang belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan *stunting*. Saran untuk bisa melibatkan Poltekkes Kemenkes Medan atau Lembaga Profesi Gizi dan Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang khususnya jurusan gizi yang ada di Lubuk Pakam dalam berbagai program gizi khususnya promosi gizi seimbang; PMT lokal; pengukuran antropometri; dan entri data e-PPGBM.”

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, maka peneliti akan membahas dan mengkaitkan latar belakang penelitian, landasan teori, deksripsi hasil penelitian, temuan penelitian dan indikator Perpres 72 tahun 2021 (tabel 4.3) serta sumber data penlitian yang sudah diterima dari Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang (observasi, dokumentasi dan wawancara), maka hasil pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2.1 Analisis Situasi dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

4.2.1.1 Hasil Sebaran Sasaran Prioritas *Stunting* dalam Wilayah Kabupaten

Kegiatan ini sudah identifikasi sebaran jumlah/prevalensi *stunting* dan keluarga resiko *stunting*, mengetahui wilayah yang perlu menjadi fokus perhatian dan memutuskan tingkat kedalaman analisis secara khusus pada skala wilayah tertentu (kecamatan dan desa/kelurahan). Berdasarkan hasil pelaksanaan analisis situasi ditetapkan lokus *stunting* tahun 2024 sebanyak 394 desa/kelurahan dikarenakan mempertimbangkan keberlanjutan intervensi dan target indikator Perpres 72 tahun 2021 untuk pemerataan semua daerah pernah menjadi lokus *stunting* serta melaksanakan pencegahan kasus baru *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Kemudian sebanyak 20 desa/kelurahan menjadi perhatian khusus intervensi *stunting* dikarenakan menjadi lokasi balita *stunting* dan keluarga resiko *stunting* yang cukup tinggi serta capaian layanan kegiatan yang masih rendah. Penetapan semua desa/keluarhan menjadi lokus *stunting* tahun 2024 ini sebenarnya sudah sejalan dengan target indikator Perpres 72 tahun 2021 dan dukungan kebijakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pencegahan kasus *stunting* dengan melibatkan

semua lintas sektor dalam melakukan intervensi kegiatan *stunting*. Tetapi tetap prioritaskan percepatan penurunan jumlah anak balita *stunting* dilokasi 129 desa/kelurahan dan fokus pada 20 desa/kelurahan yang masuk kategori khusus intervensi *stunting*.

4.2.1.2 Hasil Ketersediaan Program dan Kesenjangan Cakupan Layanan Stunting

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan ketersediaan dan lokasi program kegiatan untuk penyediaan intervensi gizi prioritas dan mengidentifikasi kesenjangan cakupan layanan. Hasil analisis ini akan menentukan keputusan mengenai program kegiatan yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya baik melalui realokasi atau penambahan alokasi program di APBD Kabupaten Deli Serdang (APBD-P) tahun 2024. Berapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahapan analisis ini adalah:

1. Pemetaan program dan pendanaan

Tim pelaksana sudah memetakan program/kegiatan yang tersedia untuk setiap intervensi *stunting* beserta sumber pendanaannya dan hasilnya sebanyak 45 program kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah terpetakan untuk intervensi *stunting* dan sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021 serta sisanya belum terpetakan karena belum tersedianya kode program kegiatan untuk dana desa dan kegiatan CSR.

2. Identifikasi kesenjangan program untuk integrasi layanan

Tim pelaksana sudah mengidentifikasi program/kegiatan yang tersedia di sebagian besar wilayah atau tidak tersedia di wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Hasilnya rata-rata capaian layanan Kabupaten Deli Serdang mencapai 85% dan capaian ini sangat baik, maka layanan kegiatan yang menjadi prioritas khusus untuk dilakukan intervensi *stunting* tidak ada (layanan rata-rata sudah baik), sehingga intervensi layanan difokuskan pada lokus desa/kelurahan yang membutuhkan layanan intervensi yang

masih rendah (fokus sesuai kebutuhan layanan rendah di desa/kelurahan) sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021.

Berdasarkan pelaksanaan analisis situasi yang sudah terpetakan semua program kegiatan dan sumber dana, capaian layanan kegiatan, kesenjangan cakupan layanan (analisis gap) dan penambahan alokasi serta realokasi anggaran, maka semua layanan kegiatan *stunting* tersedia sesuai kebutuhan prioritas intervensi *stunting* untuk desa/kelurahan dan kelompok sasaran *stunting*. Hal ini sesuai amanat Perpres 72 tahun 2021 bahwa semua indikator kegiatan yang menjadi kewenangan daerah diharuskan melakukan intervensi sesuai prioritas kegiatan dilokasi sasaran *stunting* serta melibatkan semua lintas sektor. Tetapi pemetaan program kegiatan harus lebih detail dalam pengelompokan kegiatan *stunting* dalam klasifikasi intervensi langsung, intervensi tidak langsung dan intervensi pendukung, agar lebih tepat sasaran dan tepat kegiatan.

4.2.1.3 Hasil Analisis Situasi Penyampaian Layanan Sasaran Prioritas Stunting

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami permasalahan dalam manajemen layanan yang menyebabkan layanan tidak diakses oleh kelompok sasaran *stunting* sebagai target penerima manfaat. Hasil analisis ini akan menentukan keputusan dalam perbaikan manajemen layanan dan penggunaan data kelompok sasaran *stunting* dalam proses perencanaan, pemantauan, dan supervisi penyelenggaraan layanan. Hasilnya OPD terkait sudah melaksanakan identifikasi kendala/masalah layanan kegiatan *stunting* tetapi dengan layanan kegiatan rata-rata mencapai sebesar 85% maka OPD terkait tidak begitu mendalam melakukan identifikasi kendala/masalah sehingga rekomendasi OPD terkait hanya melanjutkan kembali intervensi kegiatan *stunting* untuk tahun 2024 sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021. Tetapi perlu pendalaman kembali masalah dan kendala terhadap

kelompok sasaran stunting dan lokasi sasaran stunting agar mendapatkan program kegiatan yang tepat sasaran dan kegiatan.

4.2.1.4 Hasil Koordinasi Meningkatkan Konvergensi Intervensi bagi Sasaran Prioritas *Stunting*

Tim Pelaksana sudah mengidentifikasi kebutuhan koordinasi dan rekomendasi penguatan koordinasi antar lembaga atau antar tingkatan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dalam meningkatkan integrasi layanan bagi kelompok sasaran *stunting*. Berdasarkan hasil pelaksanaan analisis situasi sudah menetapkan kebijakan dan komitmen Kabupaten Deli Serdang untuk memprioritaskan program kegiatan *stunting* dalam APBD tahun 2024 dan melibatkan semua lintas sektor dalam intervensi *stunting* (pemerintah, Lembaga Profesi, LSM/NGO, swasta dan masyarakat) sesuai amanat Perpres 72 tahun 2021 untuk semua pihak terlibat dalam percepatan penurunan *stunting*. Keterlibatan semua lintas sektor ini sudah disampaikan dan dikoordinasikan kepada setiap OPD terkait dalam merencanakan program kegiatan *stunting* sebagai prioritas kegiatan tahun 2024 dalam alokasi anggaran dan lokasi kegiatannya. Sedangkan untuk koordinasi dengan kecamatan dan desa serta pihak swasta disesuaikan dengan kewenangan setiap OPD terkait untuk komunikasikan dalam alokasi kegiatan *stunting*. Hal ini sudah sejalan dengan amanat Perpres 72 tahun 2021 untuk melibatkan semua lintas sektor dalam intervensi *stunting*. Tetapi keterlibatan akademisi dan ahli/pakar dalam bidang kesehatan/gizi harus lebih ditingkatkan keterlibatannya dalam perencanaan program kegiatan *stunting* untuk mendapatkan saran dan masukkan sesuai riset dan studi dari pihak universitas dan lembaga proresi kesehatan dan gizi di Kabupaten Deli Serdang.

4.2.2 Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

4.2.2.1 Hasil Rancangan Rencana Program Kegiatan *Stunting*

Hasil yang dilakukan Tim Pelaksana dalam penyusunan rancangan rencana kegiatan *stunting* ini adalah hasil revidi dokumen perencanaan dan penganggaran OPD terkait untuk mengidentifikasi apakah kegiatan yang perlu dilakukan telah termasuk dalam dokumen perencanaan yang ada dan apakah perlu penyesuaian target kinerja, lokasi fokus, perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran. Hasilnya semua dokumen yang di revidi menjadi awal perencanaan program kegiatan *stunting* untuk tahun berjalan atau tahun rencana.

Hasil pemetaan berbagai opsi sumber pendanaan untuk membiayai program/kegiatan penyediaan intervensi dan kegiatan peningkatan integrasi layanan kepada kelompok sasaran *stunting*. Hasilnya semua pendanaan kegiatan *stunting* di petakan dari sumber APBN, APBD, Dana Desa dan CSR. Hasil revidi rekomendasi analisis situasi untuk mengidentifikasi rencana kegiatan yang perlu dilakukan agar merealisasikan setiap rekomendasi dan OPD pelaksana kegiatan *stunting* ditetapkan sebanyak 43 indikator kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 190.059.557.749,-. Tetapi usulan rencana kegiatan *stunting* tahun 2025 harus lebih prioritaskan usulan lokasi ada anak balita *stunting* dan memastikan program kegiatan tidak tumpang tindih (overlap) dengan dana desa.

4.2.2.2 Hasil Rancangan Rencana Program Kegiatan di Musrenbang dan Rembuk *Stunting*

Hasil Revidi hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk memverifikasi kebutuhan di tingkat desa dan penajaman kegiatan untuk desa-desa

prioritas (lokus *stunting*). Selain itu, dapat dipetakan kegiatan apa saja yang dapat dilimpahkan kewenangannya ke tingkat desa, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam regulasi pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hasilnya hasil musrenbang kecamatan dan desa menjadi saran/masukkan dalam pembahasan untuk diakomodir dalam rencana program kegiatan OPD terkait untuk intervensi *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025.

Bappedalitbang memaparkan rancangan rencana program kegiatan dalam rembuk *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 untuk mendapatkan konfirmasi (terutama dari desa dan kecamatan) dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kesepakatan rembuk *stunting* atas rencana program kegiatan pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi menjadi dasar finalisasi dan pengesahan rencana kegiatan. Kegiatan rembuk *stunting* Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan tanggal 15 Februari 2024 dengan menghadirkan semua lintas sektor (pemerintah daerah, DPRD, lembaga profesi, LSM/NGO, swasta dan masyarakat). Komitmen dan hasil kesepakatan musrenbang dan rembuk *stunting* harus dikawal dan pastikan pembahasan di forum OPD dan TAPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

4.2.2.3 Hasil Komitmen Musrenbang dan Rembuk Stunting serta Kesepakatan Rencana Program Kegiatan Stunting

Pada rembuk *stunting* terdapat tambahan/masukan terhadap rancangan rencana program kegiatan, tim penyusun melakukan revisi atas rancangan rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang telah difinalkan selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD untuk diintegrasikan dalam penyusunan Renja, RKPD, KUA PPAS dan RKA OPD tahun berikutnya.

4.2.2.4 Hasil Integrasi Rancangan Program kedalam Dokumen Rencana Daerah

Pengintegrasian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses memuat program/kegiatan OPD hasil kesepakatan Rembuk *Stunting* dan pembahasan hasil musrenbang kabupaten, kecamatan, desa dan pembahasan di forum OPD serta kemudian dituangkan ke dalam RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD tahun 2024 dan tahun 2025. Tetapi memastikan indikator Perpres 72 tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan kode rekening program yang disediakan SIPD dan Kemendagri. Hasil kegiatan ini menjadi tahap akhir dalam perencanaan program dan keberhasilan perencanaan program kegiatan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

4.2.3 Analisis Situasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Pelaksanaan intervensi *stunting* berdasarkan target indikator Pepres 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, sudah di laksanakan dilokasi prioritas *stunting* dan intervensi layanan prioritas *stunting* serta menyasar semua indikator kegiatan Perpres 72 tahun 2021. Hasilnya kategori sangat baik dalam pencapaian target indikator kegiatan Perpres 72 tahun 2021, dimana sebanyak 20 (dua puluh) indikator kegiatan essensial (utama) sudah terpenuhi target indikator layanannya dan sebanyak 9 (Sembilan) indikator belum terpenuhi. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kegiatan supply (pendukung) sudah terpenuhi dan sebanyak 4 (empat) indikator belum terpenuhi. Kendala/hambatan belum terpenuhi indikator tersebut adalah belum terdata sasaran yang lengkap, tidak hadirnya sasaran di layanan kesehatan serta tidak mencukupinya alokasi anggaran kegiatan. Harapannya dengan capaian layanan kegaitan ini akan berdampak dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Berikut capaian

target indikator Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 :

Tabel 4. 10 Capaian indikator Perpres 72 tahun 2021 Kabupaten Deli Serdang tahun 2024

Indikator Layanan Essensial (Utama)

No	Indikator Kegiatan	Target Perpres (%)	Realisasi 2024 (%)	Selisih (%)	Keterangan
1	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58	86	28	Tercapai
2	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	90	64	-26	Tidak Tercapai
3	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	90	88	-2	Tidak Tercapai
4	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90	87	-3	Tidak Tercapai
5	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90	93	3	Tercapai
6	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>	90	88	-2	Tidak Tercapai
7	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90	100	10	Tercapai
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90	100	10	Tercapai
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90	90	0	Tercapai
10	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90	100	10	Tercapai
11	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80	95	15	Tercapai
12	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	7,4	9	-1	Tidak Tercapai

No	Indikator Kegiatan	Target Perpres (%)	Realisasi 2024 (%)	Selisih (%)	Keterangan
13	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5	1	14	Tercapai
14	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	80	42	-38	Tidak Tercapai
15	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80	98	18	Tercapai
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90	100	10	Tercapai
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90	88	-2	Tidak Tercapai
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90	100	10	Tercapai
19	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90	91	1	Tercapai
20	Keluarga yang Stop BABS	90	100	10	Tercapai
21	Keluarga yang melaksanakan PHBS	70	69	-1	Tidak Tercapai
22	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90	100	10	Tercapai
23	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	70	87	17	Tercapai
24	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan	90	100	10	Tercapai
25	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50	100	50	Tercapai
26	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100	91	-9	Tidak Tercapai
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	90	90	0	Tercapai
28	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90	100	10	Tercapai

No	Indikator Kegiatan	Target Perpres (%)	Realisasi 2024 (%)	Selisih (%)	Keterangan
29	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	90	100	10	Tercapai

(sumber : Bappedalitbang Provinsi Sumatera Utara)

Indikator Layanan Supply (Pendukung)

No	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	112,9 Juta Jiwa	100%	Tercapai
2	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	10 Juta Jiwa	100%	Tercapai
3	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	15.600.039 Jiwa	100%	Tercapai
4	Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	100% Pendamping	100%	Tercapai
5	Terselenggaranya rembuk <i>stunting</i> tingkat kabupaten/kota	Min 1 kali	1 kali	Tercapai
6	Terselenggaranya rembuk <i>stunting</i> tingkat kecamatan	Min. 2 kali	2 kali	Tercapai
7	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>stunting</i>	100% Kab/Kota	100%	Tercapai
8	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i> di pemerintah daerah kabupaten/kota	2 kali	2 kali	Tercapai
9	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100% desa/kel	100%	Tercapai
10	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>stunting</i>	100,00%	100%	Tercapai
11	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah tebebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	90,00%	100%	Tercapai
12	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas	70,00%	100%	Tercapai
13	Publikasi data <i>stunting</i> tingkat Kabupaten/Kota	1 kali	1 kali	Tercapai

No	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
14	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90,00%	100%	Tercapai
15	Terselenggaranya audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i>	50,00%	100%	Tercapai
16	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100% desa/kel	100%	Tercapai
17	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan <i>stunting</i>	100% desa/kel	100%	Tercapai
18	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90% Kader	100%	Tercapai
19	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	100% desa/kel	100%	Tercapai
20	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	90% desa/kel	100%	Tercapai
21	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	80% desa/kel	100%	Tercapai
22	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i> di pemerintahan desa	2 kali	2 kali	Tercapai
23	Jumlah Desa/kelurahan Bebas <i>Stunting</i>	100,00%	66%	Tidak Tercapai
24	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan <i>stunting</i>	90,00%	100%	Tercapai
25	Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>	3 kanal	3 kanal	Tercapai
26	Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	90,00%	100%	Tercapai

No	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
27	Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	70,00%	50%	Tidak Tercapai
28	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>stunting</i> lintas agama	2 kali	2 kali	Tercapai
29	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i>	2 kali	2 kali	Tercapai
30	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> melalui Sistem Informasi Keluarga	2 kali	2 kali	Tercapai
31	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	90% Kab/Kota	0	Tidak ada data
32	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90,00%	29%	Tidak Tercapai
33	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	90,00%	100%	Tercapai
34	Pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	75,00%	0%	Tidak Tercapai
35	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100% Kab/Kota	100%	Tercapai

(sumber : Bappedalitbang Provinsi Sumatera Utara)

Keterangan tabel diatas menjelaskan program kegiatan *stunting* yang sudah tercapai berdasarkan kebijakan penetapan program dan alokasi anggaran kegiatan sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021 dan penentuan analisis situasi dan perencanaan program kegiatan *stunting* yang sesuai data yang lengkap dan akurat serta analisis yang tepat sasaran dan prioritas kegiatan dan melibatkan konvergensi lintas sektor (pemerintah, lembaga/profesi, LSM/NGO, swasta dan masyarakat) serta sumber dana dari APBN, APBD, APBDes & CSR sehingga realisasi kegiatan *stunting* dapat mencapai target indikator Perpres 72 tahun 2021. Contoh keberhasilan capaian kegiatan *stunting* dengan dukungan program kegiatan

stunting, inovasi pemerintah daerah dan masyarakat serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong penerima manfaat menerima layanan kesehatan dan gizi.

Sedangkan bagi 13 indikator kegiatan yang belum tercapai masih terkendala pada ketersediaan SDM, kekurangan alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat penerima manfaat yang belum bersedia hadir menerima layanan kesehatan dan intervensi stunting. Ketidak hadirannya masyarakat dikarenakan belum mendapat kampanye percepatan penurunan stunting dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan stunting di masyarakat.

Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan upaya dalam percepatan penurunan *stunting* tahun 2024 dengan program kegiatan yang sudah ditetapkan dan inovasi dan praktek baik sebagai pembelajaran pada kegiatan tahun berikutnya, antara lain:

1. Inovasi Desa Emplasmen Kuala Namu membentuk Kelas Balita *Stunting* (Kebal *Stunting*) yang sarannya adalah semua balita di Desa tersebut dan memprioritaskan balita *stunting* dengan memberikan edukasi dan melakukan pemantauan balita.
2. Inovasi Si Nande Bundaku (Sayangi Ibu dan Anak Deli Serdang) yang dilakukan oleh Petugas Puskesmas Mulyorejo dalam memantau perkembangan ibu hamil dan bayi baru lahir serta memberikan edukasi seputar tentang kehamilan misalnya tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan.
3. Inovasi Simamak (Sayang Ibu Melahirkan Anak Mendapat Akte) program yang di buat oleh Puskesmas Galang yang memberikan Akte lahir untuk mempermudah ibu yang selesai melahirkan mendapatkan akte lahir.
4. Inovasi Marjaga Hati (Mari Buat Jamban Sehat Hari Ini dan Tidak Nanti) yaitu Program Sanitasi yang dilakukan oleh Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan dalam membentuk Desa Stop BABS di Desa Lokus *Stunting*.

5. Inovasi Sedulor (Sehat dengan Daun Kelor) inovasi dari Puskesmas Tanjung Morawa dalam mengolah daun kelor untuk anak balita terutama balita *stunting*.

Inovasi D'Best (Desa Bebas *Stunting*) inovasi dari Puskesmas Batang Kuis dalam menurunkan angka *stunting* puskesmas batang kuis serta penambahan inovasi baru yaitu SiGenit dari Puskesmas Biru-Biru yaitu Gerakan Nikah Sehat yang kegiatan ini salah satunya melakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan kepada catin yang akan menikah yang nantinya akan berdampak baik untuk masa depan dalam pencegahan dan penurunan angka *stunting*.

4.2.4 Manajemen Perencanaan Program Kegiatan *Stunting* Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Program kegiatan *stunting* yang sudah ditetapkan melalui APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan sudah dilaksanakan intervensi *stunting* tahun 2024 di lokasi prioritas dan layanan prioritas *stunting*, maka dari total 43 kegiatan yang sudah dilakukan intervensi *stunting* berdasarkan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, dihasilkan realisasi kegiatan *stunting* tahun 2024 sudah kategori sangat baik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.200.890.069,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.680.795.886,- (98%). Kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan *stunting* tahun 2024 adalah realokasi anggaran. Harapannya dengan capaian layanan kegiatan ini akan berdampak dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Realisasi anggaran kegiatan *stunting* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Realisasi program kegiatan *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 berdasarkan indikator Perpres 72 tahun 2021

No	Nama OPD	Nama Program/Kegiatan	Uraian Kegiatan	Besaran Manfaat/Progres Pencapaian Kegiatan	Tahun 2024 (Realiasi Final)					
					Target Fisik	Realisasi Fisik	%	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pendaftaran penduduk /penyelenggaraan pendaftaran penduduk/Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	100 Laporan	97 Laporan	97	38.667.400	37.500.000	97
2	Dinas Perikanan	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan /Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil/Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelatihan Pengolahan / Pemasaran Hasil Olahan Perikanan	Mengintervensi secara langsung bagaimana pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berumur 23 tahun dan balita	4 paket	4 paket	100	17.053.320	12.780.000	75
3	Dinas Perikanan	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan /Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil/Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Pelatihan untuk Penanggulangan Stunting. -Pelatihan Gembung Rebus (Penanggulangan Stunting) - Pelatihan Pembuatan Abon Ikan (Penanggulangan Stunting)	Mengintervensi secara langsung bagaimana pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berumur 23 tahun dan balita	3 paket	1 paket	33	12.316.390	9.745.000	79
4	Bappedalitbang	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah/koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Rapat koordinasi aksi konvergensi penanganan stunting	Kegiatan ini sebagai penunjang untuk rapat koordinasi aksi konvergensi stunting	4	4	100	82.000.000	82.000.000	100
5	Dinas Perindustrian dan perdagangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting /Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota/Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Upaya stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum. Dilakukan melalui Satgas untuk langsung dijual ke masyarakat umum; melalui pedagang eceran dan pedagang grosir	Kestabilan harga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi	22 Kec	22 Kec	75	140.709.400	0	0
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum /Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota/Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	1.000 SR	1.000 SR	100	3.270.154.822	3.228.391.372	99
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah /Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota/Rehabilitasi/ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Tangki Septik Individual	Jumlah Rumah Tinggal yang mendapatkan layanan sanitasi aman	560 RT	560 RT	100	2.695.181.685	2.562.083.635	95
8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah /Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota/Rehabilitasi/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Pembangunan IPAL Komunal	Terbangunnya IPAL Komunal Bagi Masyarakat Kab. Deli Serdang	135 RT	135 RT	100	14.288.253.980	13.689.545.416	96
9	Dinas Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian /Pengawasan penggunaan sarana pertanian/Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik	Perkarangan Pangan Lestari (P2L)	Meningkatkan Kesejahteraan Ibu-Ibu Kelompok Wanita Tani di Daerah Locus Stunting	7 Kelompok Wanita Tani	7 Kelompok Wanita Tani	100	455.000.000	450.846.300	99
10	Dinas PMD	Administrasi Pemerintahan Desa /Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan/Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024	380 Desa	380 Desa	380 Desa (22 kecamatan)	100	145.654.985	145.654.985	100
11	Dinas PMD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat /Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah/Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan IBU RELIGIUS	380 Desa	380 Desa	380 Desa (22 kecamatan)	100	176.776.000	176.776.000	100

No	Nama OPD	Nama Program/Kegiatan	Uraian Kegiatan	Besaran Manfaat/Progres Pencapaian Kegiatan	Tahun 2024 (Realisasi Final)					
					Target Fisik	Realisasi Fisik	%	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
12	Dinas PMD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Monitoring Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024	380 Desa	380 Desa	380 Desa (22 kecamatan)	100	20.165.000	20.165.000	100
13	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan /Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	Pendidikan dan Pelatihan Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut tentang Penanganan Anak Stunting Angkatan 1 dan 2	Pelatihan Tersebut Bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Para Guru dalam Mencegah Stunting pada anak usia dini	75 orang	75 orang	100	320.143.623	288.021.100	90
14	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan /Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/Penyediaan Biaya Personil Peserta didik PAUD	penyediaan atau pemberian makanan tambahan bagi peserta didik paud dilokus stunting	penyediaan atau pemberian makanan tambahan bagi peserta didik paud dilokus stunting	264 Lembaga	264 Lembaga	100	433.550.000	433.550.000	100
15	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan /Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/Pembinaan kelembagaan dan Manajemen PAUD	Bimtek Parenting dalam Upaya Pencegahan Stunting di satuan paud	Bimbingan Teknis tentang stunting bagi penilik, guru paud dan paguyuban orang tua	126 orang	126 orang	100	65.314.884	64.994.100	100
16	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat /Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan/Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pembinaan kepada masyarakat melalui Tim Penggerak PKK Desa		22 Kecamatan (22 Desa)	22 Kecamatan (22 Desa)	100	60.000.000	59.377.500	99
17	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat /Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)/	Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA Berupa Kegiatan (1) Teras Pangan B2SA, (2) Gerai Pangan B2SA, (3)Rumah Pangan B2SA.	Tersosialisasinya Pangan B2SA kepada Masyarakat	1 Kelompok (20 Orang)	1 Kelompok (20 Orang)	100	60.000.000	60.000.000	100
18	Dinas Kesehatan	Pendampingan, Pembinaan, dan Pengawasan Kelas Ibu Hamil • Melakukan pendampingan, pengawasan, dan bimbingan pada kegiatan kelas ibu hamil • Melakukan 10 pelayanan standar pada ibu hamil termasuk pemberian Tabet Tambah Darah (TTD) dan Asam Folat • Membuat pengadaan Buku KIA/Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	• Melakukan pendampingan, pengawasan, dan bimbingan pada kegiatan kelas ibu hamil • Melakukan 10 pelayanan standar pada ibu hamil termasuk pemberian Tabet Tambah Darah (TTD) dan Asam Folat • Membuat pengadaan Buku KIA • Pendampingan dokter spesialis Obgyn di Puskesmas • Pelayanan Puskesmas Keliling	Jumlah kelas ibu hamil yang diselenggarakan	68 Kelas Ibu Hamil	68 Kelas Ibu Hamil	100	35.210.000	35.210.000	100
19	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak /Melakukan rapat pembentukan evaluasi jejaring skrining layak hamil Ante Natal Care (ANC) dan stunting/Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting	Jumlah peserta yang mengikuti rapat pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil, ANC dan stunting	Koordinasi dan evaluasi jejaring skrining layak hamil ANC dan stunting	70 Orang	70 Orang	100	19.448.900	19.448.900	100
20	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat /Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dab UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penguatan Peran Kader dan Pengelola Gizi Dalam Penggunaan Antropometri	Jumlah Kader Posyandu yang mendapat pelatihan penggunaan antropometri	398 orang	398 orang	100	151.396.000	151.396.000	100
21	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat /Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dab UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penguatan Layanan Program KIA dan Gizi dalam Pengelolaan Posyandu	Jumlah Posyandu	68 Posyandu	68 Posyandu	100	31.902.540	31.902.540	100
22	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat /Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dab UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Supervisi Layanan dan Program KIA dan Gizi dan Dalam Pengelolaan Posyandu	Jumlah Posyandu	110 Posyandu	110 Posyandu	100	49.500.000	49.500.000	100
23	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat /Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dab UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100	85.491.738	85.491.738	100
24	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat /Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dab UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian PMT bagi Baduta 1000 HPK (Susu dan Suplemen Albumin)	170 balita stunting	170 balita stunting	170 balita stunting	100	731.460.000	731.460.000	100

No	Nama OPD	Nama Program/Kegiatan	Uraian Kegiatan	Besaran Manfaat/Progres Pencapaian Kegiatan	Tahun 2024 (Realisasi Final)					
					Target Fisik	Realisasi Fisik	%	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
25	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat /Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dab UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksi Bergizi	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100	35.432.600	35.432.600	100
26	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat /Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dab UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Gerakan Cegah Stunting	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100	35.432.600	35.432.600	100
27	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat /Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dab UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat/Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Gerakan Bumil Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Bumil Sehat di Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100	24.684.300	24.684.300	100
28	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat /Mendaftarkan premi JKN bagi penduduk/Premi JKN bagi penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	JKN untuk masyarakat Kabupaten Deli Serdang	3 Dokumen	3 Dokumen	100	105.928.015.602	103.835.076.600	98
29	Dinas Kesehatan	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)/Melakukan pengelolaan data Balita Stunting melalui aplikasi Deli Serdang Sehat/Pembuatan aplikasi sistem informasi/website/mobile apps	Jumlah aplikasi yang tersedia	Aplikasi Deli Serdang Sehat untuk pendataan balita stunting di Kabupaten Deli Serdang	1 Paket	0 Paket	0	42.200.000	0	0
30	Dinas Kesehatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/Melakukan Pengelolaan Aplikasi Deli Serdang Sehat/Honorarium Tenaga Ahli Programmer	Jumlah penyediaan honorarium tenaga ahli programmer	Aplikasi Deli Serdang Sehat untuk pendataan balita stunting di Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	7 Bulan	58	57.276.000	57.276.000	100
31	Dinas Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial /Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota/Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Keluarga	Pemberian Bantuan Sosial kepada Petani Tembakau di Kec. Hamparan Perak KKab. Deli Serdang	50 orang	50 orang	100	80.250.000	80.250.000	100
32	Dinas Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial /Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota/Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Keluarga	Pemberian Bantuan Sosial Dampak Inflasi Daerah Bagi Masyarakat di Kab. Deli Serdang	998 orang	0	0	299.400.000	0	0
33	Dinas P3AP2KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) /Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan Bangsa Kencana/Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (Kegiatan Penyuluhan di Balai Penyuluhan)	meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya program KKBK (kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga) di masyarakat, terkait penggunaan alat kontrasepsi dan manfaat nya	5.500 Orang	5.500 Orang	100	550.000.000	550.000.000	100
34	Dinas P3AP2KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) /Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan Bangsa Kencana /Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		8.540 Orang	8.540 Orang	100	3.308.453.000	3.206.902.300	97
35	Dinas P3AP2KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) /Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan Bangsa Kencana/Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		5 Orang	0	0	15.435.300	0	0
36	Dinas P3AP2KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) /Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal/Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Koordinasi di Tingkat Kab/Kota 12 Provinsi Prioritas (Rapat TPPS)	Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/keurahan, Adanya strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	100	250.000.000	242.741.900	97

No	Nama OPD	Nama Program/Kegiatan	Uraian Kegiatan	Besaran Manfaat/Progres Pencapaian Kegiatan	Tahun 2024 (Realisasi Final)					
					Target Fisik	Realisasi Fisik	%	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
37	Dinas P3AP2KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)/ Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Kecamatan/Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	Terkumpulnya data Poktan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader PPKBD dan Sub- PPKBD untuk perkembangan wilayah kerjanya	2.364 kali	2.364 kali	100	236.400.000	236.400.000	100
38	Dinas P3AP2KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)/ Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal/Program Pengendalian KKBPK	Rembuk Stunting Kecamatan	Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab stunting di wilayah (desa/kelurahan)	1 Kali	1 Kali	100	67.360.000	65.560.000	97
39	Dinas P3AP2KB	Program POKTAN Ketahanan Keluarga/ Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB/Sosialisasi Kegiatan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Keluarga (Pembinaan BKB tentang Pengasuhan 1000 HPK)	Memberikan Informasi dan Pemahaman maupun Keterampilan Kepada Peserta Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Keluarga	386 Kelompok	386 Kelompok	100	157.500.000	157.500.000	100
40	Dinas P3AP2KB	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera/ Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting(termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Transport Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (TPK)	dapat melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting (krs)	29.670 OK	29.670 OK	100	2.967.000.000	2.967.000.000	100
41	Dinas P3AP2KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana/ Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)/Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pelaksanaan KIE Oleh Kader (PPKBD)	terlaksananya promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan KIE kepada sasaran langsung yaitu Keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, kader PPKBD atau Sub- PPKBD di wilayah desa/kelurahan setempat	3.940 Kali	3.940 Kali	100	1.182.000.000	1.182.000.000	100
42	Dinas P3AP2KB	Program POKTAN Ketahanan Keluarga/Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB/Sosialisasi Kegiatan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Pembinaan PIK-R dan BKR)	Memberikan Informasi dan Pemahaman maupun Keterampilan Kepada Peserta Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Keluarga	4.310 Kelompok	4.310 Kelompok	100	315.000.000	315.000.000	100
43	Dinas P3AP2KB	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera/ Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan Sasaran Catin, Hamil, Pasca Persalinan, Balita Oleh TPK (Telkomsel dan Pencatatan Pelaporan)	dapat melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting (krs)	9.890 OK	9.890 OK	100	3.263.700.000	3.263.700.000	100
					TOTAL REALISASI			142.200.890.069	138.680.795.886	98

(Sumber: Bappedalitbang Deli Serdang 2025)

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai strategi analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis situasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2024 dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian & Perikanan, Dinas Kominform, Dinas PPPA/PPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas CKTR dan Dinas Lingkungan Hidup) dengan menghimpun dan mengolah semua data sebaran balita *stunting*, keluarga resiko *stunting*, capaian layanan kegiatan dan pemetaan program kegiatan *stunting* serta identifikasi kendala/masalah dan rekomendasi perbaikan layanan kegiatan *stunting* sesuai Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Tahapan kegiatan analisis situasi menghasilkan (output) antara lain:
 - a. Penetapan desa/kelurahan lokus *stunting* tahun 2024 sebanyak 394 desa/kelurahan untuk memastikan pencegahan kasus baru *stunting* dan percepatan penurunan *stunting*.
 - b. Cakupan layanan prioritas intervensi *stunting* sebanyak 64 indikator kegiatan Pepres 72 tahun 2021 direkomendasikan dilanjutkan intervensi *stunting* pada tahun 2024 dan tahun 2025;

- c. Ketersediaan program kegiatan *stunting* tahun 2024 dan tahun 2025 tersedia untuk semua layanan kegiatan *stunting* yang bersumber dari APBN (DAK & DAU), APBD, Dana Desa dan CSR;
 - d. Kesenjangan cakupan layanan, kendala/masalah dan rekomendasi perbaikan cakupan layanan serta koordinasi lintas sektor dalam integrasi layanan kegiatan *stunting* dengan rata-rata cakupan layanan sebesar 85% maka capaian sudah sangat baik sehingga rekomendasi dilanjutkan intervensi *stunting* dengan melibatkan semua lintas sektor (pemerintah, lembaga profesi, LSM/NGO, swasta dan masyarakat).
2. Manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Desember 2024 dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian & Perikanan, Dinas Kominfo, Dinas PPPA/PPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas CKTR dan Dinas Lingkungan Hidup) dari tahapan perancangan rencana program kegiatan (tindaklanjut analisis situasi), konsultasi rencana program kegiatan dengan DPRD, publikasi rencana kegiatan di musrenbang dan rembuk *stunting*, finalisasi rencana program kegiatan dan integrasi rencana program kegiatan ke dokumen rencana daerah sesuai Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Tahapan manajemen rencana program kegiatan menghasilkan (output) antara lain:
- a. Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan tindaklanjut analisis situasi dan merancang rencana program kegiatan *stunting* tahun 2024 serta kemudian publikasi rencana program kegiatan di forum musrenbang dan rembuk *stunting* pada tanggal 15 Februari 2024 di Kabupaten Deli Serdang.

- b. Penetapan program kegiatan intervensi *stunting* tahun 2024 sebanyak 43 program kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 142.200.890.069,- yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Deli Serdang sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021.
 - c. Rencana program kegiatan intervensi *stunting* tahun 2025 sebanyak 43 program kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 190.059.557.749,- yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Deli Serdang sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021.
 - d. Program kegiatan intervensi *stunting* tahun 2024 sebanyak 751 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 80.231.613.552,- yang bersumber dari APBDes (dana desa) sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021.
 - e. Program kegiatan yang ditetapkan di dokumen rencana daerah tahun 2025 (APBD tahun 2025) sebanyak 40 program kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 189.956.627.859,-
3. Hasil analisis situasi dalam percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sudah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 dalam mencapai target antara lain:
- a. Kelompok sasaran *stunting* (Remaja, Catin/Capus, Ibu hamil, Ibu menyusui dan Balita) sudah menjadi target utama dalam identifikasi sebaran *stunting* dan kondisi layanan *stunting* di Perpres 72 tahun 2021.
 - b. Lokus *stunting* tahun 2024 ditetapkan sebanyak 394 desa/kelurahan menjadi target kebijakan semua daerah/wilayah pernah menjadi sasaran lokus *stunting* sesuai Perpres 72 tahun 2021.
 - c. 64 cakupan layanan kegiatan *stunting* menjadi identifikasi capaian cakupan layanan sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021.

- d. Konvergensi lintas sektor dalam percepatan penurunan *stunting* (pemerintah, lembaga/instansi, LSM/NGO, swasta/CSR dan masyarakat) sesuai kebijakan konvergensi lintas sektor di Perpres 72 tahun 2021.
4. Hasil manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 sudah mencapai target antara lain:
- a. Capaian indikator layanan kegiatan *stunting* rata-rata 85% sudah mencapai indikator Perpres 72 tahun 2021.
 - b. Integrasi perencanaan program kegiatan *stunting* kedalam musyawarah perencanaan daerah (musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten) sudah sesuai kebijakan sistem perencanaan daerah di Perpres 72 tahun 2021.
 - c. Keterlibatan lintas sektor dalam percepatan penurunan *stunting* (pemerintah, lembaga profesi, LSM/NGO, swasta dan masyarakat) dan mengupayakan semua sumber dana dalam intervensi *stunting* (APBN, APBD, DAK, DAU, Dana Desa dan CSR) sesuai kebijakan konvergensi lintas sektor di Perpres 72 tahun 2021.

5.2 Implikasi

Penelitian ini menghasilkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan bahwa analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, memberikan dampak dalam merencanakan lokasi sasaran prioritas *stunting* dan cakupan layanan prioritas dalam intervensi *stunting* serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan manajemen perencanaan program kegiatan *stunting* kedalam dokumen rencana daerah (APBD Kabupaten Deli Serdang) tahun 2024. Hasil penelitian ini memberikan implikasi antara lain :

1. Implikasi atau dampak terhadap analisis situasi dalam percepatan penurunan stunting antara lain:
 - a. Implikasi terhadap lokasi prioritas dan cakupan layanan prioritas *stunting* yang membuat Kabupaten Deli Serdang lebih fokus dalam intervensi *stunting* sesuai sasaran dan layanan prioritas yang dibutuhkan kelompok sasaran *stunting* tahun 2024.
 - b. Implikasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan *stunting* yang membuat koordinasi dan rekomendasi penguatan antar tingkatan pemerintahan dan lembaga dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan integrasi layanan kegiatan *stunting* tahun 2024.
2. Implikasi atau dampak terhadap manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan stunting antara lain :
 - a. Implikasi terhadap perencanaan program kegiatan *stunting* yang membuat sistem perencanaan reguler daerah (forum musyawarah, program kegiatan dan alokasi anggaran) dapat mengakomodir program kegiatan yang dibutuhkan dalam intervensi *stunting* tahun 2024 sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021.
 - b. Implikasi terhadap perencanaan program kegiatan stunting selanjutnya akan lebih baik dari tahun sebelumnya karena berdasarkan praktek baik dan inovasi dalam intervensi kegiatan stunting yang sudah dilakukan dan capaian kegiatan yang mencapai 85%.
3. Implikasi atau dampak pencapaian target Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 antara lain :
 - a. Implikasi terhadap capaian target indikator Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 yang membuat cakupan layanan kegiatan *stunting* yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus diupayakan terlaksana dan tercapai

sesuai target indikator lampiran Perpres 72 tahun 2021 sehingga hasil capaiannya selaras dengan percepatan penurunan *stunting* tahun 2024.

- b. Implikasi terhadap penurunan jumlah balita *stunting* dan pencegahan kasus *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 berdasarkan intervensi program kegiatan *stunting* yang ditetapkan melalui APBN, APBD, APBDesa dan CSR di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 yang melibatkan semua lintas sektor (pemerintah, lembaga/instansi, LSM/NGO, swasta dan masyarakat).

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi diatas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi Kabupaten Deli Serdang dan lembaga/instansi lainnya dalam percepatan penurunan *stunting* pada tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Saran terhadap analisis situasi dalam percepatan penurunan *stunting* antara lain:
 - a. Diharapkan penetapan lokus *stunting* di Kabupaten Deli Serdang tahun selanjutnya mempertimbangkan lokasi desa/kelurahan yang fokus pencegahan kasus *stunting* dan fokus percepatan penurunan *stunting* sehingga khususnya bagi desa/kelurahan yang sudah tidak ada balita *stunting* dapat fokus pencegahan kasus baru dan bagi desa/kelurahan banyak balita *stunting* dan cakupan layanan yang masih rendah dapat fokus mempercepat penurunan balita yang mengalami *stunting*.
 - b. Diharapkan lebih mendetail/mendalam kembali identifikasi kendala/masalah dan rekomendasi di Kabupaten Deli Serdang dalam cakupan layanan intervensi *stunting* dengan cara melaksanakan FGD (focus group discussion) terhadap semua OPD terkait yang penanggungjawab kegiatan sehingga kekurangan/kendala layanan kegiatan akan lebih terperinci dan tepat kegiatan.

2. Saran terhadap manajemen perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* antara lain :
 - a. Diharapkan pemetaan (*tagging*) program kegiatan *stunting* di Kabupaen Deli Serdang pada tahun berjalan dapat lebih terperinci sesuai indikator Perpres 72 tahun 2021 dari semua sumber dana (APBN, APBD, APBdesa dan CSR) khususnya membedakan kegiatan intervensi langsung (kelompok sasaran *stunting*), intervensi tidak langsung (indikator layanan) dan intervensi pendukung (pelatihan, monev dan rapat/pertemuan).
3. Saran terhadap pencapaian target Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 antara lain :
 - a. Diharapkan capaian indikator kegiatan *stunting* sesuai Perpres 72 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang pada tahun selanjutnya dapat dipertahankan dan meningkatkan capaian cakupan layanan kegiatan yang sudah sangat baik pada tahun sebelumnya (85%) sehingga dapat berhasil dalam pencegahan kasus baru *stunting* dan percepatan penurunan *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Balai Pustaka*. Jakarta.
- Dirjen Bangda, Kemendagri. 2022. 11 Dirjen Bangda Kemendagri *Petunjuk Teknis 8 Aksi Konvergensi Stunting*.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hardani dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI press.
- Gultom, Fransiska Mariana, 2023 “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bontang” Tesis, Magister Administrasi Publik. Samarinda: Universitas Mulawarman Samarinda.
- Indayani, Lilik. 2018. Pengantar Manajemen *Pengantar Manajemen*. doi:10.21070/2018/978-602-5914-18-8.
- John W. Creswell. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemenkes RI. 2022. “Status Gizi SSGI 2022.” *BKPK Kemenkes RI*: 1–156.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1TXopzHJm13UHlgDLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718828202/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fpromkes.kemkes.go.id%2Fpub%2Ffiles%2Ffiles52434Buku%2520Saku%2520SSGI%25202022%2520rev%252010123.pdf/RK=2/RS=ua_K.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mastina, Tien, and Mitra. 2023. “Peran Koordinasi Lintas Sektor Dalam Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*.” *Jurnal Promotif Preventif* 6(1): 131–44.
<http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>.
- Mursalin, Iing. 2022. *Pentingnya Analisis Situasi dan Pemetaan Program Kegiatan dan Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting*. Setwapres Jakarta.

- Munadi, Muhammad Cholil, 2022 “Analisis Family Resilience: Kajian Kualitatif pada Orang Tua Yang Memiliki Balita *Stunting* di Kabupaten Muaro Jambi” Tesis, Magister Kesehatan Masyarakat. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Konvergensi *Stunting*.
- Pelatihan Penelitian BKKBN, Bidang dan Pengembangan. 2021. *Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia*.
- Perpres 72, 2021. 2021. “Presidential Regulation (PERPRES) Number 72 of 2021 Concerning Acceleration of *Stunting* Reduction.” (172).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.
- PPN/Bappenas, Kementerian. 2018. “INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*.” (November).
- Perangkat Teknis Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- RI, Kemenkes 2021. 2021. “Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021.” *BKPK Kemenkes RI* 11(1): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- RI, Kemenkes 2023. 2023. “Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023.” *BKPK Kemenkes RI*: 1–68.
- Sanusi, Anwar. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (Neo-Institusionalisme, Teori dan Praktek)*. Depok.
- Soegiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Tampubolon, Dahlan. 2010. “Kebijakan Intervensi.” *Jurnal Kebijakan Publik* 11(1): 25–32.
<https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/dashboardmonev>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara dan observasi

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI ANALISIS SITUASI DAN MANAJEMEN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* BEDASARKAN PERPRES 72 TAHUN 2021 DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

Key Informan : Bappedalitbang Kab. Deli Serdang

Informan pendukung : Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD,
Dinas Sosial, Dinas Pertanian & Perikanan, Dinas Kominfo,
Dinas PPPA/PPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas CKTR
serta Dinas Lingkungan Hidup

Informan Pembanding: Bappedalitbang Provinsi Sumatera Utara dan Persagi
Provinsi Sumatera Utara

No	Pertanyaan
ANALISIS SITUASI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i>	
1	Bagaimana pelaksanaan analisis situasi yang sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan melibatkan semua OPD terkait ?
2	Bagaimana pola penetapan sebaran sasaran dan layanan prioritas <i>stunting</i> dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 ?
3	Berdasarkan SK Bupati Deli Serdang No. 182 tahun 2023 ditetapkan 394 desa/kelurahan menjadi lokus <i>stunting</i> tahun 2024, apa yang menjadi pertimbangannya ?
4	Berdasarkan pemetaan program kegiatan tahun 2024 terdapat 25 indikator kegiatan sesuai Perpres 72/2021, bagaimana dengan indikator yang lainnya yang belum tersedia? bila disandingkan dengan identifikasi cakupan layanan yang akan dilakukan intervensi ada perbedaannya ?
5	Bagaimana hasil identifikasi kesenjangan cakupan layanan (analisis gap) ?

No	Pertanyaan
	apakah dilaksanakan identifikasi kendala/masalah dan rekomendasi kesenjangan cakupan layanan ?
6	Bagaimana koordinasi yang diperlukan untuk meningkatkan intervensi bagi sasaran prioritas <i>stunting</i> ?
MANAJEMEN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN STUNTING	
1	Bagaimana pelaksanaan semua tahapan manajemen perencanaan program di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 ?
2	Apakah hasil analisis situasi ditindaklanjuti menjadi rencana program kegiatan <i>stunting</i> tahun 2024 ? Terdapat 45 indikator kegiatan tahun 2024 dan 43 indikator kegiatan tahun 2025, bagaimana dengan indikator lainnya ?
3	Apakah desa lokus <i>stunting</i> yang ditetapkan menjadi lokasi sasaran prioritas <i>stunting</i> mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2024 ?
4	Bagaimana integrasi perencanaan regular daerah untuk kegiatan <i>stunting</i> ? apakah ada pembahasan di forum musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten ?
5	Apakah perencanaan program kegiatan <i>stunting</i> melalui pembahasan di forum OPD, kemudian integrasi ke dokumen RKPD, Renja OPD, KUA PPAS dan APBD tahun 2024 ?
6	Apakah rencana program kegiatan <i>stunting</i> sudah ditetapkan menjadi APBD/APBD-P tahun 2024 ? sumber dana berasal dari mana (APBD/APBN/CSR/Dana Desa) ?
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	
1	Apakah program kegiatan <i>stunting</i> yang menjadi pengampu OPD sudah mengakomodir indikator kegiatan Perpres 72 tahun 2021?
2	Apakah target kegiatan <i>stunting</i> yang ditetapkan di Perpres 72 tahun 2021 sudah tercapai di tahun 2024 ?
3	Apa saja kendala dan hambatan dalam pencapaian target indikator kegiatan Perpres 72 tahun 2021 ?

Lampiran 2 Surat persetujuan judul tesis & dosen pembimbing tesis



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 2040 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2024

Tentang :

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA
 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
 PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **RIZAL EFFENDI**
 NPM : 2320030031
 Prog. Studi / Konst. : Magister Manajemen / Manajemen Sumber Daya Manusia
 Judul Tesis : STRATEGI ANALISIS SITUASI DAN MANAJEMEN
 PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DALAM
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TERINTEGRASI BERDASARKAN PERATURAN
 PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KABUPATEN
 DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTRA
 TAHUN 2024
 Pembimbing I : Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA
 Pembimbing II : Assoc.Prof.Dr.Drs. Sjahril Effendy P., M.Si., M.A., M.Psi., M.H., MRE, CNLP

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 28 Desember 2025, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 26 Jumadil Akhir 1446 H
 28 Desember 2024 M



Direktur

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
 NIDN. 1012125601

Tembusan:

1. Ketua Prodi MM UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Pertiagal.



Lampiran 3 Surat permohonan izin riset / penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 292/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 28 Sya'ban 1446 H
27 Februari 2025 M

Kepada Yth. :

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang
(Selaku Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan
Perencanaan TPPS Kabupaten Deli Serdang)**

di

Tempat.-

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **RIZAL EFFENDI**

NPM : 2320030031

Prodi : Magister Manajemen

Judul Tesis : STRATEGI ANALISIS SITUASI DAN MANAJEMEN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Cc. File



Lampiran 4 Surat persetujuan izin riset Bappedalitbang Kab. Deli Serdang



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
 Telepon/Faksimile (061) – 7951422

Pos-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id Laman <https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 4 Maret 2025

Nomor : 000.9/ 170 /BAPPEDALITBANG/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 Kabupaten Deli Serdang

di -

Tempat

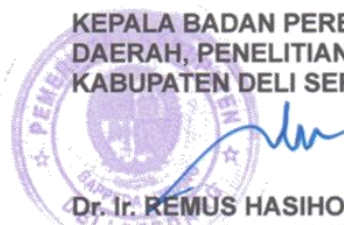
Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/195 tanggal 03 Maret 2025 dan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 292/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Permohonan Izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Rizal Effendi
- b. Alamat : Jl. Letda Sujono Gg. H. Zaenal Arifin No. 398
- c. NIP / NIM / KTP : 1271142408790005
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Prodi / Jurusan : Magister Manajemen
- f. Judul / Tema : Strategi Analisis Situasi dan Manajemen Perencanaan Program Kegiatan dalam Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024
- g. Daerah / Lokasi : BAPPEDALITBANG Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama : 1 (satu) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Triono Eddy, S.H, M.Hum

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan riset pada Kantor BAPPEDALITBANG Kabupaten Deli Serdang dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN DELI SERDANG,**



Dr. Ir. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199203 1 004

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
3. Direktur Program Pascasarjana UMSU
4. Pertinggal

Lampiran 5 Hasil pemeriksaan turnitin dari Perpustakaan UMSU

STRATEGI ANALISIS SITUASI DAN MANAJEMEN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

ORIGINALITY REPORT			
35%	34%	11%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.unas.ac.id Internet Source	4%	
2	jdih.kalteng.go.id Internet Source	4%	
3	web.karokab.go.id Internet Source	3%	
4	www.scribd.com Internet Source	2%	
5	portal.deliserdangkab.go.id Internet Source	2%	
6	bappeda.bantenprov.go.id Internet Source	1%	
7	permatabank.com Internet Source	1%	
8	hrms.nti.co.id Internet Source	1%	
9	esakip.bangkaikab.go.id Internet Source	1%	
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1%	

Lampiran 6 Dokumentasi kegiatan observasi, dokumentasi dan wawancara

Foto Kegiatan	Keterangan
	Kantor Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat riset penelitian analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan <i>stunting</i> di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024
	Kegiatan riset penelitian dalam observasi dan dokumentasi kepada Bappedalitbang untuk pengumpulan data dan deskripsi pelaksanaan analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan <i>stunting</i> di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024
	Kegiatan wawancara kepada Bappedalitbang untuk perdalam temuan pelaksanaan analisis situasi dan manajemen perencanaan program kegiatan <i>stunting</i> di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024

Foto Kegiatan	Keterangan
	Kegiatan analisis situasi dan perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dengan mengundang OPD pengampu kegiatan stunting pada bulan Januari dan Februari 2024.
	Kegiatan analisis situasi dan perencanaan program kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dengan mengundang OPD pengampu kegiatan stunting pada bulan Januari dan Februari 2024.
	Kegiatan wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang terkait capaian program kegiatan stunting tahun 2024.